



2019

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA



Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Jakarta, Februari 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2019. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Sebagaimana unit kerja lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sejak tahun 2016 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Dengan metode tersebut kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 telah ditetapkan 5 (lima) SS yang diukur dengan 8 (delapan) IKU. SS dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari tiga perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Pada tahun 2019 ini terdapat 12 (dua belas) Rancangan Kebijakan sebagaimana dinilai melalui pencapaian IKU yang dijanjikan untuk dapat dicapai. Untuk penyerapan anggaran per 31 Desember 2019 terealisasi anggaran sebesar Rp 19.170.773.530, - atau sebesar 97,8 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 19.600.036.000,-. Penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun 2019 ini lebih tinggi dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan performance perencanaan anggaran mengalami peningkatan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Akhirnya semoga laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa selama tahun 2019. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa.

**Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

AGUNG KUSWANDONO

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
C Aspek Strategis	7
D Isu Strategis	7
E Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A Rencana Strategis	10
1 Visi	11
2 Misi	11
3 Tujuan	11
4 Sasaran Strategis	12
B Target Kinerja	16
C Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
D Pengukuran Kinerja Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
B Analisis Capaian Kinerja	30
C Kinerja Lainnya	53
D Realisasi Anggaran	54
E Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu	55
BAB IV PENUTUP	59
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2019	61
Lampiran II Data Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam Dan Jasa	90
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.1 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati.....	155
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.2 : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	160

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.3 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati	165
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.4 : Kebijakan Tata Kelola Garam.....	170
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.5: Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi.....	175
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.6: Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi.....	180
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.7: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata	185
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.8 : Kebijakan Pengembangan Marina.....	190
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.9: Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional.....	195
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.10 : Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu.....	200
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.11 : Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim.....	205
Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.12: Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut	210
Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW I).....	211
Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW II).....	214
Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW III).....	217
Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW IV).....	218
IKU 1 Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim.....	224
IKU 2 Ocean Health Index (OHI) / Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup Indonesia.....	235
IKU 5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah....	237

Data dukung Sub IKU Tambahan: Kebijakan Terkait Koordinasi Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Khususnya Labuan Bajo	192
Data dukung Sub IKU Tambahan: Kebijakan Terkait Koordinasi Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Khususnya Wakatobi	193
Kebijakan Terkait Koordinasi Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Khususnya Bromo Tengger Semeru	194
Data Dukung Temuan BPK	195
Data Dukung Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan Data Kinerja	196
Data Dukung Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan Data Kinerja.....	200

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	4
Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	17
Gambar 2.2 Alur Keluaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	18
Gambar 2.3 Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulasi	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015 – 2019	14
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018	23
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Untuk Periode Tahun 2018	31
Tabel 3.2 Target dan Capaian Sub IKU untuk SS 1 Cascading ke SS 2 Tahun 2018	34
Tabel 3.3 Target dan Capaian Sub IKU untuk SS 1 <i>Cascading</i> ke SS 2 Tahun 2018	35
Tabel 3.4 Target dan Capaian Sub IKU mendukung target kinerja Menteri Tahun 2018	36
Tabel 3.5 Uraian Jumlah Rancangan Kebijakan yang Dihasilkan di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018.....	37
Tabel 3.6 Sasaran Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	51
Tabel 3.7 Uraian Jumlah Rancangan Pengendalian Kebijakan yang Dihasilkan di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018	51
Tabel 3.8 Uraian Jumlah Rancangan Kebijakan yang Mendukung Kinerja Menteri di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018	56
Tabel 3.9 Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim	60
Tabel 3.10 Target IKLH	62
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018.	66

Tabel 3.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Per 31 Desember 2018	67
Tabel 3.13	Produk Keluaran Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2018	68
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Mulai Tahun 2015 Hingga 2018	69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyusun laporan kinerja tahun 2019. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019 memuat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan tiga perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target; (2) *Ocean Health Index*; dan (3) Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator. Sebagai bagian dari *Internal Business Process Perspective* telah ditetapkan 2 (dua) SS yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yakni: (1) Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan; dan (2) Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya. Sebagai bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang terdiri dari 3 (tiga) IKU, yakni: (1) Nilai Evaluasi Internal (AKIP); (2) Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan; dan (3) Persentase Realisasi Anggaran).

Berdasarkan ke-8 IKU tersebut, capaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2019 adalah sebesar 101,85%. Pada IKU 1: Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target memperoleh realisasi

capaian sebesar 94,84% dari target $\geq 85\%$. Pada IKU 2: *Ocean Health Index* memperoleh realisasi capaian sebesar 65 dari target ≥ 68 . Pada IKU 3: Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dan memenuhi target. Pada IKU 4: Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan memperoleh realisasi capaian sebanyak 12 (dua belas) rancangan kebijakan dan memenuhi target. Pada IKU 5: Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dan memenuhi target. Pada IKU 6: Nilai Evaluasi Internal (AKIP) tercapai 71,04 dari target ≥ 65 dan memenuhi Pada IKU 7: Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan memperoleh realisasi capaian sebesar 95,42% dari target 100% dan belum memenuhi target yang diperjanjikan. Pada IKU 8 Persentase Realisasi Anggaran memperoleh realisasi capaian sebesar 97,80% dan memenuhi target sesuai yang diperjanjikan sebesar $\geq 95\%$.

Adapun pada pencapaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun 2018 ini berupa 12 (dua belas) Rancangan Kebijakan dan Rancangan Pengendalian Kebijakan. Pencapaian tersebut adapun didukung oleh adanya input pendanaan, yakni anggaran efektif sebesar Rp. 19.600.036.000,- dengan realisasi Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 dari pagu. Realisasi ini meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 83,39%. Hal ini menunjukkan performance perencanaan anggaran mengalami peningkatan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, pencapaian kinerja pada tahun 2019 cenderung sama dimana mampu mencapai angka lebih dari 100%. Hal ini ditandai dari rata-rata capaian yang dihasilkan pada tahun 2018 mencapai 103,2%, sedangkan rata-rata capaian yang dihasilkan pada tahun ini mencapai 101,85%. Secara umum, tugas pokok Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah berjalan dengan sangat baik dibandingkan tahun 2018. Bila dilihat lebih lanjut pada dasarnya pencapaian kinerja 2018 pada Sasaran Strategis *Customer Perspektif* dan *Internal Process Perspektif* yang merupakan tugas pokok Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah tercapai 100%. Di satu sisi, Sasaran Strategis *Learning and Growth Perspektif* mencapai target kinerja tahun 2019 ini mencapai 102,55% khususnya pada realisasi anggaran yang jauh membaik daripada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan yang signifikan dari sisi perencanaan dan tata kelola. Bila ditelaah lebih lanjut faktor pendukungnya adalah: Pertama, penetapan indikator pada *Learning and Growth Perspektif* nilai AKIP jauh melonjak dibandingkan periode sebelumnya

yang menggambarkan kinerja lebih terukur dan berkualitas, selain itu, kuantitas dan bobot program dan kegiatan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018; ketiga, mekanisme koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa semakin baik dan dinamis; keempat, aplikasi SIK-M sebagai generasi baru dari aplikasi BSC telah membantu untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja; kelima, peningkatan fasilitas dan personil dengan tambahan pegawai.

Untuk semakin meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2019, direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Memperhatikan secara penuh tingkatan dan kualitas output yang telah diperjanjikan pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 akan mulai diterapkan nomenklatur kementerian yang baru, sehingga tuntutan pengumpulan data, analisis dan sistematika perancangan kebijakan akan semakin komprehensif dan tajam. (2) Melakukan pemenuhan terhadap sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan. (3) Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputy lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa (4) Perbaiki terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan yang khususnya meliputi volume dan lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga meminimalisir potensi perlunya revisi anggaran. (5) Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. (6) Perbaiki pada proses administrasi keuangan minimal pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia terdiri dari lima pilar utama sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 dalam *9th East Asia Summit* di Myanmar. Kelima pilar utama tersebut, yakni: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melaksanakan diplomasi maritim untuk membangun kerjasama di bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan pembangunan ‘Poros Maritim Dunia’ ini kemudian disampaikan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 dalam sidang IMO MEPC ke-69 di London.

Sebagai langkah perwujudan target tersebut, maka dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet kerja. Tugas utama kementerian koordinator ini adalah untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan bidang kemaritiman sehingga terjadi sinergi diantara Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia, pembangunan bidang kemaritiman akan dilaksanakan dengan fokus pada kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, infrastruktur kemaritiman dan sumber daya manusia, IPTEK, dan budaya maritim.

Fokus pembangunan maritim dijabarkan lebih lanjut dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Khusus untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa, dibentuk unit organisasi eselon I Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Diharapkan dengan pembentukan unit organisasi ini akan menghilangkan hambatan dan kendala dalam pembangunan kemaritiman khususnya dalam upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada empat sasaran

strategis Deputy Sumber Daya Alam dan Jasa dalam upaya mendorong pencapaian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan. *Pertama*, meningkatnya nilai tambah sumber daya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan. *Kedua*, tersedianya rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa. *Ketiga*, terselesaikannya tugas tambahan lainnya di bidang sumber daya alam dan jasa. *Keempat*, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. *Kelima*, terkelolanya anggaran secara optimal.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selanjutnya ditekankan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputy lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Terdapat empat program dan kegiatan utama pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. *Pertama*, peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya hayati. *Kedua*, peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional. *Ketiga*, peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman. *Keempat*, peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.

Selanjutnya untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Asisten Deputy tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Mempedomani Renstra Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019, layanan kesekretariatan tersebut menitikberatkan kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini; serta akuntabilitas kinerja yang baik.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputy. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *output/outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputy berikut indikator kerjanya. Untuk tahun 2019 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process, learning and growth, dan customer perspective*. Meskipun belum optimal dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan SIK-M dalam pengukuran kinerja dan keterbatasan personil untuk mengelola sistem ini, pada tahun 2017 seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menerapkan sistem SIK-M ini. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: SKEP. 4/SESMENKO/MARITIM/VIII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor: 36/DII/MARITIM/IX/2016 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

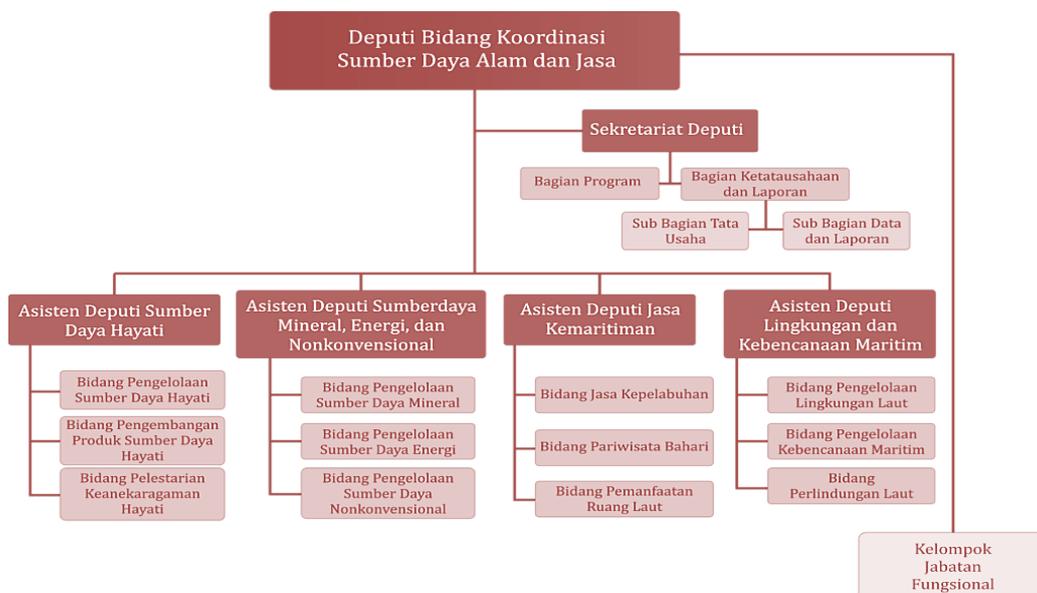
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hayati;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan energi;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya non konvensional;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri pariwisata;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa didukung oleh Laporan Kinerja Tahun 2019

lima unit organisasi eselon II yang terdiri dari satu Sekretariat Deputi dan empat Asisten Deputi yakni Asisten Deputi Sumber Daya Hayati; Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional; Asisten Deputi Jasa Kemaritiman; dan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim. Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi eselon II dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran deputi;
- b. Pengelolaan sistem informasi;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi deputi;
- d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan data dan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya hayati kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

3. Asisten Deputi Mineral, Energi dan Non Konvensional

Asisten Deputi Mineral, Energi dan Non Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya energi, mineral dan non konvensional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Sumber Daya Energi, Mineral dan Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya non konvensional;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi, dan pengelolaan sumber daya non konvensional;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya non konvensional.

4. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut.

5. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang lingkungan dan kebencanaan maritim. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim.

C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai aspek strategis untuk menjamin meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya hayati, pengelolaan sumber daya mineral, energi dan non konvensional, pengelolaan jasa kemaritiman dan pengelolaan aspek lingkungan dan kebencanaan kemaritiman dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang sumber daya alam dan jasa diarahkan untuk mempercepat:

1. Peningkatan sinergi tata kelola sumber daya hayati secara berkelanjutan;
2. Peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya mineral, energi, dan non konvensional yang ramah lingkungan dan mengutamakan kepentingan nasional;
3. Berkembangnya jasa kemaritiman yang inovatif dan berdaya saing global; dan
4. Peningkatan kualitas lingkungan maritim dan terwujudnya tata kelola kebencanaan maritim yang terpadu.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa;
2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

D. Isu Strategis

Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berperan dalam mewujudkan tercapainya peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sumberdaya hayati;
2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional;
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman;

4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.

Keempat program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2019 sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati;
2. Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati;
3. Koordinasi Pengembangan Kebijakan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi Promosi Kebijakan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi Kebijakan pengelolaan kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
6. Koordinasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu karang Indonesia;
7. Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba;
8. Kebijakan Tata Kelola Garam;
9. Pengendalian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;
10. Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi;
11. Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi;
12. Koordinasi Kebijakan Efisiensi dan Konservasi Energi untuk bangunan pemerintah;
13. Pengendalian Kebijakan Pemenuhan Energi bagi Pembangunan Kemaritiman;
14. Pengendalian Kebijakan Penurunan Angka Dwelling Time;
15. Koordinasi Kebijakan Penerapan Indonesia Nasional Single Window (INSW)
16. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
17. Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan;
18. Koordinasi Kebijakan Kemudahan Kunjungan Wisata ke Indonesia;
19. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata;
20. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Marina;
21. Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional;
22. Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Terkait Pemanfaatan Ruang Laut;
23. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Laut;
24. Koordinasi Kebijakan BMKT dan Pengembangan Museum/Wisata Shipwerck;
25. Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu;
26. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim;
27. Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim;
28. Koordinasi Upaya Pengendalian Kebijakan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia;
29. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Mensejahterakan Rakyat;

30. Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Tim Nasional dan Membangun Tim Daerah;
31. Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2019. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) pada tahun 2019 dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2019 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk periode tahun 2019. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan bagi tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai visi **menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.**

Visi ini merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam rangka memberikan dukungan terhadap tujuan kementerian. Visi tersebut mempunyai makna bahwa koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa merupakan proses menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Di sisi lain, pengendalian merupakan proses pemantauan kegiatan untuk memastikan kesesuaian rencana yang dilakukan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Fungsi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang dilakukan melalui penerapan nilai-nilai dasar unit organisasi yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian harus memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa. Efisien menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara cermat, akurat dan optimal serta mengacu kepada kebutuhan organisasi. Selanjutnya, transparan dan akuntabel berarti adanya kewajiban pelaporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan keterbukaan. Berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif agar tercipta sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga tercipta pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkesinambungan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan peran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Misi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk mewujudkan misinya adalah:

- a. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/Lembaga;
- b. Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa.

3. Tujuan

Secara umum tujuan unit organisasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah untuk mewujudkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman yang berkelanjutan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Secara khusus, tujuan organisasi dengan mempedomani visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan;
- b. Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/Lembaga yang akurat;
- c. Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kemaritiman;
- d. Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksana kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dapat diwujudkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sasaran pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) dan merupakan bagian integral dari tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan yang dihadapi organisasi ke depan.

4. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memenuhi harapan stakeholder, unit organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyusun Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dapat dirangkum dan disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019

Visi: Menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Misi 1: "Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/ Lembaga."				
<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan. - Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman selalu didukung dengan data 	<p>Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jejaring, kerjasama, sinergi dan komunikasi antar sektor dan Kementerian/ Lembaga terkait. - Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman dengan menyusun database/ <i>dashboard</i> sumber daya alam dan jasa kemaritiman. - Mengembangkan kerjasama antar Kementerian/ Lembaga terkait dalam bidang pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, 	<p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa</p>

dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.			jasa kemaritiman dan kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.	
<i>Misi 2 : “Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan”.</i>				
Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kemaritiman.	Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman; - Monitoring dan evaluasi diikuti dengan pelaporan kinerja yang memiliki karakteristik simpel, akurat dan cepat sehingga dapat menggambarkan pencapaian pelaksanaan kebijakan beserta tantangan dan hambatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan SOP monitoring dan evaluasi. - Mengembangkan sistem pelaporan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi. 	Program Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
<i>Misi 3 : “Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa.”</i>				
Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan pengembangan organisasi; - Menyusun budaya dan nilai-nilai organisasi; - Meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas kerja; - Meningkatkan komitmen karyawan sehingga dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun arah pengembangan organisasi; - Mendefinisikan, mengembangkan dan menginternalisasi budaya organisasi; - Membangun 	Program Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

<p>kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.</p>		<p>memotivasi kinerja yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan keuangan; - Meningkatkan akuntabilitas pelaporan. 	<p>kompetensi berbasis visi</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP dan sistem administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; - Menyusun SOP pelaporan. 	
---	--	--	--	--

Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

B. Target Kinerja

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Selanjutnya pada level eselon I, terdapat dua tugas utama. Tugas utama pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemaritiman. Hasil kinerja utama dari koordinasi dan sinkronisasi adalah rumusan kebijakan dan perbaikan kebijakan. Tugas utama kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan. Pengendalian adalah proses membandingkan kesesuaian dengan rencana atau proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Hasil kinerja utama dari pengendalian adalah rekomendasi tindakan.

Gambar 2.1
Jenis Keluaran Menurut Kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Keterangan: * dapat berupa penugasan khusus.

Selain tugas utama, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman maupun dari Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maupun pada level eselon I.

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya

hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Gambar 2.2
Alur Keluaran Kegiatan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa



Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/gLembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rekomendasi kebijakan deputi. Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rekomendasi tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.

Output kebijakan dapat berupa kebijakan regulatif yang berarti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keluaran kebijakan regulatif dapat dibagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kebijakan ini berbentuk Keputusan atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Kebijakan Kementerian/Lembaga terkait, yakni berupa Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan sebagainya.
3. Kebijakan Presiden, yakni berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan atau Instruksi Presiden.
4. Kebijakan nasional, yakni berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Kebijakan pada level regional dan internasional, yakni berupa konvensi, resolusi dan perjanjian internasional.

Tingkatan keluaran kebijakan regulatif tersaji pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif



Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama periode 2015-2019 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis/ IKU	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
<p>Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>) 1</p> <p>Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang diselesaikan;</p> <p>2. Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti</p>	8	8	8	8	8
<p>Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>) 2</p> <p>Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>1. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa</p> <p>2. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti.</p>	3	3	3	3	3
<p>Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>) 3</p> <p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>1. Jumlah dokumen tentang perencanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta teknis pada Deputi Bidang</p>	1	1	1	1	1

Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.					
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
3. Jumlah dokumen bidang tata usaha dan pelaporan.	1	1	1	1	1
4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, penyelesaian layanan urusan keuangan, penyelesaian layanan tata naskah, arsip dan dokumentasi, laporan keuangan, dan tindak lanjut LHP.	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %

Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. *Kedua*, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. *Ketiga*, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. *Terakhir*, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2019, dengan tujuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan Januari 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam

dan Jasa untuk tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan tiga perspektif pendekatan SIK-M, yakni *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim Sesuai Target; (2) *Ocean Health Index*; dan (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator.

Pada bagian dari *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) IKU. SS yang pertama, yakni tersedianya rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dengan IKU-nya, yaitu jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya pada SS yang kedua, yakni terselesaikannya tugas tambahan lainnya di bidang sumber daya alam dan jasa yang diberikan pimpinan dengan IKU-nya, yaitu persentase penyelesaian tugas lainnya.

Pada bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 2 (dua) SS. SS yang pertama adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dengan IKU-nya, yakni (1) Nilai Evaluasi Internal (AKIP); dan (2) Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan. Kemudian SS yang kedua adalah terkelolanya anggaran secara optimal dengan IKU-nya, yakni persentase realisasi anggaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<i>Customer Perspective</i>			
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Maritim Secara Berkelanjutan	1. Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target	85%
		2. <i>Ocean Health Index</i>	68
		3. Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator	100%
<i>Internal Business Process Perspective</i>			
SS.2	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	4. Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan	12

SS.3	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang diberikan Pimpinan	5.	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
Learning And Growth Perspective				
SS.4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik	6.	Nilai Evaluasi Internal (AKIP)	≥65
		7.	Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%
SS.5	Terkelolanya Anggaran Secara Optimal	8.	Persentase Realisasi Anggaran	≥85

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, 2019.

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim Sesuai Target

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan persentase produksi sumber daya alam dan jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 2: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan jumlah *Ocean Health Index* yang dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 4: Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan

Pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, ditargetkan jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 (dua belas) rancangan kebijakan. Pencapaian IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 5: Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya

IKU 5 ini dihitung sesuai persentase penyelesaian tugas lainnya setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 6: Nilai Evaluasi Internal (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, ditargetkan nilai Evaluasi AKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 adalah sebesar ≥65 atau kategori B. Interpretasi dari nilai AKIP ini adalah Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

IKU 7: Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan

Perhitungan capaian IKU 7 dilakukan dengan menghitung jumlah persentase nilai ketaatan penyampaian pelaporan (triwulan atau tahunan) kemudian membandingkannya dengan target kinerja. Pencapaian IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50% ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 8: Persentase Realisasi Anggaran

Perhitungan capaian IKU 9 dilakukan dengan menghitung persentase realisasi anggaran (triwulan atau tahunan) kemudian membandingkannya dengan target kinerja. Pencapaian IKU ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50% ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menetapkan 5 (lima) SS dengan tiga perspektif pendekatan *balance scorecard* (BSC), yakni *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 1 (satu) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim Sesuai Target; (2) *Ocean Health Index*; dan (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS dengan masing – masing satu IKU yaitu: (1) Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan dan (2) Persentase

Penyelesaian Tugas Lainnya. Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 2 (dua) SS dan terdiri dari 2 (dua) IKU pada SS keempat dan 1 (satu) IKU pada SS kelima yaitu:

- (1) Nilai Evaluasi (AKIP);
- (2) Presentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan;
- (3) Persentase Realisasi Anggaran.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Untuk Periode Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Capaian		
				Realisasi	%	
			2019	2019		
Customer Perspective						
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Maritim Secara Berkelanjutan	1	Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Sesuai Target	85%	94,84%	111,58%
		2	<i>Ocean Health Index</i>	68	65	95,59%
		3	Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang Menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator	100%	100%	100%
Internal Business Process Perspective						
SS.2	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	4	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan	12	12	100%
SS.3	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang diberikan	5	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%	100%	100%

	Pimpinan					
Learning And Growth Perspective						
SS.4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik	6	Nilai Evaluasi Internal (AKIP)	≥65	71,04	109,29%
		7	Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%	95,42%	95,42%
SS.5	Terkelolanya Anggaran Secara Optimal	8	Persentase Realisasi Anggaran	≥95%	97,80%	102,95%
CAPAIAN KINERJA RATA – RATA						101,85%

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing – masing sasaran strategis (SS). Pada SS 1 IKU 1 terdapat target Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim sebesar 85% sedangkan SS 1 IKU 2 *Ocean Health Index* (OHI) terdapat target sebesar 68. *Customer Perspective* SS 1 IKU 3 terkait Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator terdapat target sebesar 100%. SS 2 IKU 4 pada *Internal Business Process Perspective* yang merupakan *Cascading* dari SS 1 IKU 3 yaitu Jumlah Rancangan Kebijakan Dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan dengan target tahunan sebanyak 12 dokumen kebijakan. IKU 5 yaitu terdapat persentase penyelesaian tugas lainnya ditargetkan sebanyak 100%. Selain itu terdapat target pada *Learning and Growth Perspective* SS 4 IKU 6 terkait Penilaian Evaluasi Internal (AKIP) ditargetkan mencapai ≥65 dan IKU 7 Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan terdapat target sebesar 100%. Selain itu pada SS 5 IKU 8 Persentase Realisasi Anggaran ditargetkan terealisasi sebesar ≥95 %.

Pada saat berakhirnya tahun 2019 ini dilaporkan bahwa pada *Customer Perspective* IKU 1 realisasi Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim 94,84%, IKU 2 realisasi *Ocean Health Index* (OHI) terdapat target sebesar 65, IKU 3 terkait Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator terdapat target sebesar 100%. Pada *Internal Business Process Perspective*, IKU 4 Jumlah Rancangan Kebijakan Dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan dengan target tahun 2019 sebanyak 12 dokumen, IKU 5 Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya sebesar 100%. Pada *Learning and Growth Perspective* IKU 6 terkait Penilaian Evaluasi Internal (AKIP) tercapai sebesar 71,04 dan IKU 7 Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan tercapai sebesar 95,42%. Selain itu pada IKU 8 Persentase Realisasi Anggaran ditargetkan terealisasi sebesar 97,80%. Secara keseluruhan rata – rata capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 sebesar 101,85%.

Untuk dokumen kebijakan yang telah dicapai pada tahun 2019 disajikan lengkap pada Tabel 3.2. Tabel ini menginformasikan jenis keluaran (bukti kinerja) yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Tabel 3.2
Capaian dan Jenis Keluaran (Bukti Kinerja)
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Untuk Periode Tahun 2019

NO	Sub IKU	BUKTI KINERJA
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang dihasilkan		
1.	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati	Rancangan Kebijakan tentang Perumusan Kebijakan Hari Nelayan Nasional
2.	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Kertas Kerja Kebijakan tentang Rencana Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional
3.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	a. Ringkasan Kebijakan tentang <i>Implementasi Low Budget Natural Farming</i> (LBNF) b. Terbitnya Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor B-1815/MENKO/MARITIM/A3.01.00/IX/2019 perihal <i>Implementasi Low Budget Natural Farming</i> pada tanggal 9 September 2019
4.	Kebijakan Tata Kelola Garam	a. Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) tentang Swasembada Garam Nasional melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Lahan Pergaraman b. Terbitnya Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI perihal Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional pada tanggal 6 Maret 2019 b. Terbitnya Nota Dinas Deputi perihal Penyampaian kembali konsep surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional pada tanggal 17 Juni 2019
5.	Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi	a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi b. Terbitnya Surat Deputi Nomor B.279/Deputi II/Maritim/IX/2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Rakor Debottlenecking Perizinan Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Program BBM Satu Harga.
6.	Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi
7.	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata	a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata b. Draft Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru

		c. Draft Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi
8.	Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional	a. Ringkasan Kebijakan tentang Tata Ruang Laut Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) c. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B- 1230/MENKO/MARITIM/HK.01.02/VII/2019 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas perihal Penyampaian Usulan Peta Tematik Bidang Kemaritiman pada 17 Juli 2019
9.	Kebijakan Pengembangan Marina	Ringkasan Kebijakan Pengembangan Marina
10.	Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu	Ringkasan Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu
11.	Kebijakan Terkait Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dan Dampak Perubahan Iklim	Ringkasan Kebijakan Terkait Strategi Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim
12.	Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut	a. Ringkasan Kebijakan tentang Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut b. Pedoman Kriteria Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (<i>Green Port Guidelines</i>)

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sampai dengan akhir tahun 2019 untuk IKU 3 dan IKU 5 adalah sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan total Jumlah Rancangan (Sub IKU) yang ditargetkan selama tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2019 telah menghasilkan sebanyak 12 dari 12 jumlah rancangan kebijakan dan pengendalian.

Pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan didukung oleh adanya input pendanaan yakni pagu anggaran efektif sebesar Rp. 19.600.036.000,- dengan realisasi Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 persen.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada kinerja 2019 ini jumlah keluaran rancangan kebijakan sejumlah 12 rancangan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2019 ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sejumlah 12 rancangan kebijakan dan 4 pengendalian kebijakan.
2. Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan capaian kinerja pada tahun ini, maka hasil diperoleh yang sangat baik yakni capaian kinerja rata-rata sebesar 102,39 % pada *customer perspective* sedangkan pada *internal business process perspective* sebesar 100%. Pada *Learning and Growth Perspective* rata – rata mencapai 102,55%. Walaupun rata – rata nilai mencapai diatas 100% tetapi terdapat dua IKU yang bernilai dibawah 100% yaitu (2) *Ocean Health Index* dan (7) Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan.
3. Sepanjang periode tahun 2019 ini seluruh rancangan kebijakan yang outputnya dihasilkan selesai sesuai dengan target yang diperjanjikan.
4. Pada *Internal Business Process Perspective*, terdapat 12 (tiga) dokumen kebijakan yang menjadi target sepanjang tahun 2019. Pada Tabel 3.3 disajikan target dan realisasi Sub IKU untuk SS 1 *Cascading* ke SS 2 untuk periode Triwulan IV tahun 2019.

Tabel 3.3
Target dan Capaian Sub IKU untuk SS 1 Cascading ke SS 2
Triwulan IV Tahun 2019

No	Uraian	Periode				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati		⊗			Sesuai target
2	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati		⊗			Sesuai target
3	Kebijakan Tata Kelola Garam		⊗			Sesuai target
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			⊗		Sesuai target
5	Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi			⊗		Sesuai target
6	Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi			⊗		Sesuai target
7	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata			⊗		Sesuai target
8	Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional			⊗		Sesuai target

9	Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut			⊗		Sesuai target
10	Kebijakan Pengembangan Marina				⊗	Sesuai target
11	Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu				⊗	Sesuai target
12	Kebijakan Terkait Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dan Dampak Perubahan Iklim				⊗	Sesuai target

Keterangan :

○ Realisasi Kinerja

x Target Kinerja

⊗ Realisasi dan Target Kinerja Sesuai

Proses pelaksanaan, permasalahan dan penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian empat Sub IKU sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 dapat dianalisis sebagai berikut:

(1) Sub IKU 4.1 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati

Dalam penyelenggaraan perikanan masih banyak terdapat konflik yang dialami nelayan seperti konflik di wilayah perbatasan antara nelayan Indonesia dengan nelayan asing. Konflik ini ditengarai oleh pembagian wilayah tangkapan dimana banyak sekali kapal penangkapan ikan asing yang melakukan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebabkan belum optimalnya rencana tata ruang dan rencana zonasi dalam sektor perikanan untuk perikanan tangkap. Selain itu, terdapat permasalahan akibat banyak peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan, sehingga menambah masalah dan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya alam di laut. Keterbatasan armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil menjadi suatu permasalahan yang dialami oleh nelayan, karena hal ini menyebabkan jangkauan wilayah penangkapan ikan menjadi terbatas sehingga jumlah tangkapan yang didapat menjadi sedikit. Permasalahan lain yang sering dihadapi nelayan yaitu dalam proses perizinan baik perizinan usaha penangkapan ikan maupun perizinan kapal perikanan, tidak heran jika angka kemiskinan terbesar berada pada kawasan pesisir dengan persentase sebesar 24% dari angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu

perlunya penetapan Hari Nelayan Nasional sebagai bentuk apresiasi dan dukungan program pemberdayaan.

Dalam rangka menyelesaikan isu utama tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan beberapa upaya strategis melalui serangkaian rapat koordinasi. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah

1. Pentingnya perhatian Pemerintah untuk penghargaan terhadap jasa nelayan dengan menetapkan hari nelayan nasional berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek yaitu:
 - a) Aspek Pertahanan dan Keamanan: peran nelayan sebagai sumber informasi aparat penegak hukum, komponen cadangan penegakan pertahanan di laut, tanpa kenal lelah menguasai dan menjaga lautan untuk pertahanan dan keamanan ibu pertiwi.
 - b) Aspek Hukum: nelayan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Selanjutnya, hari nelayan nasional perlu ditetapkan dengan keputusan presiden mengingat selama ini belum ada aspek legalitasnya.
 - c) Aspek Ketahanan Pangan: peran nelayan untuk menyediakan sumber pangan bergizi, sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan, namun disisi lain nelayan masih miskin, sehingga perlu perhatian dan perjuangan semua pihak.
 - d) Aspek Ekonomi: peran nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan, menciptakan peluang usaha industri perikanan yang akan meningkatkan devisa dan perekonomian nasional.
 - e) Aspek Sosial: meningkatkan harkat dan martabat nelayan. Pranata nelayan pada saat ini masih menempatkan nelayan pada strata sosial yang masih termarginalkan, sedangkan peran nelayan lebih utama dalam penyediaan pangan nasional. Sehingga perlunya penghargaan untuk meningkatkan harkat dan martabat nelayan
 - f) Aspek Budaya: sangat beragamnya tradisi peringatan diberbagai daerah dalam bentuk perayaan atau ceremony local yang mencerminkan kearifan lokal masing-masing daerah, untuk membangkitkan semangat dan rasa kesatuan antar nelayan.
 - g) Aspek Politik: nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang memiliki aspirasi dalam berdemokrasi.
 - h) Aspek Lingkungan: nelayan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistemnya.
 - i) Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih rendah dalam usaha perikanan, sehingga perlu menggugah stake-holders untuk dapat meningkatkan kemampuan IPTEK nelayan.

2. Mayoritas peserta Rapat Finalisasi Penetapan Hari Nelayan Nasional menyepakati tanggal 21 Mei diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden menjadi Hari Nelayan Nasional

(2) Sub IKU 4.2 : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pertanian dan krisis pangan yang ada saat ini di dunia maupun khususnya Indonesia diantaranya biaya yang tinggi, resiko produksi dan pemasaran, kerawanan pangan, migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, penurunan fungsi ekosistem, serta perubahan iklim yang memburuk. Karena itu diperlukan program yang dapat mengurangi permasalahan yang ada tersebut melalui pengembangan produk-produk sumberdaya hayati organik.

Pemerintah telah mencanangkan "Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD-45)", dan dalam rangka mendukung hal tersebut Pemerintah telah membuat peta jalan swasembada pangan 2016-2045. Peta jalan itu menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor bisa diturunkan. Serta untuk menyongsong visi tersebut Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018 mulai mengenalkan konsep Agro-Maritim 4.0, sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pertanian dan kelautan untuk mendukung Visi Indonesia 2045.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka mendukung Visi Indonesia 2045 tersebut pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan *benchmarking* dan implementasi project *Zero Budget Natural Farming* (ZBNF) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan *pilot project* program tersebut.

Zero Budget Natural Farming (ZBNF) adalah program yang mengedukasi para petani untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam pertanian. Mengadopsi pendekatan *agroecology*, ZBNF menghindarkan petani dari beban biaya tinggi akibat penggunaan bahan kimia, sekaligus meningkatkan kesehatan petani dan lingkungan melalui produk organik yang dihasilkan. Pemerintah Andhra Pradesh, India sendiri telah mengimplementasikan program ini sejak 2016 dengan melibatkan 40.000 petani. Jumlah ini berkembang menjadi 523.000 orang petani pada 2018. Program ZBNF, berhasil meningkatkan produksi padi di Andhra Pradesh hingga 15%, kacang tanah 26%, sedangkan kapas 10%.

Berdasarkan informasi penanganan pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, limbah pertanian ternyata juga penyumbang polusi yang dialirkan menuju ke laut dan danau, sehingga ZBNF menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai salahsatu upaya mengurangi polusi di perairan. Pengurangan penggunaan zat kimia dalam pertanian, akan menurunkan polusi cemaran kimia ke laut dan danau. Lokasi *pilot project* LBNF adalah di Kabupaten/Kota sekitar Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia yang terindikasi tercemar airnya akibat dari

kegiatan budidaya keramba jaring apung dan juga praktek pertanian konvensional di lereng sekitar Danau Toba.

Terkait isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Penguatan Kerjasama Implementasi *Project Low Budget Natural Farming* (LBNF) tanggal 17 Mei 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengarahkan kepada Menteri Pertanian, Bupati, dan perwakilan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sebagai berikut:

- (1) Menko Bidang Kemaritiman mengarahkan kepada para Bupati agar mensosialisasikan Project Low Budget Natural Farming kepada para petani di Danau Toba agar dapat merubah pola pikir petani.
- (2) Menko Bidang Kemaritiman menginginkan untuk segera mengimplementasikan pilot project LBNF. Selain itu, Menko Bidang Kemaritiman juga telah membicarakan tentang LBNF ini bersama Menteri Pertanian RI.
- (3) Menko Bidang Kemaritiman mengintruksikan untuk segera membuat rancangan Pilot Project Low Budget Natural Farming.
- (4) Menko Bidang Kemaritiman memerintahkan kepada Tenaga Ahli Menko Bidang Ekonomi Kemenko Bidang Kemaritiman untuk segera menganalisis LBNF dan menghitung kebutuhan anggaran yang dapat dialokasikan untuk LBNF.
- (5) Menko Bidang Kemaritiman setuju untuk dibuat contoh Pilot Project di Samosir atau di Humbang Hasundutan, dan untuk disusun model business sebagai acuan bagi daerah.

Selain itu, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Menteri Pertanian Nomor: B- 1815/MENKO/MARITIM/A3.01.00/IX/2019 perihal Implementasi Low Budget Natural Farming (LBNF), disampaikan hal-hal berikut:

- 1) Upaya percepatan implementasi LBNF dilaksanakan melalui pengiriman delegasi tenaga ahli LBNF dari India ke Indonesia, yang bertujuan untuk melatih tenaga penyuluh berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten di Sumatera Utara.
- 2) Kerangka kerjasama pengiriman delegasi LBNF berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India on Cooperation in The Field of Agriculture and Allied Sector tertanggal 1 Desember 2008. Executing agency dari MoU dimaksud adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik India.
- 3) Pembiayaan pengiriman tenaga ahli dari India ke Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal lima MoU serta penyelenggaraan Training of Trainer (ToT) bagi para penyuluh pertanian yang bertugas mensukseskan implementasi LBNF di sekitar Danau Toba, perlu didukung penganggaran dari Kementerian Pertanian selaku Kementerian teknis.
- 4) Percepatan pengiriman delegasi dilaksanakan pada awal Oktober 2019, sehingga terkait

(3) Sub IKU 4.3 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Indonesia mempunyai keanekaragaman ikan hias yang melimpah dengan potensi sedikitnya 400 spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies ikan air laut. Demikian juga dengan kekayaan karang hias (koral) dan tanaman hias air yang dimiliki Indonesia. Potensi ikan hias yang melimpah dan kondisi alam yang sangat mendukung ini, membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya komoditas ikan hias, terbuka lebar.

Keanekaragaman ikan hias Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir ikan hias dunia. Semangat Indonesia menjadi produsen ikan hias nomor satu di dunia merupakan sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Keindahan dan keanekaragaman ikan hias Indonesia merupakan modal awal mewujudkan mimpi tersebut. Namun disisi lain masih terdapat kendala-kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap pembangunan industri ikan hias dengan melibatkan kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah agar Indonesia dapat menjadi produsen sekaligus eksportir ikan hias nomor satu di dunia pada tahun 2021.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional 2020-2024 menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka mendongkrak potensi ikan hias Indonesia. Rencana Aksi Nasional ini berisi langkah-langkah strategis dalam pembangunan industri ikan hias Indonesia dan akan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan, baik K/L di tingkat pusat (KKP, KLHK, LIPI, Kemdag, Kemenhub, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendikbud, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah (terutama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sentra Produksi Ikan Hias), Pembudidaya dan Eksportir, serta Asosiasi. Untuk memperkuat dasar pelaksanaan, maka Rencana Aksi Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias akan diintegrasikan dan menjadi lampiran dari Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia 2020 – 2024.

(4) Sub IKU 4.4 : Kebijakan Tata Kelola Garam

Produksi komoditas garam secara nasional masih belum dapat dikatakan ideal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor permasalahan yang masih melingkupi pada sektor hulu maupun hilir dalam rangkaian proses produksi garam. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah dan mendukung proses produksi garam, permasalahan garam menjadi sebuah ironi yang kiranya perlu untuk segera diidentifikasi dan diselesaikan permasalahannya.

Garam merupakan salah satu komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas bagi kehidupan manusia. Kebutuhan mengenai garam selama ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni, garam industri dan konsumsi. Pada kebutuhan industri (NaCl di atas 97%), garam dapat dimanfaatkan pada industri kimia, aneka pangan dan minuman, farmasi dan kosmetik, pengeboran minyak hingga industri kertas. Luasnya manfaat

komoditas garam bagi dunia industri ini memberikan konsekuensi dalam dinamika bisnis dan ekonomi. Sehingga, apabila terjadi sedikit gangguan terhadap mata rantai distribusinya maka dapat mempengaruhi neraca perdagangan baik dalam skala lokal ataupun nasional.

Beberapa isi utama terkait produksi garam nasional diantaranya:

- a. Kurangnya jumlah produksi garam nasional. Secara kuantitas kebutuhan garam dalam negeri selalu meningkat. Diperkirakan kebutuhan garam nasional meningkat 10 persen tiap tahunnya
- b. Luas lahan produksi yang kurang. Luas tambak pergaraman nasional saat ini hanya sekitar 26.000 ha. Sedangkan, kebutuhan lahan garam secara nasional sekitar 46.000 ha. Sehingga, saat ini dibutuhkan ekstentifikasi lahan seluas 20.000 ha untuk mencukupi kebutuhan lahan garam nasional.
- c. Seringkali harga garam di tingkat petani tidak menentu dan mengakibatkan kerugian bagi petani garam.
- d. Kualitas garam konsumsi dan industri perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar

Dalam rangka menyelesaikan isu utama tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan beberapa upaya strategis yaitu rapat koordinasi terkait ekstensifikasi lahan, industri dan stok garam. Berdasarkan rangkaian rapat yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II dihasilkan rancangan kebijakan terkait tata kelola garam ini dan diimplementasikan melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor B-0433/MENKO/MARITIM/PR.00.00/III/2019 perihal pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional. Surat ini melampirkan pula arahan/dukungan penyelesaian/perintah penugasan kepada menteri dan gubernur terkait. Selain itu, bentuk pula tim kerja percepatan pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional untuk mendukung kebijakan tersebut. Usulan tim kerja ini melalui Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor ND. 95/Deputi II/Maritim/VI/2019 perihal penyampaian kembali konsep Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional.

(5) Sub IKU 4.5: Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi

Isu energi menjadi salah satu yang sangat menentukan dalam kerangka ekonomi makro saat ini. Konsumsi energi fosil untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 96% (dengan komposisi minyak bumi 48%, gas 18% dan batubara 30%) dari total konsumsi energi nasional. Ketergantungan terhadap minyak bumi menyebabkan Indonesia menghadapi berbagai persoalan untuk mencapai target pembangunan di bidang energi.

Indonesia menghadapi penurunan cadangan energi fosil dan belum dapat diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Selain itu, persoalan lainnya yang menghambat target

pembangunan bidang energi adalah tingginya konsumsi energi sebagai akibat dari konsumsi energi yang tinggi karena subsidi.

Beberapa isu mengenai kebijakan aksesibilitas energi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yaitu:

- BBM Satu Harga

Program BBM Satu Harga merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya harga BBM di wilayah Papua yang mencapai Rp 100.000 /liter. Tingginya harga BBM di Papua dan di wilayah timur Indonesia pada umumnya disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mencapai wilayah tersebut. Pengiriman BBM dilakukan menggunakan pesawat udara sehingga biaya transportasi melonjak. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kemenhub, Pertamina dan K/L terkait untuk mewujudkan BBM Satu Harga di Papua dan di daerah lainnya. Program BBM Satu Harga yang sudah terbangun dari 2017 hingga 2018 adalah 121 lokasi. Tahun 2019 direncanakan akan dibangun 34 lokasi, namun sampai saat ini yang sudah terbangun adalah 21 lokasi dikarenakan kendala perizinan dan tata ruang. Program BBM Satu Harga merupakan Program Prioritas Nasional dan telah diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN) sehingga pemerintah daerah wajib untuk melakukan program tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun kontrak penyelesaian pembangunan bagi seluruh lokasi BBM Satu Harga Tahun 2019 adalah Oktober 2019.

- Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Bumi

Program Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas merupakan program yang bertujuan untuk diversifikasi energi guna mendukung ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran dan petani sasaran seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran. Pada tahun 2016, konversi BBM ke LPG direalisasikan dengan pendistribusian konverter kit sebanyak 5.473 di 10 kabupaten kota. Sedangkan pada tahun 2017 konverter kit yang disalurkan adalah sejumlah 17.081 paket, yang diterima oleh para nelayan di 28 kabupaten/kota dan untuk tahun 2018, nelayan di 53 kabupaten/kota menerima 25.000 paket konverter kit. Pada tahun 2019, konverter kit yang akan dibagikan adalah sejumlah 13.305 paket di 36 kabupaten/kota.

- Jaringan Gas Bumi

Jaringan Gas Bumi merupakan kebijakan pemerintah untuk membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi. Jaringan Gas Bumi memiliki target efisiensi untuk negara dan juga masyarakat pengguna. Hingga akhir tahun 2018 jaringan gas bumi mencapai 451.618 sambungan rumah tangga jargas di 32 kabupaten/kota. Total rencana pembangunan Jaringan Gas Bumi Tahun 2019 adalah sejumlah 78.216 Sambungan Rumah

Tangga (18 lokasi yaitu Kab. Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Cirebon, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Banggai, Kab. Wajo dan Kab. Kutai Kartanegara)

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian isu – isu tersebut Deputi merekomendasikan beberapa langkah – langkah strategis sebagai berikut

1. Sebagai Program Prioritas Nasional (PPN), Program BBM Satu Harga diusulkan untuk terus dilanjutkan pada periode waktu 2020 hingga 2024 utamanya pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
2. Rencana konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk tahun 2019 dan 2020, selain bagi nelayan kecil, juga akan diberikan perhatian khusus kepada para petani kecil. Untuk tahun 2020, paket konverter kit LPG 3 kg direncanakan akan didistribusikan ke 23 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu juga Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Pada pelaksanaannya di lapangan perlu dikawal.
3. Adapun tindak lanjut yang diberikan untuk program jaringan gas bumi adalah dibutuhkan pembangunan jaringan gas lebih masif. Untuk mencapai hal ini, perlu melibatkan BUMN minyak dan gas bumi yang tidak termasuk ke dalam BUMN penugasan (BUMN non-penugasan) dan juga pemerintah daerah sehingga target pembangunan jargas seperti yang tercantum di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yaitu 4.7 juta Sambungan Rumah Tangga dapat tercapai.

Selain itu pula dalam rangka percepatan Program BBM Satu Harga Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa terus berupaya *Debottlenecking* Perizinan Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Program BBM Satu Harga melalui rapat koordinasi dan surat deputi Nomor B279 /Deputi II/Maritim/IX/2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Raker *Debottlenecking* Perizinan Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Program BBM Satu Harga kepada 122 Bupati pada tanggal 25 September 2019.

(6) Sub IKU 4.6: Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional menegaskan peningkatan peranan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23% atau setara (92.3 MTOE) dalam bauran energi pada tahun 2025. Sementara dalam naskah teknokratik RPJMN 2020-2025 peran EBT kian ditingkatkan termasuk pemanfaatan bioenergy, geothermal, biodiesel, greenfuel sawit, hingga nuklir.

Masalah lain terkait bauran EBT adalah revitalisasi pembangkit aneka EBT yang dapat dikatakan bermasalah dalam proses serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait EBT masih perlu dilakukan debottlenecking khususnya terkait kebijakan-kebijakan pada lingkungan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menarik kewenangan dinas ESDM kota/kabupaten ke propinsi, sementara lokasi-lokasi pembangkit EBT pada kabupaten/kota kadang terjadi ketidaksepahaman yang menyebabkan pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit EBT menjadi terkendala.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian isu – isu tersebut Deputi melaksanakan beberapa langkah sinkronisasi sebagai berikut

- a) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait usulan pembangunan, serah terima dan pendampingan. Daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal EBTKE pembangunan pembangkit aneka EBT dengan energi primer sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut. Usulan dilengkapi dengan laporan studi kelayakan (feasibility study). Kementerian ESDM juga melakukan pendampingan terkait Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PLN
- b) Sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait revitalisasi pembangkit aneka EBT. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dengan pemerintah daerah perihal kendala pada serah terima aset negara menjadi aset daerah tersebut
- c) Kebijakan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi. Daerah-daerah 3T yang masih belum terjangkau listrik menerima bantuan berupa PJU dan LTSHE. Bantuan pemerintah ini dikelola melalui Kementerian ESDM dan Kemenko Kemaritiman melakukan monitoring dan evaluasi
- d) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan pembangkit aneka EBT di daerah oleh Independent Power Producer (IPP). Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang bervariasi. Dilaporkan bahwa Sumatera Selatan telah mengembangkan pembangkit listrik biomassa sekam padi yang saat ini telah commissioning, menunggu peresmian. Demikian pula Mentawai yang telah mengembangkan pembangkit listrik biomassa bambu. Meskipun pembangkit listrik biomassa bambu ini telah diresmikan namun, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih berkoordinasi dengan K/L terkait mengenai kesinambungan energi primer bambu
- e) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Masa eksplorasi panas bumi adalah masa paling mahal dan beresiko. Namun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama World Bank dan Kementerian Keuangan mengembangkan skema INDONESIA GEOTHERMAL RESOURCE RISK MITIGATION PROJECT (GREM). Dilaporkan bahwa pada semester kedua 2019, setidaknya 8 pembangkit listrik panas bumi akan diresmikan.

- f) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait biodiesel B20 dan B30. Meskipun Uni Eropa tidak memasukkan biodiesel sebagai energi terbarukan (renewable), namun biodiesel masih dikategorikan energi baru di Indonesia. Setelah sukses dengan mandatori B20, road test untuk B30 sedang berlangsung sampai September 2019, diproyeksikan mandatori B30 sudah dapat dilakukan pada tahun 2020.
- g) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait aneka EBT Pengembangan aneka energi baru dan terbarukan yang telah dibahas dalam rapat koordinasi maupun kegiatan open talk Bincang Maritim meliputi pengembangan green fuel/ bahan bakar nabati berbasis sawit, aspal buton sebagai propelan roket, pengembangan PL TN tenaga thorium, pengolahan sampah plastik menjadi solar.
- h) Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait pengembangan listrik tenaga surya atap di fasilitas pesantren. Kebijakan ini diimplementasi oleh Kementerian ESDM dimana Kemenko Kemaritiman melakukan monitoring, evaluasi dan mendorong pemerintah daerah mengirimkan usulan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap ini untuk pesantren di daerah masing-masing kepada Kementerian ESDM.

(7) Sub IKU 4.7: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata

Pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta yang selanjutnya pada tahun 2019 diturunkan menjadi 18 juta. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan destinasi pariwisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Mengingat Bali sudah menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan, maka pemerintah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas yang disebut “10 Bali Baru”. Adapun 10 destinasi pariwisata prioritas dari Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Morotai, Wakatobi dan Mandalika. Empat diantaranya yaitu Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Dalam pembentukannya, Kawasan Ekonomi Khusus memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mendapat tugas untuk pengembangan destinasi pariwisata prioritas Mandalika yang sudah berbentuk KEK Pariwisata serta mengawal terbentuknya Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata di Labuan Bajo Flores, Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi, terutama untuk menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata tersebut. Untuk itu koordinasi dengan pemerintah daerah serta K/L terkait perlu dilakukan agar Perpres dapat segera diselesaikan dan selanjutnya Badan Otorita

Pariwisata segera terbentuk, sehingga akhirnya destinasi pariwisata tersebut siap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.

Terdapat dua draft perpres yang saat ini sedang ditangani yaitu draft perpres tentang BOP Wakatobi dan BOP Bromo-Tengger-Semeru. Sinkronisasi dan koordinasi terkait kebijakan percepatan penyelesaian Perpres Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru dan Perpres Badan Otorita Pariwisata Wakatobi. Draft Perpres Badan Otoritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan draft Perpres Wakatobi sudah diparaf oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN. Saat ini kedua draft Perpres tersebut sedang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Draft sudah di LHK sejak 11 Juli 2019 Untuk pengembangan Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation sedang menyiapkan pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika seluas 4.32 km.

Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Perpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores No. 32 tahun 2018 ditetapkan tanggal 5 April 2018 oleh Presiden Republik Indonesia dan berlaku mulai tanggal 7 April 2018. Saat ini, masih ada permasalahan lahan di kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores yang belum *clean and clear*. Guna mempermudah permasalahan lahan maka harus dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Guna mendorong proses tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur perihal lahan pengganti kawasan hutan untuk mempercepat proses penyelesaiannya.

(8) Sub IKU 4.8: Kebijakan Pengembangan Marina

Salah satu strategi dalam meningkatkan pariwisata bahari Indonesia adalah melalui menambah frekuensi kunjungan kapal wisata (*yacht* dan *cruise*) ke perairan Indonesia. Konsekuensi dari penambahan frekuensi kunjungan kapal ini adalah perlunya fasilitas penunjang dasar untuk sandar kapal seperti dermaga, *mooring buoy*, air bersih dan bahan bakar kapal.

Di Indonesia, terdapat sekitar 10 eksisting marina yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terdapat beberapa provinsi yang telah memiliki rencana untuk membangun marina di daerahnya seperti Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam pengembangan marina ini terdapat hambatan khususnya pada sisi investasi karena adanya berbagai benturan seperti masalah perizinan yang berlarut – larut. Oleh karenanya, perlu adanya terobosan dalam percepatan proses penerbitan izin.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan mengenai pengembangan marina. Berkenaan dengan hal tersebut berikut disampaikan rekomendasi kebijakan.

- a. Mendorong desa-desa pesisir untuk membangun tempat berlabuh kapal wisata (*yacht*) yang paling mendasar. Marina tidak selalu harus dengan fasilitas yang lengkap

dan mewah, atau melibatkan penanam modal dengan jumlah besar. Masyarakat desa dapat membuat suatu marina sederhana yang disebut dengan marina desa yang tidak memerlukan biaya besar dan dapat memanfaatkan dana desa untuk menyediakan mooring buoy dan menambahkan floating bridge untuk akses dari kapal ke daratan di desa.

- b. Memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah guna penyalarsan kebijakan, peraturan, dan menyamakan pandangan dan tujuan pengembangan daerah, sehingga akan meminimalisir kesalahpahaman persepsi.

(9) Sub IKU 4.9: Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional

Salah satu masalah penting yang perlu diatasi di Indonesia adalah bagaimana mengembangkan dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, untuk mendukung pengembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tiga pilar ini sering bertentangan untuk diserasikan dalam kenyataan di lapangan. Perencanaan Ruang Laut dikenal sebagai alat yang efektif untuk meminimalkan konflik antara pengguna sumber daya sehingga pengelolaan ruang laut menjadi lebih efektif. Perencanaan ruang mempunyai keterkaitan ekosistem darat dan laut sehingga perencanaan darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang.

Perencanaan Ruang Laut menjadi penting karena diperlukan untuk memberikan landasan spasial dalam rangka menyelenggarakan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan; keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; pertahanan kawasan perbatasan NKRI; arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; serta dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pusat, KSN, KSNT, lintas provinsi, dan perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai, serta kewenangan daerah di bawah 12 mil.

Salah satu isu yang diprioritaskan untuk diselesaikan adalah aturan turunan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait tata ruang laut. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mewujudkannya antara lain:

- a. secara eksisting fungsi ruang laut sudah terbagi habis di masing-masing sektor,
- b. tidak tersedianya data yang sesuai dengan kebutuhan dari segi kualitas maupun kuantitas,
- c. belum adanya persamaan persepsi antara stakeholder (ego sektor),
- d. proses konsultasi publik yang tidak menghasilkan output yang sesuai harapan karena gonta-ganti perwakilan K/L,
- e. proses legalisasi antar kementerian yang panjang karena belum adanya kesepakatan.
- f. untuk wilayah daratan terdapat perencanaan ruang sendiri yaitu RTRW dan RTR KSN. Berkaitan hal tersebut perencanaan ruang darat dan laut perlu selaras, serasi dan seimbang

Setelah perjalanan panjang pembahasan tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 06 Mei 2019 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang menjadi pedoman untuk penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang nasional bidang Kelautan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Kelautan, perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut, penetapan lokasi dan fungsi ruang laut untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan zonasi kawasan Laut; dan arahan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di Laut.

Selain itu, guna mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu disusun Peta Tematik Bidang Kemaritiman yang selaras dengan Peta Tematik Bidang Kemaritiman yang selaras dengan Peta Tematik untuk matra darat sebagai dasar perencanaan dan/atau pelaksanaan program. Jumlah kategori peta sebanyak 12 buah dengan 69 buah IGT data tematik bidang Kemaritiman. Diharapkan untuk RPJMN 2020-2024, IGT data tematik tersebut dapat diselesaikan ketersediaannya oleh wali data. Juga telah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas agar Peta Tematik Bidang Kemaritiman tersebut dapat diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024.

(10) Sub IKU 4.10: Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu

Penyusunan RZWP3K merupakan salah satu pintu gerbang dalam mengelola dan mengembangkan ruang laut untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Dalam penyusunan dokumen RZWP3K, wajib memperhatikan alokasi ruang untuk masyarakat nelayan maupun masyarakat hukum adat, kepentingan nasional, ekosistem, alur laut, risiko bencana, dan kajian lingkungan hid up strategis (KLHS). Hingga tahun 2019, telah terdapat 24 Provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah terkait RZWP3K dan 10 Provinsi lainnya sedang dalam tahap penyelesaian. Sedangkan terkait dokumen pendukung KLHS, baru 22 Pemerintah Provinsi yang telah menyusun KLHS.

Percepatan penyelesaian Dokumen RZWP3K dan KLHS dilakukan melalui sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen RZWP3K disusun berdasarkan kajian lingkungan dalam perencanaan zonasi, akan tetapi saat ini KLHS belum berisi kajian kesesuaian lahan, daya dukung dan daya tampung sehingga dampak dari setiap pemanfaatan ruang belum bisa dikendalikan dan dicegah secara holistik/menyeluruh. Hal ini menyebabkan beberapa provinsi telah perlu melakukan revisi karena dokumen Selain itu, permasalahan lainnya, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah daerah yang telah memiliki Perda RZWP3K hanya dapat menarik retribusi dari usaha pemanfaatan ruang laut, akan tetapi tidak dapat memungut retribusi penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan. Hal ini

berdampak pada dinas-dinas terkait yang tidak mendapatkan sumber-sumber tambahan APBD dari izin lokasi dan pengelolaan yang telah diterbitkan. RZWP3K tidak relevan untuk dipakai yang disebabkan oleh bencana alam, dan sebagainya.

(11) Sub IKU 4.11 : Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim

Berdasarkan hasil studi, terjadi abrasi di tiga pulau di wilayah Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang sangat besar. Diperkirakan garis pantai telah mundur hingga satu kilometer dengan panjang pantai terdampak lebih dari 100 kilometer. Laju rata – rata dari abrasi ini diperkirakan berkisar 5 – 6 meter pertahun.

Sampai sejauh ini ditengarai terdapat faktor alam dan faktor antropogenik yang menyebabkan terjadinya abrasi di daerah ini. Faktor alam disebabkan posisi Pulau Bengkalis yang langsung menghadap dengan laut terbuka sehingga arus laut menyebabkan abrasi. Faktor antropogenik karena adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, kerentanan tanah karena sebagian besar pulau merupakan lapisan tanah gambut, dan degradasi hutan mangrove akibat penebangan tanaman bakau.

Hilangnya garis pantai ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kedaulatan negara serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di pulau – pulau terluar tersebut. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan yang bersifat komprehensif dan solutif pada kasus ini. Berdasarkan data – data yang didapatkan dari Kementerian Lembaga terkait, Pemerintah daerah dan kunjungan lapangan, maka direkomendasikan beberapa hal :

1. Perlu studi secara holistik yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait
2. Penanganan masalah tersebut terdiri atas penanganan yang bersifat fisik (hard engineering) maupun edukasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar pesisir
3. Restorasi ekosistem mangrove yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula (kondisi ideal) dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait.

Kebijakan ini termasuk dalam kebijakan percepatan rehabilitasi pesisir dan laut, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan dampak perubahan iklim di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan adanya kolaborasi antar kementerian, lembaga maupun stakeholder lainnya untuk memenuhi faktor – faktor yang harus dicapai. Kebijakan tersebut dapat diupayakan dengan cara membagikan peran lintas K/L, pemerintah daerah, BUMN, Swasta, NGO, akademisi, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dengan didorong melakukan kolaborasi dalam restorasi mangrove. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan menjadi kebijakan yang dapat memicu collaborative governance antar lintas K/L dan pemerintah daerah.

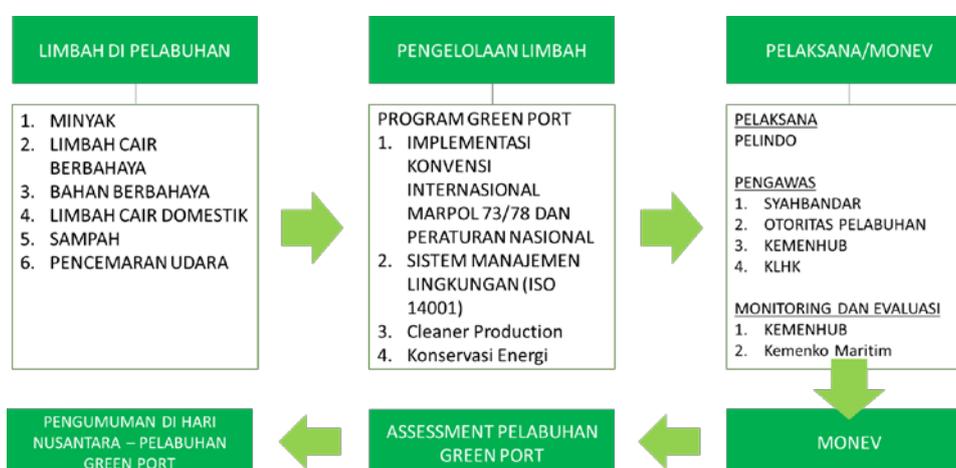
(12) Sub IKU 4.12: Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut

Dengan semakin tingginya perhatian dunia internasional terhadap perubahan iklim sebagai dampak aktivitas perkapalan yang tidak ramah lingkungan, maka *International*

Maritime Organization (IMO) yang berkantor pusat di London, melalui sidang MEPC 73-74 telah menetapkan bahan bakar rendah sulfur pada Januari 2020. Selain itu *Reception Facilities (RF)* sebagai penampung limbah minyak dari kapal belum berfungsi dengan baik, dimana RF yang tersedia di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kapal yang berlabuh di pelabuhan.

Dalam menyelesaikan isu tersebut, Dari kebijakan yang diterapkan selama 2019 di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka setelah dilakukan analisis melalui tingkat keberhasilan penyelesaian isu adalah Kebijakan penerapan *Green Port* di Pelabuhan Internasional di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Karena *Green Port* dapat menjawab semua permasalahan penanganan limbah di pelabuhan dengan disandingkan dengan kebijakan PWMS. Kebijakan PWMS merupakan bagian dari Program *Green Port* itu sendiri yang sudah dilaksanakan di Tahun 2019 ini. Mekanisme Program *Green Port* lebih detail dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini.

Gambar 3.1
Mekanisme Program *Green Port*



Rencananya kaidah *Green Port* akan dilaksanakan di pelabuhan internasional di Indonesia yang berjumlah 28 pelabuhan untuk dipromiskan hingga tingkat internasional. Program *Green Port* ini digunakan sebagai *tool* dalam Kemenko Bidang Kemaritiman rnelakukan monev atas kinerja K/L yang dikoordinasikan termasuk KLHK. Penilaian program *Green Port* terbagi kedalam aspek manajemen dan teknis yang meliputi bidang lingkungan, kepelabuhanan, energi dan keselamatan kerja. Kriteria yang dikembangkan secara keseluruhan lebih menitik berat kepada *beyond compliance* karena *Green Port* lebih menekankan kepada pelabuhan internasional yang sewajarnya dalam hal pemenuhan regulasi nasional telah dapat dipenuhi walau dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Target capaian program dari 15 kriteria program *green port* dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- a. 2019 : 30-50%
- b. 2020 : 50-70%

- c. 2021 : 80-90 %
- d. 2022: 90-100 %

Assessment Program Green Port sudah dijalankan di bulan Agustus-September 2019 menunjukkan evaluasi kinerja di tahun 2019 rata-rata telah melebihi target di Tahun 2019 yaitu melebihi 50%. Pelabuhan Peti Kemas Belawan 63,09%, Terminal Peti Kemas Tanjung Priok 63,62%, Terminal Jamrud Tanjung Perak 62,50%, Terminal Peti Kemas Semarang 61,26.%, Terminal Teluk Lamong 81,18%. Untuk Pelabuhan Makassar dijadwalkan di Oktober 2019. Dari hasil Hasil capaian ini akan disampaikan secara resmi di bulan Desember 2019. Dengan melaksanakan Green Port keuntungan yang didapat oleh pelabuhan adalah terjadinya penghematan biaya operasional sebagaimana hal berikut yang telah dihitung oleh Pelindo II.

IKU 1 Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, diperjanjikan Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Persentase Produksi Sumberdaya Alam Bidang Kemaritiman Sesuai Target adalah persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumberdaya alam kemaritiman sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMN dan/atau RKP, antara lain: produksi perikanan, produksi mineral dan batu bara, produksi minyak dan gas bumi, serta nilai devisa pariwisata.

Berdasarkan Laporan Produksi Sumber Daya Alam Dan Jasa Bidang Kemaritiman (terlampir), IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat produksi sumber daya alam bidang kemaritiman dan persentase kontribusinya dalam ekonomi maritim.

Formulasi untuk menghitung Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman adalah dengan membandingkan realisasi produksi sumber daya alam dan jasa dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN dan/atau RKP, selanjutnya dikalikan 100%. Adapun komponen yang dihitung adalah :

- a. Produksi Batu Bara
- b. Produksi Minyak Bumi (*Crude Oil*)
- c. Produksi Gas Bumi (*Natural Gas*).
- d. Produksi Ikan
- e. Nilai Devisa Pariwisata

Berdasarkan data yang dijabarkan pada Laporan Produksi Sumber Daya Alam Dan Jasa Bidang Kemaritiman (terlampir) dirangkum pada tabel 3.4, sehingga didapatkan bahwa Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman sebesar 94,84%

Tabel 3.4 Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman pada Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Sumber
1	Produksi	juta ton	406	558	100.00%	Kementerian

	batubara					ESDM
2	Produksi minyak bumi	ribu BM/hari	800	772	96.52%	Kementerian ESDM
3	Produksi gas bumi	ribu SBM/hari	1200	1261	100.00%	Kementerian ESDM
4	Produksi ikan	juta ton	17.4	14.13	81.21%	Bappenas, KKP
5	Nilai Devisa Pariwisata	Milliar USD	20	19.3	96.50%	Kementerian Pariwisata dan Ekraf
Persentase Produksi SDA dan Jasa Bidang Kemaritiman					94.84%	

Sumber : Deputi SDA dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, 2019, Laporan Produksi Sumber Daya Alam Dan Jasa Bidang Maritim

Pencapaian Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa ini tidak terlepas dari peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman khususnya Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain itu bila diamati selama 5 tahun terkahir sektor Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa mengalami *trend* peningkatan pada sektor perikanan dan pariwisata, tetapi pada sektor batubara, minyak dan gas cenderung stabil seperti terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Sumber
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Produksi batubara	juta ton	421	461	434	462	558	ESDM
2	Produksi minyak bumi	ribu BM/hari	818	786	829	804	772	ESDM
3	Produksi gas bumi	ribu SBM/hari	1224	1450	1184	1140	1261	ESDM
4	Produksi ikan (tidak termasuk rumput laut)	juta ton	10,76	10,87	11,9	13,60	14,13	Bappenas, KKP
5	Nilai Devisa Pariwisata	Rp triliun	144,5	163,7	177,2	202,1		Bappenas, Kemenpar
		Milliar USD					19,3	

Sejak tahun 2015, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melaksanakan berbagai kebijakan/program yang secara berkelanjutan mendorong Produksi SDA dan Jasa Bidang Maritim baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tahun 2015

Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber daya Alam dan Jasa

b) Tahun 2016

1. Menyiapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Program SD Hayati

2. Menyiapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan SD Hayati
3. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan keanekaragaman hayati
4. Menyiapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Program Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional
5. Menyiapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sumber Daya Energi

c) Tahun 2017

1. Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
2. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya
3. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perijinan Kapal Penangkap Ikan
4. Koordinasi dan pengendalian Implementasi Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan IUU Fishing
5. Koordinasi dan Pengendalian Turunan UU 32/2014 Tentang Kelautan
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia (CTI-CFF)
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Roadmap Konservasi dan Pengelolaan Taman Nasional Laut
9. Koordinasi dukungan kebijakan Komnas CTI
10. Koordinasi dan pengendalian kebijakan benefisasi dan hilirisasi pertambangan mineral
11. Koordinasi dan pengendalian kebijakan tata kelola minerba
12. Koordinasi dan pengendalian kebijakan penyediaan energi primer
13. Koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan cadangan energi

d) Tahun 2018

1. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Perikanan tangkap Berkelanjutan
2. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber daya Perikanan Budidaya Berkelanjutan terdiri dari : Perikanan budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau
3. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati
4. Koordinasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia
5. Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba
6. Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Primer
7. Pengendalian Kebijakan Pengembangan Cadangan Energi

e) Tahun 2019

1. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati
2. Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati
3. Koordinasi Pengembangan Kebijakan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
4. Koordinasi Kebijakan pengelolaan kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
5. Koordinasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia
6. Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba
7. Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Primer
8. Pengendalian Kebijakan Pengembangan Cadangan Energi

9. Koordinasi Kebijakan Kemudahan Kunjungan Wisata ke Indonesia
10. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata
11. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Marina

Berdasarkan data kebijakan yang ditangani di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, bahwa sebagian besar kebijakan yang ditangani mendukung IKU Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman ini sejak tahun 2015. Hal ini juga berarti sebagian besar sumber daya manusia dan anggaran lebih banyak ditujukan pada pencapaian outcome dari IKU ini.

IKU 2 *Ocean Health Index (OHI)* / Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup Indonesia

Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup Indonesia yang selama ini dianggap sebagai representasi dari kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata belum mengakomodir sektor kelautan. Tiga indikator utama penyusun IKLH adalah Indikator Kualitas Air (IKA), Indikator Kualitas Udara (IKU), dan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada IKA, masukan data hanya berisi data dari perairan sungai.

Belum adanya indeks yang secara tepat mengukur tingkat kesehatan laut di Indonesia. Beberapa indeks yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan adalah Indeks Biodiversitas Indonesia yang dikembangkan oleh Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) dengan World Wild Life Fund (WWF) dan penilaian perikanan berbasis ekosistem/Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM) yang dikembangkan oleh KKP. Tetapi dari kesemuanya belum ada yang secara khusus mengkaji tentang kesehatan perairan laut.

Sementara itu, OHI dapat mengidentifikasi 10 manfaat atau tujuan dari kesehatan laut serta menilainya dengan menggunakan informasi dan indikator terbaik yang sesuai dengan skala penilaian. Hasilnya mencerminkan seberapa baik seluruh potensi manfaat dan fungsi laut dioptimalkan secara berkelanjutan dibandingkan dengan titik acuan atau target pengelolaan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan setempat. Sepuluh komponen dari OHI adalah sebagai berikut:

1. Penyimpanan Karbon (*Carbon Storage / CS*)
2. Biodiversitas (*Biodiversity / BD*)
3. Perairan yang Bersih (*Clean Waters / CW*)
4. Perlindungan Pesisir (*Coastal Protection / CP*)
5. Keunikan Wilayah (*Sense of Places / SP*)
6. Penyediaan Pangan dari Laut (*Food Provision / FP*)
7. Kesempatan bagi Perikanan Tradisional (*Artifisinal Opportunity / AO*)
8. Mata Pencaharian dan Ekonomi Pesisir (*Livelihood and Economics / LE*)
9. Produk-produk Alam (*Natural Products / NP*)
10. Pariwisata dan Rekreasi (*Tourist and Recreation / TR*)

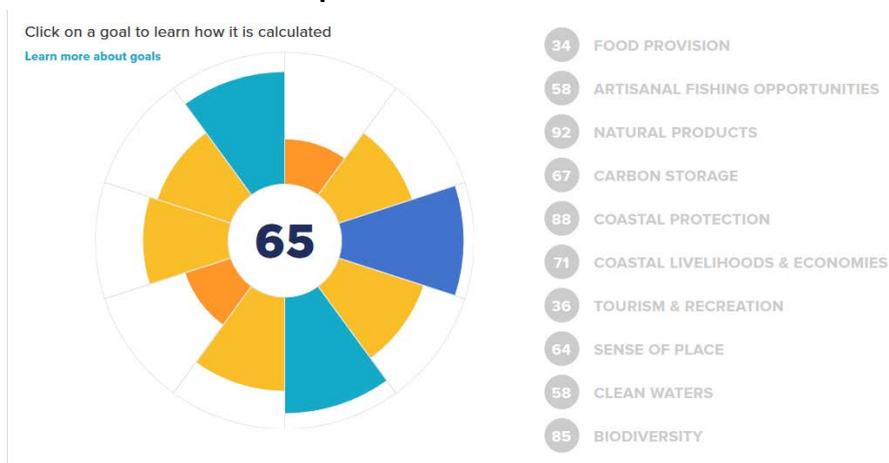
Setiap tujuan mengukur pemanfaatan spesifik sehubungan dengan target yang berkelanjutan. Suatu sasaran diberi skor 100 jika manfaat berkelanjutan maksimum diperoleh dengan cara yang tidak membahayakan kemampuan laut untuk memberikan

manfaat tersebut di masa depan. Skor yang lebih rendah menunjukkan bahwa lebih banyak manfaat dapat diperoleh atau bahwa metode saat ini membahayakan pengiriman manfaat di masa depan.

Penilaian nilai OHI dilakukan melalui pemodelan data pada deret waktu minimum 5 tahun yang telah terjadi, di mana kondisi masa depan saat ini akan dinilai. Keadaan masa depan adalah kombinasi dari status saat ini, tren, tekanan, dan ketahanan, masing-masing dengan kontrol mereka sendiri untuk membebani tujuan yang diberikan. Penilaian OHI, dilakukan secara mutakhir dengan metode yang dapat direplikasi dan tersedia pada laman <http://ohi-science.org>.

Pada tahun 2019 Indonesia tercatat mendapatkan nilai OHI sebesar 65, sekaligus menempati urutan 137 dari 221 negara di dunia, dengan rincian skor yang biasanya digambarkan dengan diagram windrose yang menunjukkan kesepuluh komponen tujuan OHI.

Gambar 3.1
Capaian Nilai OHI Indonesia



Sumber : *Ocean Health Index Organization, 2019*

Sepanjang tahun 2012 hingga 2019 nilai OHI Indonesia terus mengalami peningkatan seperti pada tabel 3.6. Namun peningkatan ini belum memenuhi target tahun 2019 dimana nilai yang ditargetkan sebesar 67.

Tabel 3.6 Score OHI Indonesia Tahun 2012 – 2019

tahun	score
2012	62
2013	63
2014	64
2015	65
2016	66
2017	65
2018	65
2019	65

Dalam menunjang kebijakan Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH), OHI dapat ditransformasikan menjadi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Kerangka kerja OHI menyediakan jalur penilaian independen yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pelaku, dengan nama Ocean Health Index Plus (OHI+). Berbeda dengan komponen OHI yang sudah tetap, tidak bisa diganggu gugat, dan diuji secara independen oleh tim antar negara, OHI+ menyediakan keleluasaan untuk dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan khusus setiap daerah yang hendak melakukan penilaian. Masing-masing goals dapat diterjemahkan dan dikustomisasi sesuai kebutuhan lokasi penilaian.

IKU 5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berkomitmen untuk wujudkan hal tersebut dengan terus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan implementasinya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Ruang lingkup dari evaluasi ini meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Evaluasi tahun 2019 pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dilaksanakan oleh tim dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Metodologi yang digunakan adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019 dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan perolehan nilai sebesar 71,04 atau kategori BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 3 (tiga) komponen yang ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	45	18,32
2	Pengukuran Kinerja	35	19,60
3	Pelaporan Kinerja	20	11,75
4	Evaluasi Internal	10	4,91
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	16,46
Jumlah		100	71,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

C. Kinerja Lainnya

Kinerja lainnya adalah dukungan administrasi kegiatan dalam bentuk layanan kesekretariatan Tingkat capaian kinerja pelayanan kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 ditampilkan dalam tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Pelayanan Kesekretariatan
Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019**

Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik (triwulan I)	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%	100%	100%
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik (triwulan II)	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%	90%	90%
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik (triwulan III)	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%	100%	100%
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik (triwulan IV)	Persentase Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100%	91,67%	91,67%
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA				95,42%

Tersusunnya dokumen program dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan, dan pelaporan dan layanan dukungan administrasi kesekretariatan dan fasilitasi pimpinan pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain itu jika mengikuti siklus

perencanaan, tersusunnya dokumen-dokumen tersebut adalah bukti bahwa siklus perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan telah dilaksanakan. Terbitnya laporan juga menunjukkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. Realisasi Anggaran

Per 31 Desember 2019 terealisasi anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 19.600.036.000,-. Telah terjadi peningkatan serapan dari triwulan I yang disebabkan telah terlaksananya beberapa rangkaian kegiatan yang menjadi output kinerja. Realisasi tahun anggaran 2019 juga mengalami peningkatan serapan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk unit kerja eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Asisten Deputy Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional sebesar Rp. 3.967.401.967 atau sebesar 99,65 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.981.301.000. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh Asisten Deputy Jasa Kemaritiman sebesar Rp 3.760.001.478 atau sebesar 95,81 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.924.447.000. Sementara untuk rata-rata pencapaian realisasi anggaran telah menyentuh angka 97,80 persen. Pagu dan realisasi anggaran unit eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa per 31 Desember 2019 disajikan lengkap pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II
Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Per 31 Desember 2019

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
Asisten Deputy Sumber Daya Hayati	3.981.694.000	3.888.727.098	92.966.902	97,67%
Asisten Deputy Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional	3.981.301.000	3.967.401.967	13.899.033	99,65%
Asisten Deputy Jasa Kemaritiman	3.924.447.000	3.760.001.478	164.445.522	95,81%
Asisten Deputy Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	3.981.301.000	3.924.924.691	56.376.309	98,58%
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	3.731.293.000	3.629.718.296	101.574.704	97,28%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada 11 (sebelas) IKU yang telah ditetapkan, dihasilkan 12 rancangan kebijakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,-. Bila dilihat secara rata – rata, untuk menghasilkan satu rekomendasi kebijakan atau pengendalian implementasi kebijakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1.597.564.461,- pada tahun 2019. Hal ini berarti terjadi penambahan penggunaan anggaran dibandingkan tahun 2017 dimana rata – rata untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1.362.826.754,-

E. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk 8 (delapan) IKU yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2018 adalah sebesar 101,85 persen. Pencapaian ini didukung oleh adanya input pendanaan atau anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 persen. Pencapaian ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2018, tetapi dari sisi realisasi anggaran jauh lebih baik daripada tahun 2018. Adapun pada pencapaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun 2019 ini berupa 3 peraturan presiden, 1 peraturan pemerintah, 2 rancangan peraturan presiden, 10 rancangan kebijakan dengan input pendanaan anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,- dengan rincian terlihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Produk Keluaran Kebijakan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019

No	Segmen	Produk Kebijakan
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional • Rancangan Kebijakan terkait Tata Cara Pemberian Subsidi Perikanan • Rancangan Kebijakan terkait <i>Low Budget Natural Farming</i> (LBNF) • Rancangan Kebijakan terkait Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang • Rancangan Kebijakan terkait Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Sararan Rehabilitasi Mangrove Pada Rancangan RPJMN 2020 - 2024
2	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil • Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang besaran dan penggunaan iuran BU dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas melalui Pipa • Rancangan Kebijakan terkait Pengembangan Aspal Buton • Rancangan Kebijakan terkait Pelarangan Ekspor Bijih Nikel
3	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Kebijakan terkait implementasi <i>Green Port</i> • Revitalisasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

No	Segmen	Produk Kebijakan
4	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Marina • Rperpres tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Wakatobi • Rperpres tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru

Pada tabel 3.11 ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Mulai Tahun 2015 Hingga 2019

No	Capaian Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Capaian IKU (%)	100	127	88,01	103,24	101,85
2	Pagu anggaran efektif (Rp)	5.303.940.000	14.428.255.000	21.264.715.641	21.805.228.065	19.170.773.530
3	Realisasi penyerapan anggaran (%)	62	77,15	82,58	83,39	97,8

Sumber : Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2017 dan 2018, Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Bidang Kemaritiman, 2017 Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Bidang Kemaritiman dan E-Monev Kemenkeu, 2016 dan Lakip Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2015

Pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran menjadi diatas 95% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 85% saja. Pada sisi efisiensi pencapaian IKU terjadi dapat dikatakan makin efisien dikarenakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2018 mendapatkan capaian IKU sebesar 103,24% dengan anggaran Rp 21.805.228.065,- sedangkan pada tahun 2019 ini capaian IKU mencapai 101,85 dengan anggaran Rp 19.170.773.530,-. Walaupun terjadi sedikit penurunan pencapaian, tetapi dengan inputan anggaran yang lebih rendah mampu menghasilkan capaian yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun terakhir ini kegiatan banyak difokuskan pada penyelesaian pencapaian 5 tahunan sehingga volume

pekerjaan cenderung stabil. Dibandingkan tahun 2018 pada tahun 2019 ini jumlah IKU lebih disederhanakan sehingga jumlahnya menjadi delapan IKU. Jika dianalisa dari sisi perencanaan, terjadi peningkatan sistem perencanaan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 ini dikarenakan ketepatan dari sisi penganggaran dan capaian yang sesuai dengan apa yang direncanakan pada rencana kerja 2019. Selain itu, tata kelola yang baik serta ada tambahan SDM baru dari rekrutmen CPNS tahun 2018. Bila dilihat lebih lanjut pada dasarnya pencapaian kinerja 2019 pada Sasaran Strategis *Customer Perspektif* dan *Internal Process Perspektif* yang merupakan tugas pokok Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah tercapai 100%. Di satu sisi, Sasaran Strategis *Learning and Growth Perspektif* mencapai target kinerja tahun 2019 ini mencapai lebih dari 102,55%. Hal ini yang menyebabkan pada nilai rata – rata pencapaian kinerja 2019 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi dari sisi perencanaan dan tata kelola. Bila ditelaah lebih lanjut faktor pendukungnya adalah: Pertama, penetapan perjanjian kinerja tahun 2019 lebih baik dikarenakan penetapan indikator menggunakan 3 perspektif yaitu pendekatan *Balanced Scorecard* yaitu *Customer Perspektif*, *Internal Process Perspektif* dan *Learning and Growth Perspective* yang lebih tajam dan komprehensif sehingga mendorong kinerja lebih terukur dan berkualitas. Kedua, secara kuantitas dan bobot program dan kegiatan pada tahun 2019 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini terlihat dari produk kebijakan seperti jumlah perpres yang dihasilkan pada tahun ini. Ketiga, telah terisinya keseluruhan jabatan struktural dan sebagian besar fungsional pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2019 serta adanya penambahan SDM dari rekrutmen CPNS tahun 2018. Pengisian staf fungsional telah hampir memenuhi jumlah optimal, walaupun perlu adanya peningkatan kapasitas fungsional dimana sebagian besar fungsional khususnya dari CPNS 2018 belum menjalankan diklat fungsional. Namun setidaknya pengisian calon fungsional ini telah mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih lancar. Keempat, adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No 12 Th 2018 tentang Standard Keluaran Kebijakan Kemaritiman telah membantu untuk mengarahkan keluaran kebijakan yang efektif, efisien serta berdasarkan data, sehingga control terhadap program yang berjalan menjadi lebih baik. Kelima, semakin baiknya intensitas koordinasi dan sinkronisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dengan pemangku kepentingan yakni Kementerian/ Lembaga, sektor swasta, universitas dan LSM. Selain itu, mekanisme koordinasi dan komunikasi internal Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa juga relatif lebih baik. Terakhir, pemenuhan fasilitas penunjang yang semakin membaik di lantai 8 gedung BPPT-1 menambah kemudahan, produktivitas dan kinerja di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain itu, personil yang bergabung di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa juga semakin handal dan berkualitas dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang membuat proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk tahun 2019, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2019 adalah sebesar 101,85 persen. Bila dilihat lebih lanjut pada dasarnya pencapaian kinerja 2019 pada Sasaran Strategis Customer Perspektif dan Internal Process Perspektif yang merupakan tugas pokok Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah tercapai 102,39% dan 100% Pada Learning and Growth Perspektif rata – rata mencapai 102,55%. Walaupun rata – rata nilai mencapai diatas 100% tetapi terdapat dua IKU yang bernilai dibawah 100% yaitu (2) Ocean Health Index dan (7) Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan.
2. Capaian target kinerja 12 rancangan kebijakan telah dilaksanakan secara optimal dengan menghasilkan 3 peraturan presiden, 1 peraturan pemerintah, 2 rancangan peraturan presiden, 10 rancangan kebijakan dengan input pendanaan anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,-.
3. Sepanjang periode tahun 2019 ini seluruh rancangan kebijakan yang outputnya dihasilkan selesai sesuai dengan target yang diperjanjikan.
4. Pencapaian Sasaran Strategis telah pula didukung oleh kinerja yang baik pada program tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019 dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan perolehan nilai sebesar 71,04 atau kategori BB.
5. Pencapaian ini didukung oleh adanya input pendanaan atau realisasi anggaran sebesar Rp 21.805.228.065,- dengan realisasi sebesar 83,39 persen. Realisasi anggaran tahun 2018 ini sedikit lebih tinggi bahkan hampir sama dengan tahun 2017, namun dengan pencapaian capaian IKU yang lebih baik.
6. Per 31 Desember 2018 telah terealisasi anggaran sebesar Rp 19.170.773.530,- atau sebesar 97,8 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 19.600.036.000,-. Penyerapan pada triwulan III dinilai paling tinggi dibandingkan triwulan lainnya.
7. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka terdapat peningkatan pencapaian kinerja secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Penetapan perjanjian kinerja tahun 2019 lebih padat dikarenakan penetapan indikator pada *Internal Process Perspektif* dibuat ringkas dan komprehensif sehingga mendorong kinerja lebih terukur dan berkualitas;

- b. Secara bobot program dan kegiatan pada tahun 2019 lebih ringkas dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan pada tahun terakhir RPJMN 2014 – 2019 difokuskan pada penyelesaian target – target yang belum tercapai;
- c. Mekanisme koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa semakin baik dan dinamis;
- d. Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No 12 Th 2018 tentang Standard Keluaran Kebijakan Kemaritiman telah membantu untuk mengarahkan keluaran kebijakan yang efektif, efisien serta berdasarkan data, sehingga control terhadap program yang berjalan menjadi lebih baik
- e. Peningkatan fasilitas dan personil dengan tambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS tahun 2018 khususnya fungsional.

Pada 2019 ini perkembangan capaian kinerja telah mengalami mampu dipertahankan dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai kinerja yang mencapai 101,85 persen. Selanjutnya untuk dapat meningkatkan performa kinerja pada tahun 2019, direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan secara penuh tingkatan dan kualitas output yang telah diperjanjikan pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 akan mulai diterapkan nomenklatur kementerian yang baru, sehingga tuntutan pengumpulan data, analisis dan sistematika perancangan kebijakan akan semakin komprehensif dan tajam.
2. Melakukan pemenuhan terhadap sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan
3. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sehingga kegiatan masing- masing Asisten Deputi dapat dilaksanakan secara serentak pada lokasi yang sama. Hal ini untuk menghindari jadwal yang bersamaan waktunya, menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, mensiasati kekurangan personil pelaksana kegiatan dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran;
4. Perbaiki terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan yang khususnya meliputi volume dan lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga meminimalisir potensi perlunya revisi anggaran;
5. Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. Kegiatan yang merupakan perintah dan arahan baru agar dapat dicarikan keterkaitannya dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA K/L sehingga dapat diukur dan menjadi bagian dari pencapaian IKU;
6. Perbaiki pada proses administrasi keuangan minimal pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu. Selain itu perlu didorong adanya SOP serupa dan panduan administrasi keuangan pada level Kuasa Pengguna Anggaran sehingga waktu dan persyaratan administrasi keuangan menjadi jelas dan terukur.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

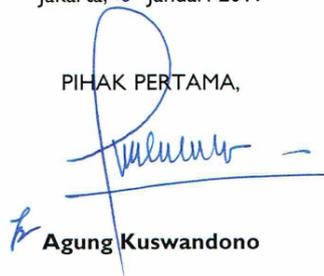
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Agung Kuswandono

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Customer Perspective				
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Maritim secara Berkelanjutan	1	Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman sesuai Target	85 %
		2	<i>Ocean Health Index</i>	68
		3	Persentase Rekomendasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang SDA dan Jasa yang menjadi Dasar Penerbitan Kebijakan Menteri Koordinator	100 %
Internal Business Process Perspective				
SS.2	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	4	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan	12
SS.3	Terselesaikannya Tugas Tambahan Lainnya di Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Diberikan Pimpinan	5	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
Learning And Growth Perspective				
SS.4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik	6	Nilai Evaluasi Internal (AKIP)	≥65
		7	Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan	100 %
SS.5	Terkelolanya Anggaran Secara Optimal	8	Persentase Realisasi Anggaran	≥85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Koordinasi Sumber Daya Hayati	Rp 4.145.841.000,-
2.	Koordinasi Sumberdaya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional	Rp 4.145.431.000,-
3.	Koordinasi Jasa Kemaritiman	Rp 4.086.234.000,-
4.	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	Rp 4.145.431.000,-
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	Rp 3.904.636.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp 20.427.573.000,-

Jakarta, 13 Januari 2019

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman RI



Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa



Agung Kuswandono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

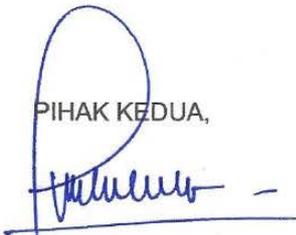
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Tito Setiawan
Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Agung Kuswandono

Jakarta, 29 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Tito Setiawan

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2019
Customer Perspective				
SS.1	Terwujudnya Tata kelola Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	≥ 65
		1.2	Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputy	100%
		1.3	Persentase Realisasi Anggaran Deputy	90%
Internal Business Process				
SS.2	Terlaksananya Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	1.4	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rencana Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	10 Dokumen
		1.5	Jumlah Dokumen Usulan Revisi Program dan Anggaran Tingkat Kementerian Keuangan	≤ 2
		1.6	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Laporan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	21 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	Rp. 3.904.636.000,-

Jakarta, 29 Januari 2019

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa



Agung Kuswandono

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa



Tito Setiawan

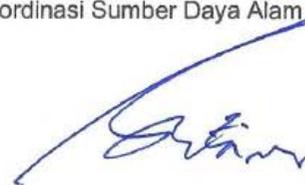
LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2019
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
Customer Perspective							
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa					≥ 65
2	Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi	Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi		100%	100%	100%	100%
3	Presentase Realisasi Anggaran Deputi	Realisasi Anggaran Deputi					90%
Internal Business Process							
4	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	1. Dokumen Perencanaan Program	Rp. 1.952.410.000,-	2			1
		2. Dokumen Perencanaan Anggaran					1
		3. Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja		2	1	1	1
		4. Dukungan Kebijakan Strategis Deputi					1
5	Jumlah Dokumen Usulan Revisi Program dan	Revisi Program dan Anggaran					≤ 2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
	Anggaran Tingkat Kementerian Keuangan						
6	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Laporan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	1. Dokumen Laporan Bulanan & Tahunan	Rp. 1.952.226.000,-	4	3	3	3
		2. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Ketatausahaan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kepegawaian, Laporan Persuratan)		1	1	1	1
		3. Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1	1	1	1

Jakarta, 29 Januari 2019

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa



Tito Setiawan



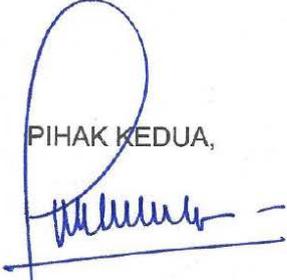
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA HAYATI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andri Wahyono
Jabatan : Asisten Deputi Sumberdaya Hayati
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Agung Kuswandono

Jakarta, 29 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Andri Wahyono

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA HAYATI**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2019
<i>Customer Perspective</i>				
SS.1	Tersedianya bahan Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Bidang Sumber Daya Hayati	1.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Hayati yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	100%
		1.2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
<i>Internal Business Process</i>				
SS.2	Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati	1.3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	6
SS.3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati	1.4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	2
SS.4	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Keanekaragaman Sumber Daya Hayati	1.5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Keanekaragaman Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	2

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Sumber Daya Hayati	Rp. 4.145.841.000,-

Deputi Bidang
Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa


Agung Kuswandono

Jakarta, 29 Januari 2019

Asisten Deputi
Sumberdaya Hayati


Andri Wahyono

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA HAYATI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
				I	II	III	IV
<i>Customer Perspective</i>							
1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Hayati yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	1. Rumusan Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati			100%		
		2. Rumusan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hayati				100%	
		3. Rumusan Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan				100%	
		4. Rumusan Kebijakan Promosi dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			100%		
		5. Rumusan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati			100%		
		6. Rumusan Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia				100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya						
Internal Business Process							
3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati	Rp. 1.382.421.000,-		3		
		2. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hayati				3	
4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	1. Rumusan Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.381.320.000,-			1	
		2. Rumusan Kebijakan Promosi dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			1		
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Bidang Keanekaragaman Sumber Daya Hayati yang Dihasilkan	1. Rumusan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.382.100.000,-		1		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		2. Rumusan Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia				1	

Jakarta, 29 Januari 2019
Asisten Deputi Sumberdaya Hayati



Andri Wahyono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIONAL

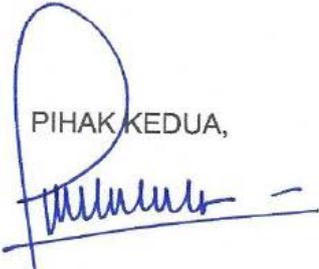
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Amalyos
Jabatan : Asisten Deputi Sumberdaya Mineral, Energi dan Nonkonvensional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Agung Kuswandono

Jakarta, 29 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Amalyos

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIONAL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2019
Customer Perspective				
SS.1	Tersedianya bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional	1.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	100%
		1.2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
Internal Business Process				
SS.2	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Mineral	1.3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Mineral yang Dihasilkan	2
SS.3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Energi	1.4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Energi yang Dihasilkan	2
SS.4	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Non Konvensional	1.5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Non Konvensional yang Dihasilkan	3

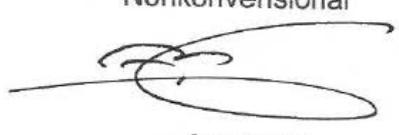
KEGIATAN	ANGGARAN
Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional	Rp. 4.145.431.000,-

Jakarta, 29 Januari 2019

Deputi Bidang
Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa


Agung Kuswandono

Asisten Deputi
Sumberdaya Mineral, Energi dan
Nonkonvensional


Amalyos

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI SUMBERDAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIONAL

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
Customer Perspective							
1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	1. Rumusan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba					100%
		2. Rumusan Kebijakan Tata Kelola Garam			100%		
		3. Rumusan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi					100%
		4. Rumusan Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi				100%	
		5. Rumusan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi					100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
				I	II	III	IV
		7. Rumusan Pengendalian Kebijakan Pemenuhan Energi bagi Pembangunan Kemaritiman				100%	
2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya						
Internal Business Process							
3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Mineral yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba	Rp.1.571.864.000,-			1	
		2. Bahan Rumusan Kebijakan Tata Kelola Garam		1			
4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Energi yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Rp.1.492.277.000,-			1	
		2. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi			1		
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Sumberdaya Non Konvensional yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Rp.1.081.290.000,-		1		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		2. Bahan Rumusan Kebijakan Efisiensi dan Konservasi Energi Untuk Bangunan Pemerintah			1		
		3. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Pemenuhan Energi bagi Pembangunan Kemaritiman			1		

Jakarta, 29 Januari 2019

Asisten Deputi

Sumberdaya Mineral, Energi dan Nonkonvensional



Amalyos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Okto Irianto
Jabatan : Asisten Deputi Jasa Kemaritiman
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Agung Kuswandono

PIHAK PERTAMA,

Okto Irianto

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2019
Customer Perspective				
SS.1	Tersedianya bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman	1.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	100%
		1.2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
Internal Business Process				
SS.2	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Jasa Kepelabuhanan	1.3	Jumlah Rumusan Kebijakan Kebijakan Bidang Jasa Kepelabuhanan yang Dihasilkan	4
SS.3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Jasa Pariwisata Bahari	1.4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Jasa Pariwisata Bahari yang Dihasilkan	3
SS.4	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Pemanfaatan Ruang Laut	1.5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Pemanfaatan Ruang Laut yang Dihasilkan	2

KEGIATAN	ANGGARAN
Koordinasi Jasa Kemaritiman	Rp. 4.086.234.000,-

Jakarta, 29 Januari 2019

Deputi Bidang
Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa


Agung Kuswandono

Asisten Deputi
Jasa Kemaritiman


Októ Irianto

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
				I	II	III	IV
Customer Perspective							
1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	1. Rumusan Pengendalian Kebijakan Penurunan Angka <i>Dwelling Time</i>				100%	
		2. Rumusan Kebijakan Penerapan <i>Indonesia Nasional Single Window (INSW)</i>			100%		
		3. Rumusan Kebijakan Pengembangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)				100%	
		4. Rumusan Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan			100%		
		5. Rumusan Kebijakan Kemudahan Kunjungan Wisatawan ke Indonesia				100%	
		6. Rumusan Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata			100%		
		7. Rumusan Kebijakan Pengembangan				100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		Marina					
		8. Rumusan Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional				100%	
		9. Rumusan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Terkait Pemanfaatan Ruang Laut				100%	
2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya						
Internal Business Process							
3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Jasa Kepelabuhanan yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Pengendalian Kebijakan Penurunan Angka <i>Dwelling Time</i>					1
		2. Bahan Rumusan Kebijakan Penerapan <i>Indonesia Nasional Single Window (INSW)</i>	Rp 1.237.485.000,-			1	
		3. Bahan Rumusan Kebijakan Pengembangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)					1
		4. Bahan Rumusan Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan				1	
4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Jasa Pariwisata Bahari yang	1. Bahan Rumusan Kebijakan Kemudahan Kunjungan Wisatawan		Rp 1.577.929.000,-			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
	Dihasilkan	ke Indonesia					
		2. Bahan Rumusan Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata				1	
		3. Bahan Rumusan Kebijakan Pengembangan Marina					1
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Pemanfaatan Ruang Laut yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional	Rp. 1.270.820.000,-			1	
		2. Bahan Rumusan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Terkait Pemanfaatan Ruang Laut				1	

Jakarta, 29 Januari 2019
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman


-Okto Irianto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agung Kuswandono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Agung Kuswandono

PIHAK PERTAMA,

Sahat Manaor Panggabean

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2019
Customer Perspective				
SS.1	Tersedianya bahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim yang Efektif	1.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	100%
		1.2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%
Internal Business Process				
SS.2	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut	1.3	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut yang Dihasilkan	3
SS.3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim	1.4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim yang Dihasilkan	3
SS.4	Tersedianya Rumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Lingkungan Laut	1.5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Lingkungan Laut yang Dihasilkan	3

KEGIATAN	ANGGARAN
Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	Rp. 4.145.431.000,-

Deputi Bidang
Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa



Agung Kuswandono

Jakarta, 29 Januari 2019

Asisten Deputi
Lingkungan dan Kebencanaan Maritim



Sahat Manaor Panggabean

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2019
ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
Customer Perspective							
1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim yang Menjadi Dasar Rancangan Kebijakan Deputi	1. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Laut					100%
		2. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan BMKT dan Pengembangan Museum/Wisata Shipwerck					100%
		3. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu					100%
		4. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim				100%	
		5. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim					100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		6. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Upaya Pengendalian Kebijakan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia					100%
		7. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Mensejahterakan Rakyat					100%
		8. Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Tim Nasional dan Membangun Tim Daerah				100%	
		9. Rumusan Kebijakan terkait Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut				100%	
2	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya						
3	Jumlah Rumusan Kebijakan Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut	1. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Laut	Rp. 1.221.635.000,-				1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
	yang Dihasilkan	2. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan BMKT dan Pengembangan Museum/Wisata Shipwerck					1
		3. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu					1
4	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim				1	
		2. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim	Rp. 1.312.707.000,-				1
		3. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Upaya Pengendalian Kebijakan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia					1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
				I	II	III	IV
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Perlindungan Lingkungan Laut yang Dihasilkan	1. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Mensejahterakan Rakyat 2. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Tim Nasional dan Membangun Tim Daerah 3. Bahan Rumusan Kebijakan terkait Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut	Rp. 1.611.089.000,-			1	1

Jakarta, 29 Januari 2019

Asisten Deputi

Lingkungan dan Kebencanaan Maritim


Sahat Manaor Panggabean

LAMPIRAN II
REALISASI KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2019

NO	Kegiatan	Capaian	Tanggal	Tanggal Akhir	Tempat	Kendala	Tindak Lanjut
81	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hayati	PERJALANAN DINAS PERESMIAN INDUSTRI CANGKANG KAPSUL BERBASIS RUMPUT LAUT UNIVERSITAS AIRLANGGA 1. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan pengembangan produk kelautannya terutama dari bahan dasar rumput laut. Pengembangan produk kelautan dan perikanan berbahan dasar rumput laut yang merupakan amanah Perpres 3/2017 tentang Renaksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 2. Bahan baku rumput laut Indonesia sangat melimpah, tetapi Indonesia hanya mengekspor rumput laut dalam bentuk raw material saja. Untuk itu diperlukan pengembangan pengolahan industri rumput laut, salah satunya adalah cangkang kapsul yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga. 3. Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki rintisan teaching industry berupa hilirisasi hasil penelitian produk kelautan dan perikanan yakni rumput laut. 4. Teaching industry rumput laut Universitas Airlangga dibawah pengawasan Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi (LPBI) ini mulai dibangun pada tahun 2018 dengan bantuan mesin yang dihibahkan oleh Kementerian Perindustrian.	01-Aug-18	01-Aug-18	Universitas Airlangga, Surabaya	-	Biro Hukum Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP akan melaporkan hasil dari kegiatan focus group discussion dan kajiannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai jawaban/laporan atas Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019, tanggal 26 November 2019, tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
		RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PERTEMUAN DI WORLD TRADE ORGANIZATIONS (WTO) a. IUU Fishing : Indonesia telah dipandang berhasil menekan angka pencurian ikan dengan penenggelaman ratusan kapal asing pencuri ikan sehingga secara otomatis telah meningkatkan stok ikan di perairan Indonesia. b. Overfishing : Keadaan dimana kegiatan penangkapan ikan sudah melampaui Maximum Sustainable Yield (MSY) sehingga ukuran-ukuran indikator biologi dari ikan yang tertangkap lebih kecil daripada saat MSY. c. Overfished Stock : Suatu keadaan yang sangat terkait dengan indikator jumlah total hasil tangkapan yang melebihi referensi MSY. d. Overcapacity : Keadaan	04-Feb-19	04-Feb-19	Ruang Kerja Asdep SDH		

	dimana jumlah ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi maupun yang tidak teregistrasi jumlahnya melampaui kapasitas ijin pada tingkat MSY.					
	RAPAT LANJUTAN PERSIAPAN SIDANG FISHERIES SUBSIDIES BULAN FEBRUARI DI WTO, GENEWA-SWISS Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan bahan perundingan bilateral yang akan disampaikan pada pertemuan World Trade Organization (WTO) serta pembahasan agenda kegiatan pada pertemuan tanggal 25 Februari – 1 Maret 2019 di Swiss.	20-Feb-19	20-Feb-19	Hotel Saripan Pasifik, Jakarta		
	MENGHADIRI KEGIATAN TEMU AKBAR NELAYAN NASIONAL (TANN) II TAHUN 2019 – Penyajian materi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. – Diskusi interaktif antara peserta dan penyaji materi yang dimoderatori oleh Ketua Panitia TANN II. – Pemaparan hasil diskusi dan masukan selama berlangsungnya forum Silaturahmi Nasional Masyarakat Nelayan Indonesia sebagai masukan bagi pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.	20-Feb-19	20-Feb-19	SORONG		
	FISHERIES SUBSIDIES 3. Pertemuan Fisheries Subsidies (FS), baik pertemuan open-ended session maupun pertemuan bilateral, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari – 1 Maret 2019 dan diketuai oleh Roberto Zapata. Pertemuan terbagi ke dalam 4 open-ended session. Masing-masing open-ended session membahas 1 dari 4 (empat) fundamental isu yaitu subsidies to IUU Fishing, subsidies relating to overfished stocks, subsidies that may contribute to overfishing and overcapacity dan Cross-cutting Issues yang didalamnya termasuk Special and Differential Treatment.	24-Feb-19	24-Feb-19	KANTOR WTO, JENEWA, SWISS		
	Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Regional II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	11-Mar-19	11-Mar-19	Hotel Gran Senyur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.		
	RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PERUNDINGAN FISHERIES SUBSIDIES Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan bahan perundingan bilateral yang akan disampaikan pada pertemuan World Trade Organization (WTO) pada bulan Maret 2019 serta menanggapi	20-Mar-19	20-Mar-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman		

	<p>pertemuan bilateral yang telah dilakukan dengan Maroko</p> <p>RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN SEWA LAHAN DAN KUNJUNGAN LAPANGAN DI PELABUHAN SAMUDERA BELAWAN 1. Mengidentifikasi permasalahan sewa lahan di Belawan; 2. Mengkoordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk penyelesaian sewa lahan; 3. Merumuskan penyelesaian sewa lahan</p> <p>KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI FINALISASI HARI NELAYAN NASIONAL Rapat Koordinasi Finalisasi Hari Nelayan Nasional dihadiri oleh unsur Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi IPB dan Universitas Padjajaran, Sekolah Tinggi Perikanan, Universitas Muslim Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Indonesia (MPN), Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PTNI), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapihani).</p> <p>RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PERUNDINGAN FISHERIES SUBSIDIES Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perundangan fisheries subsidies terbaru dan perkembangan kemungkinan dilakukannya reposisi mengenai isu special and differential treatment.</p> <p>RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP TERPADU Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap terpadu, serta mendiskusikan implementasi mengenai Teknologi Auto Identification System untuk kapal nelayan, Aplikasi Lentera bertenaga air laut untuk nelayan dan masyarakat pesisir, Converter Kit generasi ke-2 pada mesin kapal dan generator sel diesel serta Ice Slurry Generator.</p> <p>PERJALANAN DINAS PERTEMUAN PERUNDINGAN OPEN-ENDED NEGOTIATING GROUP ON RULES ON FISHERIES SUBSIDIES Pertemuan Bilateral dan Konsolidasi dengan Fasilitator Pertemuan Bilateral dan Konsolidasi dengan Fasilitator Informal Open-Ended Meeting (IUU Fishing, Overfished Stock, Overfishing</p>					
		27-Mar-19	27-Mar-19	Belawan Medan		
		04-Apr-19	04-Apr-19	HOTEL ROYAL PAJAJARAN BOGOR		
		15-May-19	15-May-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
		21-May-19	21-May-19	Milenium Hotel, Jakarta.		
		08-Jun-19	08-Jun-19	Jenewa, Swiss		

	dan Overcapacity, dan Cross-Cutting Issues) Informal Open-Ended Meeting (IUU Fishing, Overfished Stock, Overfishing dan Overcapacity, dan Cross-Cutting Issues)				
	RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BPH MIGAS TENTANG ALOKASI KUOTA JBT JENIS SOLAR UNTUK KONSUMEN PENGGUNA	09-Jul-19	09-Jul-19	Hotel Santika BSD City Serpong, Tangerang Selatan, Banten	
	RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL PERIKANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH HNSI Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti surat HNSI mengenai permintaan kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan HNSI dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Perikanan.	24-Jul-19	24-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT TINDAKLANJUT PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL PERIKANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH HNSI bertujuan untuk Persiapan technical acara dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Perikanan.	25-Jul-19	25-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT PERJALANAN DINAS MENGHADIRI WORKSHOP PENGEMBANGAN AQUACULTURE RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DI WADUK DAN DANAU	25-Jul-19	25-Jul-19	Ruang Serbaguna Universitas Padjajaran, Bandung.	
	RAPAT FINALISASI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL PERIKANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH HNSI Kegiatan ini bertujuan untuk memfinalisasikan persiapan Seminar Nasional Perikanan yang akan dilakukan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	29-Jul-19	29-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	LAPORAN KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN HASIL PERUNDINGAN SUBSIDI PERIKANAN WTO BULAN JULI 2019 DAN PENYUSUNAN POSISI INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2019 Disiplin subsidi perikanan (tangkap) yang akan diadopsi oleh World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020, diharapkan tidak menjadi penghambat peningkatan ekspor dalam perdagangan produk perikanan Indonesia di pasar internasional melainkan dapat menjadi instrumen peningkatan daya saing ekspor dengan tetap memperhatikan kepentingan small scale fisheries sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 7/2016.	07-Aug-19	07-Aug-19	Hotel Grand Savero, Bogor	
	RAPAT PERSIAPAN PENYELENGGARAAN	08-Aug-	08-Aug-	RR. Louhan, Lt.8. Kantor	

	DISEMINASI NASKAH AKADEMIS HASIL SURVEY KAJIAN SUBSIDI PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI) Kegiatan ini bertujuan untuk membicarakan rencana kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan WWF mensosialisasikan hasil survey subsidi perikanan di WPP NRI dan penyusunan Naskah Akademis sebagai dasar penyusunan draft Peraturan Presiden	19	19	Kemenko Bid. Kemaritiman		
	KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL PERIKANAN Produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 23 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,89 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,11 juta ton. Namun dibandingkan dengan potensi perairan yang ada yakni luasan 75% dari luasan daratan, Panjang garis pantai 96.181 km, serta sumber daya alam yang beraneka ragam dari sumber daya hayati dan on hayati, maka produksi perikanan yang dihasilkan belum signifikan dengan potensi perikanan yang ada di wilayah perairan Indonesia.	23-Aug-19	23-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
	MENGHADIRI FOCUS GROUP DISCUSSION MARITIME AND FISHERIES COOPERATION INDONESIA-CHILE Hubungan bilateral Indonesia-Chile dimulai dengan dibukanya hubungan kekonsuleran pada tahun 1964. Hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada bulan September 1965. Indonesia dan Chile selalu menjaga hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Selain itu, kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mempromosikan HAM, demokrasi dan kerja sama ekonomi, juga secara bersama-sama aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional.	29-Aug-19	29-Aug-19	Hotel Aryaduta, Kuta Bali.		
	PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN 1. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya telah meningkat pesat selama 20 tahun terakhir, melampaui pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk makanan yang berbahan baku ikan. Indonesia disebutkan sebagai produsen ketiga terbesar di dunia untuk perikanan budidaya (FAO, 2018). Produksi perikanan budidaya di Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan 33% selama	09-Sep-19	09-Sep-19	DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta		

		<p>delapan tahun terakhir, dan ditargetkan untuk terus meningkat. Pada tahun 2019, target produksi perikanan budidaya adalah sebesar 29,90 juta ton, yang terdiri dari produksi ikan sebesar 10,36 juta ton dan produksi rumput laut sebesar 19,54 juta ton rumput laut. 2. Perikanan budidaya juga memiliki keterkaitan dengan 9 (sembilan) target (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), di antaranya adalah SDGs Goal 2 Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), dan SDGs Goal 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), khususnya target 74.7 yang berkaitan dengan peningkatan manfaat ekonomi dengan pemakaian sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, perikanan budidaya juga diharapkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, selain juga berperan dalam penyediaan pangan. 3. Komoditas utama perikanan budidaya di antaranya adalah rumput laut dan udang. Rumput laut saat ini merupakan komoditas perikanan budidaya dengan volume produksi tertinggi. Namun demikian, dari sisi nilai masih belum optimal. Ke depan, diharapkan rumput laut dapat memiliki nilai yang lebih tinggi melalui pengolahan yang tepat. Selain itu, udang merupakan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai sangat tinggi karena merupakan salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia. 4. Indonesia menduduki peringkat 2 setelah Cina dalam produksi udang global, yaitu sebesar 753.800 ton pada tahun 2017. Provinsi Jawa sebagai penghasil komoditas udang terbesar di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, selain menyiapkan kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan, juga perlu adanya sinergitas lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, asosiasi petambak, asosiasi penyedia sarana, investor, mitra dan kelompok pembudidaya. 5. Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai penghasil rumput laut di dunia setelah cina (FAO,2017). Peningkatan produksi rumput laut Indonesia pada tahun 2013-2017 sebesar 4,11%, dengan produksi 2017 mencapai 10.815.952 ton. Nilai ekspor rumput laut Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,09 % per tahun selama periode 2013-2017. Provinsi Sulawesi sebagai penghasil</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>komoditas Rumput Laut (<i>Cottonii</i> dan <i>Gracillaria</i>) terbesar di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan dan tantangan dalam perikanan budidaya rumput laut, DJPB sedang mengembangkan pengelolaan usaha budidaya rumput laut dalam bentuk klusterisasi dengan teknologi long line. Percontohan dalam program ini yaitu di di Desa Tanamanang, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>				
	<p>WORKSHOP KEBERHASILAN BUDIDAYA LAUT YANG BERKELANJUTAN DAN MENGUNTUNGKAN 1. Hingga September 2019, sebanyak 22 dari 34 provinsi telah memiliki peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Peraturan mengenai RZWP3K merupakan instrumen yang penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Tanpa regulasi yang jelas, maka konflik pemanfaatan sumber daya dimungkinkan bisa terus terjadi. 2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan mariculture. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam beberapa tahun terakhir sudah berupaya mengembangkan budidaya laut, namun belum maksimal dan mengalami berbagai masalah yang salah satunya disebabkan oleh proses pemilihan lokasi yang kurang baik. Beberapa spesies ikan laut telah berhasil dibudidayakan dalam skala kecil, maka dari itu perlunya pembesaran skala budidaya (scaling up) untuk meningkatkan produksi dan kebutuhan pasar. Hal ini dapat terjadi dengan budidaya di laut terbuka (open water) atau lepas pantai (offshore).</p>	20-Sep-19	20-Sep-19	The Akmani Hotel, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.	
	<p>RAPAT EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan serta data dari Rencana Aksi Pembangunan Perikanan yang telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang menjadi penanggung jawab untuk dapat dilaporkan kepada presiden.</p>	24-Sep-19	24-Sep-19	The Akmani Hotel, Jakarta.	
	<p>The 9th Internatioanl Conference of Aquaculture Indonesia 2019 ICAI 2019 bertujuan untuk mendiskusikan dan memperbarui informasi terkini terkait kemajuan teknologi dalam budidaya udang, ikan air tawar dan laut serta kekerangan. Konferensi ini juga sebagai tempat berbagi pengalaman antara ilmuwan,</p>	03-Oct-19	03-Oct-19	Surabaya	

		pemerintah dan industri tentang kebutuhan dalam industri akuakultur.				
		PERTEMUAN KE-2 IMPLEMENTASI HARVEST STRATEGY PERIKANAN TUNA DI WPPNRI 713, 714 DAN 715 Menginformasikan pentingnya peran pemerintah dan stakeholder terkait lainnya untuk terus konsisten mengimplementasikan konsep harvest strategy framework yang telah di launching pada saat pertemuan Bali Tuna Conference ke-3 pada tanggal 31 Mei 2018.	30-Oct-19	30-Oct-19	Aston Hotel & Resort Bogor	
		Rapat Sinkronisasi Data Kapal Perikanan yang Sudah Inkracht dan Masih Stranded. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hayati. dan Menyinkronkan data kapal perikanan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan masih stranded dari lintas kementerian/lembaga.	22-Nov-19	22-Nov-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
		FOCUS GROUP DISCUSION DAN KONSULTASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Sebagai narasumber pada . Focus Group Discusion dan Konsultasi Publik Peraturan Perundangan di Bidang Perikanan Budidaya, serta memonitoring data Kapal inkracht dan stranded di pelabuhan Benoa Prov. Bali	01-Dec-19	01-Dec-19	Bali	
		Rapat Finalisasi Sinkronisasi Data Kapal Perikanan yang Sudah Inkracht dan Masih Stranded Memfinalkan data kapal perikanan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan masih stranded dari lintas kementerian/lembaga.	06-Dec-19	06-Dec-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
		Focus Group Discussion Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan Budidaya. 1. Mengkaji penyederhanaan regulasi di bidang perikanan budidaya untuk memperoleh kepastian berinvestasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan sumber devisa negara; 2. Menyepakati poin-poin dalam peraturan perundangan yang akan disederhanakan.	11-Dec-19	11-Dec-19	Ruang Balla 3, Hotel Santika Makassar	
82	Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hayati	Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Kapal yang tertahan di Pelabuhan Dalam rangka penanganan kapal perikanan yang tertahan di pelabuhan, telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 14 Januari 2018 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	14-Jan-19	14-Jan-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	-
		LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI MEKANISME	29-Jan-	29-Jan-	Ruang Rapat Menko Maritim	1. Asisten Deputi bersedia melakukan kerja sama dengan USSEC sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Kerja sama awal akan dilakukan dengan tema: "Workshop keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan

<p>PEMBERIAN SUBSIDI PERIKANAN 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pemberian subsidi perikanan 2. Mengkoordinasikan Mekanisme Pemberian Subsidi Perikanan</p>	19	19	Lantai 2 Utara	<p>industri budidaya laut di beberapa negara™ yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Peserta workshop berasal dari kementerian/lembaga dan perguruan tinggi; 3. Kerja sama lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) bidang di Asisten Deputi Sumber Daya Hayati yaitu Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati, Bidang Pengembangan Produk, dan Bidang Keanekaragaman Hayati.</p>
<p>Menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Posisi Indonesia terkait Perundingan NG Rules on Fisheries Subsidies di WTO Agenda rapat tersebut terkait dalam rangka persiapan perundingan di pertemuan WTO terkait isu Fisheries Subsidies yang akan dilaksanakan pada 25 Februari – 1 Maret 2019 di Genewa, Swiss. Yang terdiri dari pembahasan IUU fishing, overfished stocks dan overcapacity and overfishing. Selain itu dalam rangka persiapan pertemuan bilateral dengan delegasi Maroko akan disiapkan bahan presentasi artisanal dan small-scale fisheries di Indonesia;</p>	12-Feb-19	12-Feb-19	Hotel Santika Premiere Bintaro	
<p>Rapat Koordinasi Tata Kelola Kebijakan Perikanan 1. Rapat membahas 6 (enam) agenda, yakni transshipment, SOP perizinan kapal perikanan, Vessel Monitoring System (VMS), pembatasan ukuran kapal 150 GT, kebijakan cantrang dan biaya sewa lahan. 2. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara RI, serta Asosiasi Perikanan. 3. Rapat tidak membahas secara detail tentang mengenai transshipment, SOP perizinan kapal perikanan, VMS, pembatasan ukuran kapal 150 GT, kebijakan cantrang, tidak dibahas secara detail karena tidak dihadiri oleh pejabat yang berkompeten dalam mengambil keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga akan dibahas fokus pada waktu tertentu. 4. Penetapan biaya sewa lahan dan sewa sarana prasarana dilakukan sepihak oleh Pelabuhan Indonesia Belawan (Pelindo 1) melalui kantor jasa penilai publik (KJPP) setempat, dimana penetapan tersebut tidak melibatkan para pelaku usaha yang berada di muara baru dan belawan, hal ini mengakibatkan terjadinya saling gugat antar pelaku usaha dan pelindo. Dimungkinkan hal yang sama terjadi ditempat lain. 5. Gugatan yang diajukan oleh pihak pelaku usaha kepada Pelindo melalui MA, telah dimenangkan oleh pelaku usaha dengan mewajibkan kepada tergugat (Pelindo) untuk menunda</p>	05-Mar-19	05-Mar-19	Lt 2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	

pemberlakuan Keputusan Direksi Perum Pelindo Nomor KEP-063/PELINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum Pelindo cabang Belawan (Objek Gugatan) terhadap para penggugat, sampai gugatan sengketa tata usaha negara ini mempunyai hukum tetap (inkracht) atau adanya putusan penetapan lainnya, namun telah diajukan gugat balik lagi oleh Perum Pelindo.			
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENETAPAN HARI NELAYAN NASIONAL	26-Mar-19	26-Mar-19	Hotel Salak, Bogor
Rekomendasi dan Hasil Rapat Sinkronisasi Pengaturan Administrasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai Dengan 30 GT a. Mengidentifikasi dokumen perizinan kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 30 GT b. Menyinkronkan serta mengharmonisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan dokumen perizinan kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 30 GT yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	10-Apr-19	10-Apr-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
RAPAT KOORDINASI PENYEDERHANAAN DOKUMEN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN SECARA ONLINE 1. Mensinkronkan peraturan perundangan terkait perizinan kapal perikanan. 2. Membentuk tim (kelompok kerja) tentang database nasional kapal perikanan secara online.	22-Apr-19	22-Apr-19	HOTEL SARI PACIFIC JAKARTA
RAPAT KOORDINASI TIM DATABASE NASIONAL KAPAL PERIKANAN Kegiatan ini bertujuan untuk mengonsepk an design dari database nasional kapal perikanan serta mendengar pendapat dan masukan dari Kementerian/Lembaga	02-May-19	02-May-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
RAPAT KOORDINASI TIM DATABASE NASIONAL KAPAL PERIKANAN Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan regulasi lintas Kementerian/ Lembaga dalam pembuatan sistem database nasional kapal perikanan, penyederhanaan dokumen dalam perizinan kapal perikanan.	08-May-19	08-May-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
RAPAT PENYUSUNAN KERTAS POSISI DELEGASI RI PADA PERUNDINGAN FISHERIES SUBSIDIES Kegiatan ini bertujuan untuk membahas posisi Delegasi RI pada perundingan Fisheries, serta menanggapi proposal-proposal yang di ajukan oleh negara anggota	22-May-19	22-May-19	Hotel Grand Savero, Bogor.

lain.			
RAPAT PEMBAHASAN HASIL PERUNDINGAN FISHERIES SUBSIDIES CLUSTER JUNI DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) memberikan perkembangan perundingan fisheries subsidies terbaru dan perkembangan draft text yang akan dibahas untuk memenuhi target disepakatinya disiplin ini.	20-Jun-19	20-Jun-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
Kunjungan lapangan dan peninjauan lokasi yang rencana akan dikembangkan sebagai pangkalan militer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi. a) Menjaga pertahanan dan keamanan NKRI; b) Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perbatasan di Kab. Natuna; c) Hasil rapat koordinasi tentang pengaturan sektor tata ruang dan perikanan di perairan Natuna pada tanggal 1 Februari 2019; d) Hasil rapat koordinasi lanjutan tentang pengaturan sektor tata ruang dan perikanan pada tanggal 26 Februari 2019; e) Surat Tugas nomor ST.305/Deputi II/Maritim/II/2019 tentang perintah tugas perjalanan dinas dalam rangka kunjungan lapangan dan peninjauan pembangunan perikanan di Selat Lampa Pulau Natuna Selatan, Kabupaten Natuna.	01-Jul-19	01-Jul-19	Kabupaten Natuna
Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Rangka menghadiri Perundingan Fisheries Subsidies cluster Juli di World Trade Organization (WTO) â€¢ Surat Direktur Jendral Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan nomor 02/PPI.2/SD/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permintaan Delegasi RI (DELRI) dalam Rangka menghadiri Rangkaian Pertemuan Fisheries Subsidies tahun 2019 di WTO, Jenewa, Swiss. â€¢ Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor ST 271/ Deputi II/maritim/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 â€¢ Surat Tugas Sekertaris Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Nomor 565/Maritim/Sesmenko/ST/2019 tanggal 14 Juni 2019	06-Jul-19	06-Jul-19	Genewa, Swiss
RAPAT PERSIAPAN SINKRONISASI PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN TERINTEGRASI DI KAB. NATUNA mengidentifikasi dan mensinkronisasi program kegiatan penataan ruang dan pembangunan industri perikanan yang terintegrasi di Kabupaten Natuna.	09-Jul-19	09-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
PERJALANAN DINAS MENGHADIRI FGD LAPORAN	10-Jul-	10-Jul-	Ruang Rapat Pusat Studi

ANTARA MASTERPLAN PARIWISATA YOGYAKARTA Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pembuatan masterplan pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas oleh tim Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada serta menerima masukan dari Kementerian/Lembaga terkait. Tim ini terdiri dari 9 peniliti dan melakukan analisa di beberapa aspek seperti Aspek Topografi, Destinasi wisata, industri wisata, transportasi, pemasaran serta SDM dan Kelembagaan.	19	19	Pariwisata, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Focus Group Discussion Kajian Alat Tangkap Cantrang Kajian Alat Tangkap Cantrang yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019 bersama para pakar perikanan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan FAO	23-Jul-19	23-Jul-19	Hotel Saripan Pasifik, Jakarta
RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 1. Memetakan prioritas komoditas unggulan perikanan budidaya yang dikembangkan di Indonesia tahun 2020 â€” 2024. 2. Merekomedasikan strategi pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan tahun 2020 â€” 2024.	15-Aug-19	15-Aug-19	RR. Lt.4. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
RAPAT FINALISASI RENCANA PELAKSANAAN WORKSHOP HASIL SURVEI MANFAAT DAN DAMPAK PEMBERIAN SUBSIDI PERIKANAN DI 11 WPP-NRI Tujuan dilaksanakannya rapat persiapan ini yaitu untuk menetapkan tema, waktu, dan tempat pelaksanaan, serta memfinalisasi peserta dan narasumber serta topik paparan narasumber pada Workshop Hasil Survei Manfaat dan Dampak Pemberian Subsidi Perikanan Di 11 WPP-NRI	27-Aug-19	27-Aug-19	RR. Louhan, Lt.2. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
WORKSHOP HASIL SURVEI MANFAAT DAN DAMPAK PEMBERIAN SUBSIDI PERIKANAN DI 11 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI) 1) Bahwa berdasarkan data, kapal perikanan yang berukuran kurang dari 10 GT jumlahnya mendominasi yakni sekitar 90% perairan Indonesia di 4 mil dan beberapa sampai di 12 mil, sedangkan kapal yang berukuran lebih dari 30GT jumlahnya 10% dari jumlah kapal perikanan yang ada di Indonesia. 2) Pada saat ini, sebagian besar SDI laut di 11 WPP-NRI sudah dimanfaatkan penuh atau bahkan berlebih sesuai dengan Tabel 1 (terlampir). 3) Pedoman pemberian subsidi perikanan sesuai dengan	05-Sep-19	05-Sep-19	Hotel Mercure Sabang

		<p>kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target subsidi perikanan sesuai dengan Tabel 2 (terlampir). 4) Berdasarkan hasil survei subsidi pada 11 WPP-NRI ternyata beberapa jenis subsidi berupa subsidi BBM adalah salah satu contoh dari subsidi perikanan yang mendorong peningkatan kapasitas penangkapan ikan. Dampak subsidi BBM berpengaruh nyata terhadap profitabilitas usaha penangkapan ikan, karena sekitar 60% dari total biaya operasional kapal penangkapan ikan (atau sekitar 45% dari biaya perusahaan perikanan) digunakan untuk pengadaan BBM. Keuntungan "semua" dari usaha penangkapan ikan yang disubsidi BBM telah memberikan peluang kepada pelaku usaha tersebut untuk terus meningkatkan kapasitas penangkapan ikan. Akibatnya, keuntungan "semua" tersebut berkontribusi terhadap terjadinya penangkapan ikan secara berlebih. Sedangkan subsidi perikanan yang tidak selalu mendorong pengembangan kapasitas penangkapan ikan berfungsi dalam pelestarian SDI. SDI pada suatu WPP-NRI dapat dipandang sebagai aset modal alami yang mampu menghasilkan aliran manfaat ekonomi kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p>				
		<p>AUDIENSI UNITED STATES SOYBEAN EXPORT COUNCIL (USSEC) 1. Paparan mengenai profile USSEC disampaikan langsung oleh Bapak Pamudi sebagai Aquaculture Technical Manager Indonesia. 2. USSEC merupakan nonprofit company yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas nutrisi manusia, produksi ternak, dan akuakultur. Misi ini dicapai dengan pola "knowledge transfer" kepada seluruh stakeholders secara integral mulai dari hulu hingga hilir, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan masing-masing negara.</p>	11-Sep-19	11-Sep-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
83	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	<p>RAPAT KOORDINASI ORGANISASI PEREMPUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMANFAATAN PROTEIN IKAN a. Sinergi program perbaikan gizi masyarakat oleh peserta rapat dalam rangka pencegahan stunting melalui protein ikan. b. Pemberian protein ikan pada organisasi wanita untuk diolah dan dilombakan pada rangkaian acara Simposium Nasional Pemanfaatan Protein Ikan. Hal ini bertujuan menunjukkan proses fortifikasi protein ikan</p>	10-Oct-18	10-Oct-18	Ruang Rapat Menko Maritim Lantai 21	-

	pada berbagai macam produk olahan keluarga.			
	koordinasi tentang TSIN melalui Sustainable Market Access Through Responsible Trading of Fish in Indonesia (SMART-Fish) bersama United Nation Industrial Development Organization (Unido)	01-Feb-19	01-Feb-19	Hotel Sari Pacific
	<p>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) SINERGITAS PENGEMBANGAN PRODUK BERBAHAN DASAR MANGROVE 1. Dalam sambutan dan arahan rapat yang disampaikan oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Bapak Andri Wahyono menyampaikan terkait hal-hal penting dalam rangka sinergitas pengembangan produk berbahan dasar mangrove. Mulai dari perkembangan Kebijakan Satu Peta terkait Tata Kelola Mangrove, program rehabilitasi mangrove, hingga prioritas pengadaan bibit pohon mangrove, yang jenisnya dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk turunan. 2. Narasumber akademisi dari IPB, Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih, M.Si menyampaikan peran perguruan tinggi terhadap pengembangan produk turunan mangrove dan database produk. Narasumber menyampaikan bagaimana yang bersangkutan mulai mengembangkan produk turunan Mangrove dari tahun 2013 s.d sekarang dengan melibatkan mahasiswa didiknya serta K/L terkait dalam melakukan penelitian. Diantara hasil penelitian yang sudah dipatenkan adalah produk dari Rhizopora mucronata untuk pelindung kulit, sirup, hepatoprotektor, antioksidan; Bactronophorus sp. untuk obat kuat; Cerithedia obtusa untuk pil antikanker; serta Telescopium telescopium untuk gel antijerawat, krim antiaging. 3. Narasumber Praktisi dari Yayasan Mangrove Indonesia, Dian Permana Putra menyampaikan tantangan dan solusi rehabilitasi terkait pengembangan produk mangrove. Narasumber menyampaikan mulai berbagai jenis pemanfaatan mangrove yang telah dikembangkan, berbagai lokasi pemanfaatan mangrove di Indonesia, peran perempuan dan generasi muda, tata kelola mangrove hingga rencana tindak lanjut pengembangan Mangrove 4. Narasumber K/L dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Trisna Ningsih, A.Pi, M.Si menyampaikan pengembangan produk mangrove. Narasumber menyampaikan mulai fungsi, kandungan, dan jenis mangrove, permasalahan produk olahan mangrove, peluang dan tantangan, kebijakan</p>	04-Mar-19	04-Mar-19	Salak Tower Hotel, Bogor

<p>pengembangan produk, berbagai jenis pemanfaatan mangrove yang telah dikembangkan, serta program pengembangan produk olahan Mangrove ? 5. Narasumber UKM Pengolahan Mangrove dari kelompok Tani Mangrove Wonorejo, Soni Mohson menyampaikan tantangan pengembangan produk mangrove dan usulan solusi. Narasumber menyampaikan perkembangan produk turunan Mangrove di Surabaya, yang berlokasi pada kawasan pantai timur (9 jenis mangrove) dan pantai utara (4 jenis mangrove)</p>					
<p>Zero Budget Natural Farming (ZBNF) di India Rapat koordinasi peninjauan program Zero Budget Natural Farming (ZBNF) di Distrik Vijayawada, Andhra Pradesh, India.</p>	05-Mar-19	05-Mar-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
<p>RAPAT PEMEBENTUKAN VIRTUAL NETWORKING DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN TROPICAL SEAWEED INNOVATION NETWORK (TSIN) a. Pembahasan virtual networking yang dipaparkan oleh tim IT Unido melalui web based sesuai timeline terlampir b. Struktur organisasi TSIN oleh Kemenristekdikti c. Rencana sosialisasi TSIN pada International Seaweed Symposium di Korea Selatan pada April 2019</p>	08-Mar-19	08-Mar-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
<p>BENCHMARKING PENERAPAN KONSEP ZERO BUDGET NATURAL FARMING (ZBNF) DI NEGARA BAGIAN ANDHRA PRADESH INDIA 1. Pemaparan dan diskusi tentang definisi, konsep dasar, penggerak dan pilar ZBNF 2. Kunjungan lapang ke Guntur dan Prakasham District untuk melihat komponen teknologi dan contoh penerapan ZBNF pada tanaman padi, sayuran (cabai, sayuran daun), talas, mangga, kacang tanah, NPM (natural pest management) shop, peternakan sebagai sumber pupuk dan eksibisi penggunaan PICO video untuk penyuluhan, 3. Diskusi dengan para pelaku/petani pelaksana program ZBNF tentang pengalaman, kesan, keuntungan dari penerapan ZBNF, pengelolaan kelompok wanita mandiri (women self help group) dalam mengelola dana kelompok,</p>	19-Mar-19	19-Mar-19	ANDHRA PRADESH INDIA		
<p>RAPAT AUDIENSI PENGEMBANGAN PRODUK PERIKANAN DENGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR Kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 di Ruang Rapat Lantai 8 Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh Deputi</p>	01-Apr-19	01-Apr-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		

	Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Direktur Inovasi & Kekayaan Intelektual LPPM IPB, Direktur Pusat Pengembangan Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan LPPM IPB, Kepala Bidang Pengembangan Produk SDH Kemenko Maritim, Kepala Sub Direktorat Perlindungan dan Hak Kekayaan Intelektual IPB.				
	RAPAT KOORDINASI FINALISASI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO TERKAIT PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN Draft perjanjian kerja sama dan legal drafting. Kerja sama yang dimaksud yakni adalah pengembangan UMKM lokal berbasis produk kelautan dan perikanan melalui solusi inovatif dari peserta bootcamp for young entrepreneur	05-Apr-19	05-Apr-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT KOORDINASI ZERO BUDGET NATURAL FARMING (ZBNF) <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya terus mendorong upaya tracking sumber daya genetik dalam bentuk barcoding untuk menelusuri sumber daya genetik yang digunakan oleh negara lain; • Pentingnya pendaftaran paten terhadap sumber daya di Indonesia misalnya pohon nimba sebagai pestisida alami; • Berkaitan dengan aspek pendanaan, situs percontohan/pilot project yang akan dibangun sebaiknya menggunakan sumber pendanaan dari APBN/APBD sebelum mengusulkan pendanaan dari luar; • Pencemaran perlu ditanggulangi secara terpadu dari hulu ke hilir; • Perlunya melengkapi tabel rencana aksi 2019-2023, yang meliputi rencana kegiatan, pendanaan, dan pihak-pihak yang terlibat. 	07-Apr-19	07-Apr-19	Hotel Grand Aston City Hall Medan	
	RAPAT KOORDINASI TEMU PAKAR DAN RESEARCH CENTER RUMPUT LAUT DALAM RANGKA PEMBENTUKAN TROPICAL SEAWEED INNOVATION NETWORK (TSIN) 1. Rumput laut memiliki potensi yang besar di Indonesia, tetapi ironisnya Indonesia masih mengimpor rumput laut (raw material) dari China. Hal ini disebabkan dikarenakan belum dapat bertemunya stakeholder, inovator, dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi integrasi rumput dari hulu ke hilir. Dalam skala kecil mungkin Indonesia dapat produksi rumput, tetapi dalam skala besar belum mampu karena belum optimalnya pemanfaatan penelitian. Produksi	22-Apr-19	22-Apr-19	Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor “ Jawa Barat	

rumpun laut sendiri dalam skala industri besar belum bisa memenuhi kebutuhan industri dikarenakan kurang bersinerginya stakeholder. Untuk itu perlunya kolaborasi antar stakeholder. Selain itu peningkatan teknologi dalam pengolahan produk rumput laut juga perlu dilakukan agar meningkatkan produksi rumput laut dengan cara apa benchmarking pelaku industri ke perguruan tinggi atau lembaga riset. Harapan ke depannya Indonesia mendapatkan informasi akses rumput laut dari beberapa negara seperti China, sehingga kita bukan mengekspor rumput laut mentah tetapi rumput laut hasil industri. Salah satu komponen dalam pertemuan TSIN adalah pemetaan produksi dan industri rumput laut di Indonesia. 2. Strategi untuk memperkuat inovasi dan daya saing dalam bidang kemaritiman khususnya kelautan dan perikanan yakni bagaimana memanfaatkan rumput laut yang bisa digunakan untuk pangan dan kosmetik. Dirjen Penguatan Inovasi kemenristekdikti menjadi jembatan antara akademisi dengan dunia usaha/industri. Hal ini juga diperlukan agar komunikasi yang antara akademisi dengan dunia usaha/industri dapat berjalan dengan baik. Kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Penguatan Inovasi adalah mendorong para pakar yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset dan pengembangan agar manajemen inovasi rumput laut dapat dilakukan dengan baik. Hal yang diharapkan oleh Dirjen Penguatan Inovasi ini adalah melahirkan industri rumput laut berbasis dari kajian atau penelitian dari peneliti. Indonesia memiliki banyak produk turunan rumput laut, seharusnya berada dalam satu database yang dinamis sehingga kedepannya akan terus bisa diperbaharui dan berkembang untuk mengambil sebuah kebijakan. 3. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap adanya value chain terkait penjematan hulu ke hilir terkait aquatic plant Indonesia karena produksi aquatic plant di Indonesia mengalami peningkatan tren sebanyak 7.81% pertahunnya. Arah pengembangan RL di Indonesia harus bernilai ekonomis salah satu Euchema cottoni. Impor rumput laut global pada tahun 2012-2018 yakni meningkat 2.90% menjadi sebanyak 711.581 ton atau sekitar 2.574,35 juta US Dollar, hal ini merupakan potensi yang sangat baik untuk pengembangan rumput laut. Indonesia memiliki

	<p>peluang untuk mengekspor produk rumput laut ke USA karena saat ini pengeksport RL terbesar USA adalah Filipina, dimana Filipina untuk saat ini mengalami penurunan produksi rumput laut sehingga Indonesia dapat memanfaatkan celah tersebut untuk meningkatkan nilai ekspor ke USA.</p>				
	<p>RAPAT KOORDINASI FESTIVAL KAWASAN EDU EKOLOGI KAMPONG TERIPANG MAS Pada tanggal 19 Februari 2019, berlokasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak H. Isdianto, pejabat Kementerian/ Lembaga terkait, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam arahnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setuju agar produk kelautan dan perikanan yang telah dikembangkan oleh PT Aruna Industri Bintan untuk dikembangkan secara nasional. Kemenko Maritim juga mendukung penuh terkait hilirisasi dari pemanfaatan produk kelautan dan perikanan seperti yang dikembangkan oleh PT Aruna Industri Bintan di Kepulauan Riau sebagai salah satu produk unggulan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut pula, Kemenko Kemaritiman mengundang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat hadir di rangkaian kegiatan ini melihat secara langsung pola pengembangan produk Hidrolisat Protein Ikan, teripang dan lainnya melalui pengembangan kawasan Edu Ekologi Kampong Teripang Mas yang terkini diarahkan menjadi alternatif wisata bahari.</p>	25-Apr-19	25-Apr-19	CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre “ Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	
	<p>Rapat Tata Kelola Pengembangan Produk Mutiara Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang besar tetapi hanya menjadi negara penghasil dan mengekspor produk mentah (raw material). Permasalahan mutiara sudah lama dijumpai yakni salah satunya masuknya freshwater pearl (mutiara air tawar) dari negara Tiongkok ke Indonesia yang menurunkan citra mutiara alam asli Indonesia, padahal sejatinya Indonesia memiliki South Sea Pearl Premium dengan kualitas terbaik. Untuk itu masalah-masalah</p>	14-May-19	14-May-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	

	seputar tata kelola pengembangan produk mutiara dibahas pada rapat ini.				
	RAPAT KOORDINASI STRUKTUR KELEMBAGAAN TROPICAL SEAWEED INNOVATION NETWORK (TSIN) a. Melihat perkembangan pembentukan struktur kelembagaan pada Kemenristekdikti, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti Nomor B/65/F2.4/PI.01.00/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Rekomendasi Pembentukan Tropical Seaweed Innovation Networking (TSIN). b. Mereposisi instansi pengelola TSIN dari Kemenristekdikti ke Kementerian lainnya (Kemenperin atau KKP).	20-May-19	20-May-19	Ruang Rapat Kemenko Bidang Kemaritiman Lantai 2 Selatan	
	Penyampaian Rekomendasi Penyusunan Buku Produk Turunan Berbahan Dasar Mangrove dan Rumput Laut Penyusunan buku bertujuan mensinergikan informasi tentang produk mangrove dan rumput laut dari Kementerian/Lembaga sehingga didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk e book.	27-May-19	27-May-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT KOORDINASI TEKNIS IMPLEMENTASI PROJECT LOW BUDGET NATURAL FARMING (LBNF) 1. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Holtikultura yang mewakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian, dan dihadiri Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, perwakilan kementerian/ lembaga, perwakilan pemerintah daerah/ Dinas pertanian provinsi/ kabupaten Sumatera Utara. 2. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pertanian, dan Bupati pada tanggal 17 Mei 2019 tentang Rapat Koordinasi Penguatan Kerja Sama Implementasi Low Budget Natural Farming (LBNF) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Hasil rapat koordinasi tersebut menyepakati diterapkannya konsep pertanian alami tersebut di seputaran Danau Toba untuk mengurangi cemaran Danau Toba dari bahan kimia yang digunakan di areal pertanian. 3. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada tanggal 21 Mei - 23 Mei 2019 telah dilakukan survei pendahuluan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi dan Karo oleh tim Badan Penelitian	21-Jun-19	21-Jun-19	Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Holtikultura, Kementerian Pertanian di Bogor, Jawa Barat	

	dan Pengembangan Pertanian (Dr. Catur Hermanto, Dr Khadjah El Ramija S.Pi, Mi, Fatiani Manik SP MP, Rasiska Tarigan, SP dan Romi) dan Kepala Dinas Pertanian beserta Tim di masing-masing kabupaten. Survei dilakukan untuk menentukan lokasi pilot plot implamentasi system pertanian alami, mengidentifikasi faktor pendukung, dan menentukan rencana tindak lanjut.			
	RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN FORUM KOORDINASI INNOVATOR PRODUK KELAUTAN DAN - PERIKANAN Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Institut Pertanian Bogor Nomor: 8626/IT3.D10/TU/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Inovasi IPB, dan hasil audiensi dan kunjungan kerja ke pabrik cangkang kapsul rumput laut di Kampus C, Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 26 Juni 2019 - Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Institut Pertanian Bogor, Dr.Ir. Syarifah Iis Aisyah, M.Sc.Agr dalam pemaparan menyampaikan produk-produk Inovasi IPB yang memerlukan dukungan hillirisasi produk inovasi tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berencana kegiatan tersebut serangkaian dengan pelaksanaan ForkIP KP Zona I di Institut Pertanian Bogor.	16-Jul-19	16-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
	PERSIAPAN SIMPOSIUM NASIONAL PEMANFAATAN HPI DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING Persiapan Simposium Nasional Pemanfaatan Hidrolisat Protein Ikan yang rencananya akan diadakan pada awal Agustus 2019 (jadwal tentatif).	18-Jul-19	18-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
	RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN BOOTCAMP FOR YOUNG TECHNOPRENEUR (BYTE) Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi persiapan pelaksanaan bootcamp for young technopreneur berkolaborasi dengan PT. Elex Media dan Sociopreneur Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 di Ruang Rapat Deputi Lt. 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menindaklanjuti rapat sebelumnya tersebut, maka telah disusun timeline kegiatan mulai teknis persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus s.d Oktober.2019 sebagaimana terlampir.	12-Aug-19	12-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
	Kerjasama dan Koordinasi Kegiatan Forum Koordinasi	15-Aug-	15-Aug-	Universitas Hasanuddin

<p>Inovator Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIP KP) di Universitas Hasanuddin sebagai Leader Wilayah Timur Indonesia (Zona III) 1. Salah satu output workshop pada tanggal 18 September 2018 di Hotel Golden Tulip, Jakarta yakni deklarasi pembentukan Forum Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIP KP). 2. Sejalan dengan arahan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berupa pelaksanaan workshop inovator secara berkala selama 3-4 kali per tahun, dikategorikan workshop ForKIP KP menjadi 3 zona, zona I, zona II dan zona III yang dibagi berdasarkan wilayah dan pertimbangan teknis lainnya. 3. Universitas Hasanuddin merupakan perguruan tinggi yang ditunjuk untuk menjadi leader dan koordinator lokasi ForKIP KP zona III meliputi wilayah Indonesia Bagian Timur 4. Sebelum dilakukan workshop per zona, dilakukan koordinasi lebih awal dalam rangka koordinasi persiapan dan perencanaan workshop ForKIP KP ke 3 (tiga) usulan lokasi termasuk pembahasan tentang struktur kelembagaan</p>	19	19	Makassar		
<p>RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT KERJASAMA BILATERAL PADA KEGIATAN LOW BUDGET NATURAL FARMING (LBNF) Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Project Low Budget Natural Farming (LBNF) pada tanggal 21 Juni 2019 di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Holtikultura, Kementerian Pertanian di Bogor, Jawa Barat.</p>	26-Aug-19	26-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Investasi Pengolahan Rumput Laut - Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya kelebihan pasokan dalam negeri - Pasokan yang Berlebih memiliki standar kualitas yang dibutuhkan oleh Negara tujuan Ekspor</p>	28-Aug-19	28-Aug-19	Hotel Salak The Heritage Bogor, Jawa Barat.		
<p>Penyusunan Buku Produk Turunan Berbahan Dasar Mangrove dan Rumput Laut</p>	06-Sep-19	06-Sep-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman		
<p>RAPAT PERSIAPAN DAN USULAN DELEGASI RI PADA KEGIATAN BLUE SEA LAND 17-20 OKTOBER 2019 DI MAZARA DEL VALLO SICILIA ITALIA Rapat persiapan dan usulan DELRI pada kegiatan blue sea land ini dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kelautan</p>	24-Sep-19	24-Sep-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		

	dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.				
	PERTEMUAN FORUM KOORDINASI INOVATOR PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (FORKIP KP) ZONA I 1. Kegiatan pertemuan forum koordinasi kelautan dan perikanan ini dihadiri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang masuk dalam zona I, asosiasi, pelaku usaha, industri dan inovator. 2. Pertemuan Forum Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan Wakil Rektor IV IPB University serta dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim dan Asisten Deputi Sumber Daya Hayati.	25-Sep-19	25-Sep-19	Science Techno Park IPB University	
	PERENCANAAN PROGRAM NASIONAL PEMANFAATAN PROTEIN IKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING a. Penguatan sinergitas khususnya pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dengan penguatan pemanfaatan protein ikan. b. Dukungan Bappenas untuk memasukkan nomenklatur pemanfaatan protein ikan dalam program prioritas nasional pencegahan stunting, khususnya Direktorat Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Gizi Masyarakat. c. Dukungan Kementerian Kesehatan dalam program 1000 HPK, BTP untuk balita dan ibu hamil. Indikasi rapat koordinasi 18 Juli 2019, dalam program tersebut hanya menyebutkan protein yang berasal dari telur, kedelai, susu, dan kacang hijau. d. Menynergikan perencanaan pencegahan stunting dengan pemanfaatan protein ikan antar stakeholder yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bappenas e. Menynergikan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya untuk kegiatan pemanfaatan protein ikan. f. Pelibatan organisasi kemasyarakatan yang lebih luas dan pelibatan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada program pencegahan stunting berbasis produk kelautan dan perikanan. Menynergikan program Gemarikan dan Forikan dengan OASE, IKKT, Kowani,	01-Oct-19	01-Oct-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	

	Dharma Pertiwi, DWPP dan Tim Penggerak PKK Pusat.	SIMPOSIUM NASIONAL PEMANFAATAN PROTEIN IKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING a. Penguatan awareness pemanfaatan protein ikan 100% local content dan tinggi tingkat komponen dalam negeri dalam pencegahan stunting. b. Mendorong pemanfaatan protein ikan pada intervensi spesifik pencegahan stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh kementerian/lembaga lainnya. c. Memasukan nomenklatur protein ikan pada dokumen perencanaan nasional oleh Bappenas dan TNP2K. d. Penguatan sinergi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Forum Peningkatkan Konsumsi Makan Ikan (Forikan) dengan kementerian/lembaga lainnya. e. Pelibatan organisasi wanita melalui penguatan peran ibu negara. f. Penguatan peran pelaku usaha inovator produk yang berafiliasi dengan upaya pencegahan stunting.	14-Oct-19	14-Oct-19	Auditorium Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI		
	PERJALANAN DINAS PELAKSANAAN KEGIATAN ANAK HEBAT ANAK INDONESIA (AHAJ) DAN MONITORING KEGIATAN BOOTCAMP FOR YOUNG TECHNOPRENEUR (BYTe) a. Penyelenggaraan program Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) dan Anak Hebat Anak Indonesia (AHAJ) pada tanggal 26 s.d. 30 Oktober 2019 di Desa Doplang. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. b. Pelaksanaan AHAJ pada tanggal 26 Oktober 2019 dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) oleh Pemda Kabupaten Boyolali. Peserta AHAJ melibatkan siswa didik Sekolah Dasar/ sederajat yang berada disekitar kecamatan 2pada program AHAJ pada tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak kurang lebih 500 orang. c. Pada pelaksanaan AHAJ ditanggal 26 Oktober 2019 acara dibuka oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada pembukaan tersebut disampaikan peran Kemenko Kemaritiman pada program Gemarikan melalui Kegiatan Anak Hebat Anak Indonesia (AHAJ) dan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe). d. Mewakili Bupati Boyolali, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Boyolali memberikan sambutan terkait pelaksanaan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) dan Anak Hebat Anak Indonesia (AHAJ) yang	25-Oct-19	25-Oct-19	BOYOLALI			

akan berlangsung pada tanggal 26 s.d. 30 Oktober 2019 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan Pemkab Boyolali siap mendukung kegiatan tersebut melalui dukungan OPD maupun fasilitasi kendaraan operasional dan lokasi kegiatan. e. Memperkuat sinergi di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, hadir perwakilan Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim yaitu bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman yang memberikan materi terkait Pendidikan Berbasis Kurikulum Kemaritiman pada Anak Usia Sekolah. f. Tim Sociopreneur ID bersama volunteer dalam mengisi materi kepada peserta Anak Hebat Anak Indonesia (AHA!) menyampaikan materi berupa Be A Creative Innovator (BCreator). Pembelajaran kreatifitas yang melibatkan peran aktif anak-anak peserta AHA!. g. Kegiatan AHA! ditutup oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali melalui Pencanangan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kabupaten Boyolali yang diharapkan melalui GEMARIKAN dapat membantu pencegahan stunting di Kabupaten Boyolali. h. Kegiatan BYTe dilaksanakan pada tanggal 27-30 Oktober 2019 di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali oleh pihak Sociopreneur ID dibantu oleh Pemda Kabupaten Boyolali dalam bentuk fasilitasi kendaraan bis operasional, serta dukungan Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan BUMDes yang menyediakan fasilitas tempat tinggal dan ruang pembelajaran. Peserta BYTe berjumlah 30 orang merupakan anak muda dari seluruh Indonesia berusia 18-25 tahun yang telah dipilih dan diseleksi pada bulan September 2019 oleh pihak Sociopreneur ID dan akan mengikuti program pembelajaran dengan tema "Inovasi Produk Keluatan dan Perikanan". i. Dari pelaksanaan kegiatan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) pada tanggal 27-30 Oktober 2019 monitoring dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 2019 oleh tim terdiri dari unsur perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Sociopreneur ID, dan perwakilan PT. Elex Media Komputindo. j. Jumlah Peserta BYTe hasil penjangkaran dari seluruh Indonesia yang direncanakan sejumlah 30 orang yang hadir 26

<p>orang peserta. Melalui fasilitasi kendaraan operasional bis milik Pemkab Boyolali, peserta dibantu operasional mereka selama kegiatan. k. Rumah singgah kegiatan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) dilaksanakan ke rumah dinas Bidan Desa dan rumah penduduk Desa Doplang I. Ruang pertemuan kegiatan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) dilaksanakan ke ruang pertemuan di Kantor Desa Doplang dan Kawasan Wisata Edukasi Lingkungan Lingkungan Hidup “Kampung Asri” Desa Doplang</p>					
<p>Dalam rangka menghadiri Kuliah Umum “Mutiara Indonesia: Sejarah, Produksi dan Potensi Pengembangan Masa Depan, tanggal 11 November 2019 di Ruang Diskusi Senat FPIK-IPB Kuliah Umum bertujuan untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan dan tatacara pengelolaan Mutiara sehingga manfaat dari Mutiara akan tercapai yang di presentasikan oleh Noldy Gustaf Frans Mamangkey, S.Pi, M.Sc.PhD dari Universitas Sam Ratulangi, Manado</p>	11-Nov-19	11-Nov-19	Ruang Diskusi Senat, FPIK-IPB Bogor.		
<p>Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIP KP) Tahun 2019-2020 a) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIP KP) pada Tahun 2019. b) Menyusun rencana persiapan Forum Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIP KP) pada Tahun 2020.</p>	12-Nov-19	12-Nov-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
<p>RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PRODUK MUTIARA SOUTH SEA PEARL (SSP) Rapat ini bertujuan untuk menyusuli Surat Rekomendasi Deputi Bidang Koordiansi SDA dan Jasa terkait Pengembangan Produk Mutiara SSP No. B.248-252/Deputi II/Maritim/VII/2019 kepada Kementerian/Lembaga dan Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI) yang meliputi permasalahan impor mutiara freshwater, branding dan labelling, Indonesia Pearl Festival (IPF), pembatasan ekspor spat dan broodstock mutiara, analisis mengenai dampak lingkungan dan nomenklatur ASBUMI.</p>	13-Nov-19	13-Nov-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman		
<p>Rapat Koordinasi Perkembangan Launching dan Struktur Kelembagaan Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) 1. Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Pusat Data</p>	13-Nov-19	13-Nov-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		

		Informasi Kemenperin, KKP, dan Kemenristek, Smartfish Indonesia dan Minapoli. 2. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan launching TSIN yang sempat tertunda dan pembahasan struktur kelembagaan pengelola TSIN.				
		RAPAT KOORDINASI PENGIRIMAN DELEGASI TENAGA AHLI PERTANIAN INDIA PADA KEGIATAN LOW BUDGET NATURAL FARMING (LBNF) Rapat Koordinasi Pengiriman Delegasi Tenaga Ahli Pertanian India pada kegiatan Low Budget Natural Farming (LBNF) ini bertujuan menindaklanjuti menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Menteri Pertanian Nomor : B-1815/MENKO/MARITIM/A3.01.00/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 Perihal Implementasi Low Budget Natural Farming (LBNF), khususnya agenda berupa: a) Perkembangan pengiriman delegasi tenaga ahli pertanian dari India ke Indonesia. b) Rencana Pelatihan LBNF yang akan diselenggarakan.	15-Nov-19	15-Nov-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
		KOORDINASI IMPLEMENTASI LBNF, SURVEY LOKASI PILOT PROJECT LBNF, DAN KJA DI KAWASAN SEKITAR TOBA, SUMATERA UTARA Pelaksanaan survey dilaksanakan di lokasi pilot project kegiatan LBNF di Desa Parsingguran II, kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan dan monitoring limbah pertanian dan keramba jaring apung (KJA) Danau Toba dilaksanakan di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Humbang Hasundutan	26-Nov-19	26-Nov-19	Toba Sumatera utara	
84	Koordinasi Kebijakan Promosi dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGHADIRI DISKUSI TROPICAL SEAWEED INNOVATION NETWORK DI UNIVERSITAS MAKASSAR - Pembahasan hasil-hasil pemetaan - Pembentukan dan lokus TSIN serta rencana pengelolaannya di bawah koordinasi Dirjen PI Kemenristekdikti - Menentukan langkah-langkah kedepan dalam pembentukan TSIN dan peran para stakeholder terkait	13-Jan-19	13-Jan-19	Universitas Hassanudin Makassar	-
		PEMBENTUKAN VIRTUAL NETWORKING DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN TROPICAL SEAWEED INNOVATION NETWORK (TSIN) 1. Rapat ini merupakan pertemuan lanjutan dari FGD TSIN pada tanggal 14 Januari 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti di Universitas Hassanudin, Makassar.	28-Jan-19	28-Jan-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	1. Sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AHAI dan BYTe, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan berkirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melibatkan anak sekolah, selanjutnya surat tersebut dapat menjadi rujukan/lampiran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten lain dan OPD Kabupaten Boyolali. 2. Pelaksanaan AHAI pada tanggal 26 Oktober 2019 direncanakan akan

<p>2. Dalam sambutan dan arahan rapat yang disampaikan oleh Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Bapak Agung Kuswandono menyampaikan terkait hal-hal penting dalam rangka persiapan kegiatan pembentukan virtual networking dan struktur kelembagaan Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019 di Hotel Sari Pasific, Jl. MH Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.</p>				<p>diiringi dengan pelaksanaan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) oleh Pemda Kabupaten Boyolali 3. Pelaksanaan BYTe pada tanggal 27-30 Oktober 2019 oleh pihak Sociopreneur ID direncanakan akan dibantu oleh Pemda Kabupaten Boyolali dalam bentuk fasilitasi kendaraan bis operasional, serta dukungan Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan BUMDes Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali yang akan menyediakan fasilitas tempat tinggal dan ruang pembelajaran.</p>
<p>RAPAT KOORDINASI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI DIGITAL MARKETING (E-COMMERCE) agenda rapat kerjasama KKP dan Bekraf terkait Promosi dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan melalui Digital Marketing (e-commerce)</p>	21-Feb-19	21-Feb-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
<p>LAPORAN RAPAT AUDIENSI KERJASAMA DENGAN ELEX MEDIA SOCIOPRENEUR INDONESIA Tahun 2019 Sociopreneur akan melakukan kembali Emphaty Project pada bulan Maret, Juli dan Oktober dengan 3 program yaitu : - Fesovity (Festival of Social Creativity); - BYTE (Bootcamp for Young Technopreneur); - Micro Library.</p>	27-Feb-19	27-Feb-19	Ruang Rapat Lt. 21 Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman	
<p>UNDANGAN PERESMIAN PASAR IKAN MODERN MUARA BARU Guna mendukung peningkatan perekonomian, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, mengembangkan sentra bisnis kelautan dan perikanan, dan turut berperan dalam peningkatan angka konsumsi ikan.</p>	13-Mar-19	13-Mar-19	Pasar ikan muara baru jakarta	
<p>RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BOOTCAMP FOR YOUNG TECHNOPRENEUR BERKOLABORASI DENGAN PT ELEX MEDIA DAN SOCIOPRENEUR INDONESIA 1. Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan dihadiri Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif, perwakilan kementerian/ lembaga, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, serta PT Elex Media dan Sociopreneur Indonesia. 2. Telah ditandatangani PKS tentang Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan pada 5 April 2019 antara Deputi SDA dan Jasa, Kemenko Bidang Kemaritiman dengan PT Elex Media Komputindo. Berkaitan dengan program tersebut Kemenko Kemaritiman bertugas menguatkan koordinasi antara pemberi CSR dalam hal ini PT Elex Media dan</p>	19-Jun-19	19-Jun-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	

		<p>Sociopreneur Indonesia dengan K/L dan Pemda. 3. PT Elex Media dan Sociopreneur Indonesia menyampaikan program BYTE (Bootcamp for Young Technopreneur) direncanakan 4 hari 3 malam, dimana peserta dilatih dan dikembangkan menjadi wirausahawan muda untuk terciptanya usaha berbasis teknologi yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Panitia menyeleksi 30 Peserta kegiatan tersebut dari seluruh Indonesia untuk mengikuti bootcamp tersebut. 4. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyampaikan terkait pengembangan calon tenaga kerja terampil melalui pelatihan dan pemagangan sektor Kelautan dan Perikanan yang terselenggara di KKP. Dimana untuk peserta yang menjadi sasaran adalah lulusan satuan pendidikan KP, pelaku utama/usaha KP, dan kelompok sasaran penyuluh. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan tefa dan pendampingan kepada peserta magang sampai menjadi wirausaha (Startup). Pelatihan yang diberikan kepada peserta magang berbasis kompetensi sehingga peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut dapat diberikan sertifikasi kompetensi.</p>					
		<p>DALAM RANGKA PENINJAUAN LAPANGAN PABRIK CANGKANG KAPSUL UNIVERSITAS AIRLANGGA DAN RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PRODUK MUTIARA DAN TEMU ASOSIASI BUDIDAYA MUTIARA INDONESIA Rangkaian kegiatan peninjauan lapangan pabrik cangkang kapsul dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, serta perwakilan Universitas Airlangga.</p>	25-Jun-19	25-Jun-19	SURABAYA		
		<p>Rapat Koordinasi Persiapan Launching Tropical Seaweed Network Innovation (TSIN) a. Perkembangan web based TSIN oleh konsultan b. Perkembangan Berita Acara Serah Terima (BAST) Smartfish ke KKP c. Rencana launching (kesiapan animasi dan sebagainya) dan agenda</p>	17-Jul-19	17-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
		<p>Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Program pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (RINDEKRAF) Rapat koordinasi ini diselenggarakan bertujuan untuk menindaklanjuti sosialisasi Rindekraf pada tanggal 15-16 Juli 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan</p>	19-Aug-19	19-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		

	menerjemahkan Perpres No. 142 Tahun 2018 dalam 3 arah kebijakan yakni Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Arah dan Kebijakan dan Strategi di Bidang Kemaritiman dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Arah Kebijakan dan Strategi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif			
	Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Survey Pertama Pelaksanaan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) Kunjungan lapangan dimulai dengan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, Camat Teras, Kepala Desa Dopleng, Kelompok Budidaya dan Pohlasar serta sekolah-sekolah di wilayah kecamatan Teras di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dengan maksud menjelaskan terkait persiapan yang akan dilakukan mulai dari survey hingga pelaksanaan Bootcamp for Young Technopreneur (BYTe) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.	20-Aug-19	20-Aug-19	Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
	RAPAT TINDAK LANJUT KERJA SAMA BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti dua surat berita faksimili Kedutaan Besar RI di Moskow Rusia terkait temuan pelanggaran pasokan produk perikanan Indonesia ke Rusia dan pertemuan First Meeting of the Russian "Indonesian Working Group on Marine and Fisheries Cooperation di Saint Petersburg, Rusia.	29-Aug-19	29-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
	RAPAT TEKNIS PERSIAPAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI INOVATOR PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (FORKIP KP) 2. Rapat teknis persiapan penyelenggaraan ForKIP KP ini bertujuan : a. Mempermudah dan memperkuat koordinasi dalam persiapan penyelenggaraan forum komunikasi inovator produk kelautan dan perikanan. b. Sinergitas tugas dan fungsi antara panitia dari IPB University dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman agar tidak terjadi overlapping. c. Mengetahui kesiapan panitia, lokus, lokasi penyelenggaraan dan peserta	17-Sep-19	17-Sep-19	Science Techno Park IPB University
	RAPAT KOORDINASI HARMONISASI TINDAK	20-Sep-	20-Sep-	Ruang Rapat Deputi Lt. 8,

		LANJUT PENANGANAN HAMBATAN EKSPOR SIRIP IKAN HIU LANJAMAN (<i>Carcharhinus falciformis</i>) Rapat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan ekspor yang dialami Perkumpulan Eksportir Sirip Ikan Hiu dan Pari Indonesia (Pesipihindo). Mereka melaporkan permasalahan tersebut melalui surat ke Presiden, yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat Nomor : B-3087/Kemensekneg/D-2/SR.02/09/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Penerusan Surat Permohonan Penyelesaian Permasalahan pada Implementasi Perizinan Ekspor Ikan Hiu	19	19	Gedung Kemenko Kemaritiman		
		RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN BOOTCAMP FOR YOUNG TECHNOPRENEUR a. Mempermudah dan memperkuat koordinasi dalam persiapan pelaksanaan BYTe antara pemerintah Kabupaten Boyolali selaku tempat lokasi penyelenggaraan, PT. Elex Media Komputindo selaku CSR kegiatan dan Socioprenur Indonesia selaku pelaksana dan pemilik program BYTe dengan bantuan, masukan dan arahan pemerintah pusat. b. Laporan perkembangan dan survey persiapan pelaksanaan kegiatan BYTe c. Mengetahui kesiapan panitia, lokasi, lokasi penyelenggaraan dan peserta pada saat pelaksanaan puncak kegiatan BYTe	09-Oct-19	09-Oct-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman		
85	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati	LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN IKAN HIAS NASIONAL Agenda rapat membahas: 1. Review RAN Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional 2017-2021; 2. Evaluasi NUSATIC 2018 dan Persiapan NUSATIC 2019; 3. Progres budidaya dan perdagangan ikan hias nasional; 4. Tindak lanjut rumusan maskot ikan hias nasional; 5. Agenda lain yang berkembang.	31-Jan-19	31-Jan-19	RR Lantai 21 Kemenko Bidang Kemaritiman	? Belum adanya konfirmasi resmi dari Presiden, Menko Maritim atau Men KP untuk pembukaan dan/atau penutupan pameran;	? Menko Maritim dan Investasi perlu memantau kesediaan bapak Menko Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019. ? MenKP perlu memantau kesediaan bapak MenKP untuk membuka kegiatan Kegiatan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019. ? Untuk undangan ke Dubes di pantau oleh Kemenlu dan akan terus Update. ? Peliputan media Terus dipantau humas Marves.
		Pembukaan Pelatihan Identifikasi Hiu dan Pari serta Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring Konservasi Hiu dan Pari Perjalanan Dinas dalam rangka Pembukaan Pelatihan Identifikasi Hiu dan Pari serta Kunjungan Lapangan dalam rangka Monitoring Konservasi Hiu dan Pari di Lombok, NTB pada tanggal 24-28 Februari 2019 b) Surat undangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan : Und.334/ DJPRL/II/2019 tentang Pelatihan Identifikasi Hiu dan Pari	24-Feb-19	24-Feb-19	Lombok, NTB		

Rencana Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyusunan RAN Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional	05-Mar-19	05-Mar-19	Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan
Annual Meeting The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Ke-7 rapat persiapan Indonesia untuk mengikuti Annual Meeting The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Ke-7 di Paris, Perancis. Rapat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Gono Semiadi dan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, Pusat Penelitian Biologi " LIPI, dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Agenda yang dibahas dalam rapat ini yaitu (a) pemilihan rencana topik yang menjadi perhatian RI dari proponent yang masuk dan (b) rekomendasi daftar nama dan instansi delegasi RI yang akan ikut serta dalam Annual Meeting IPBES Ke-7 di Paris	08-Mar-19	08-Mar-19	Gedung Administrasi, Puslit Biologi " LIPI Cibinong Science Center, Bogor
Rakor Pengelolaan Spesies Perairan terkait CITES Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat K/L serta menindaklanjuti surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP kepada Dirjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri, maka pada tanggal 21 Maret 2019 Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengadakan rapat koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pengendalian pengelolaan Spesies Perairan sebagai tindak lanjut terbitnya Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).	14-Mar-19	14-Mar-19	Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta
LAPORAN PERTEMUAN DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Prioritas Making Indonesia 4.0 Melalui Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Rapat bertujuan untuk membahas harmonisasi regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas Making Indonesia 4.0.	15-Mar-19	15-Mar-19	Hotel Aston Sentul, Bogor
Laporan Hasil Rakor Persiapan Sidang IPBES-7 1. IPBES adalah salah satu badan dibawah Konvensi PBB terkait konservasi keanekaragaman hayati (UN Convention on Biological Diversity). IPBES mempunyai	19-Mar-19	19-Mar-19	Bogor

	fungsi untuk melakukan kajian dan menyediakan data dan informasi ilmiah terkait konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang hasilnya akan diputuskan pada forum Konferensi Para Pihak (COP) CBD dan akan mengikat Negara Pihak. Agenda yang akan dibahas adalah. Isu utama yang akan dibahas pada Sidang IPBES-7 adalah: a) Review kegiatan IPBES Phase I (2014-2018): sustainable wildlife management, Invasive alien species, desertification, pollinator for pollination and food production; b) Global assessment of biodiversity and ecosystem services; c) Program Kerja IPBES Phase 2 (2019-2023): Marine and Freshwater Biodiversity, Agriculture Biodiversity and Food Production, Biodiversity and Climate Change, Post 2020 Global Biodiversity Assessment, Biodiversity and Health;				
	RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL PEMBANGUNAN INDUSTRI IKAN HIAS 2020-204 a) Strategi 2: Peningkatan dukungan dan akses transportasi ikan hias; b) Strategi 5: Keterpaduan data (One Data Policy); c) Strategi 6: Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum;	10-Apr-19	10-Apr-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	
	KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ECENG GONDOK Eceng gondok adalah jenis tumbuhan invasif yang keberadaanya mengganggu ekosistem perairan. Pertumbuhan dan penyebaran eceng gondok sudah meluas di wilayah perairan Indonesia, terutama pada perairan yang tenang dan minim arus aliran seperti telaga, kolam, waduk dan danau atau rawa. Dengan pertumbuhannya yang sangat cepat dibandingkan pertumbuhan normal, eceng gondok menimbulkan masalah bagi perairan karena menutupi permukaan perairan dengan cepat, menyumbat aliran dan menghambat transportasi air, serta menimbulkan pencemaran air dari proses eutrofikasi. Selain itu, eceng gondok dapat berevapotranspirasi yang mana akan menyebabkan pengurangan badan air dan pendangkalan perairan.	02-Jul-19	02-Jul-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ECENG GONDOK Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional serta mengidentifikasi program dan rencana aksi pengendalian eceng gondok tahun 2019 dan 2020-2024	05-Aug-19	05-Aug-19	RR. Louhan, Lt.2. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	

pada Danau Prioritas;			
Peninjauan Lapangan terkait pengendalian Tanaman Eceng Gondok di Danau Rawa Pening, Semarang Peninjauan lapangan bertujuan untuk melihat pengendalian eceng gondok di Danau Rawa Pening yang didampingi oleh Perwakilan dari PDAS dan KSDA Prov. Jawa Tengah, Perwakilan KemenPUPR dan pihak terkait Pemerintah Provinsi Semarang.	07-Aug-19	07-Aug-19	Danau Rawa Pening, Semarang.
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN NUSATIC AQUATIC (NUSANTARA) 2019 DAN TINDAK LANJUT PAMERAN IKAN HIAS Rapat Koordinasi bertujuan untuk perkembangan laporan pelaksanaan kegiatan Nusantara Aquatic (Nusatic) 2019 dan penyampaian pelaksanaan 7th All Indonesia Young Local Koi Shoe 2019 di Pasuruan Jawa Timur.	13-Aug-19	13-Aug-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN ECENG GONDOK Rapat Koordinasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian eceng gondok di lima danau prioritas (Rawapening, Maninjau, Toba, Taliwang, Limboto), mengidentifikasi program, rencana aksi dan alokasi anggaran pengendalian eceng gondok tahun 2019 dan 2020-2024 pada masing-masing danau.	14-Aug-19	14-Aug-19	Hotel Milenium Jakarta
Penjauan lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan informasi kondisi terkini terhadap pelaksanaan pengendalian eceng gondok pada kawasan danau prioritas Nasional yaitu Danau Toba, Sumatera Utara	15-Aug-19	15-Aug-19	Danau Toba, Sumatera Utara
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SEMINAR NASIONAL PENCEGAHAN PENCURIAN SUMBER DAYA HAYATI (BIOPIRACY) INDONESIA pengambilan secara illegal atau pelanggaran eksploitasi sumber daya genetik dan biokimia dari negara lain dengan proses paten. Biopiracy masih menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya hayati dan Traditional Knowledge, seperti Indonesia.	20-Aug-19	20-Aug-19	Ruang Rapat Menko Maritim Lantai 2 Utara
Rapat Koordinasi Persiapan Workshop Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia Kegiatan dipimpin oleh Sahat M. Panggabean selaku Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Conservation International Indonesia.	16-Sep-19	16-Sep-19	Arch Hotel, Bogor
RAPAT KOORDINASI HARMONISASI KEBIJAKAN	17-Sep-	17-Sep-	Ruang Rapat Lt.2 Utara

	DAN PERATURAN TERKAIT PENGELOLA CITES UNTUK SPESIES PERAIRAN kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan spesies perairan terkait dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), khususnya pengaturan Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES untuk spesies perairan pasca implementasi Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/ atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam CITES.	19	19	Kemenko Bidang Kemaritiman	
	Sosialisasi dan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Terpadu Taman Nasional (TN) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) 2018-2025 Rapat Koordinasi bertujuan untuk mensosialisasikan dan memetakan tindak lanjut Peraturan Presiden No. 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional (TN) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).	03-Oct-19	03-Oct-19	RR. Louhan, Lt.4. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	RAPAT KELOMPOK KERJA BENTANG LAUT CTI-CFF INDONESIA 1. Kegiatan Rapat Kelompok Kerja Bentang Laut CTI-CFF Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2019 di Hotel Whiz Prime, Bogor, dipimpin oleh Asisten Deputi Jasa Kemaritiman yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, NCC CTI-CFF, perwakilan Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kemenko Bidang Kemaritiman, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian LHK, TNC, WWF, CI dan WCS; 2. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendanaan dan rencana investasi pada seascape priority, Menyiapkan kerjasama regional dan rencana pengelolaan wilayah pesisir pada seascape priority, membahas draft RPOA 2.0, dan persiapan Pre-SOM dan SOM-15;	11-Oct-19	11-Oct-19	Hotel Whiz Prime, Bogor	
	KEGIATAN FESTIVAL AIR 2019 Mensosialisasikan pentingnya kelestarian ekosistem perairan ke masyarakat diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai arti pentingnya dari konservasi perairan, untuk kelangsungan hidup manusia serta biota perairan yang lebih baik serta dalam merealisasikan tindakan kecil dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan	12-Oct-19	12-Oct-19	AUDITORIUM GMSK FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA (FEMA), IPB DERMAGA BOGOR AUDITORIUM GMSK FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA (FEMA), IPB	

			DERMAGA BOGOR
PENCERMATAAN DOKUMEN SBSTTA 23 DAN HASIL POST-2020 GLOBAL BIODIVERSITY FRAMEWORK Paparan diawali oleh Kepala Subdirektorat Keamanan Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyampaikan hasil pertemuan pertemuan Open-Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG 1) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-30 August 2019 di Nairobi, Kenya. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan penting dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice ke-23 (SBSTTA 23) nantinya.	14-Oct-19	14-Oct-19	Ruang Rapat Botani, Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong, Kab. Bogor.
Workshop Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Conservation International Indonesia, FPIK Institut Pertanian Bogor, Biro Perencanaan Kemenko Maritim, dan tiap-tiap kepala bidang di Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa	16-Oct-19	16-Oct-19	Hotel Royal Juanda, Bogor
FOCUS GROUP DISCUSSION HARMONISASI REGULASI DAN SINKRONISASI KEGIATAN PENANGANAN JENIS ASING INVASIF DI INDONESIA Jenis Invasif merupakan jenis-jenis asing yang berkembang dan menyebar diluar habitat aslinya, sehingga mengancam ekosistem, habitat, atau jenis yang lain dan merugikan secara ekonomi.	18-Oct-19	18-Oct-19	Ruang Rapat Komodo, Kantor KSDAE, Jalan Juanda 15, Bogor
Press Conference 4th Nusatic dan Trubus	24-Oct-19	24-Oct-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman
SEMINAR NASIONAL PENCEGAHAN PENCURIAN SUMBER DAYA HAYATI (BIOPIRACY) INDONESIA 1. Seminar nasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak dalam upaya pencegahan pencurian keanekaragaman hayati, termasuk mekanisme perizinan penelitian asing, paten terhadap sumber daya genetic serta review implementasi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya genetik 2. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian,	28-Oct-19	28-Oct-19	Hotel Bandara Tangerang

	Perguruan Tinggi, Pakar, Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi, dan Media Masa				
	PERTEMUAN PERSIAPAN SIDANG SBSTTA-23 KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (a) Progres pencapaian negara pihak dalam implementasi Aichi Biodiversity Targets 2020; (b) Kerangka acuan keanekaragaman hayati global pasca 2020 (Post 2020 Global Biodiversity Framework); (c) Target Global Konservasi dan Restorasi Karang Pasca 2020; (d) Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan; (e) Pengarusutamaan keanekaragaman hayati pada berbagai sektor dan strategi implementasinya; (f) Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati	05-Nov-19	05-Nov-19	RR. Louhan, Lt.8. Kantor Kemenko Bid. Kemaritiman	
	LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI DAN KUNJUNGAN LAPANGAN DALAM RANGKA SOSIALISASI PERPRES 56/2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TN DAN KKP 2018-2025 DAN PEMBENTUKAN JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI LESSER SUNDA a. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2018-2025. b. Pembahasan progress Pembentukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan di kawasan Lesser sunda.	06-Nov-19	06-Nov-19	Kabupaten Mangarai Barat-NTT	
	PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI PERSIPAN NUSATIC DAN TRUBUS AGRO EXPO 2019 Rapat Koordinasi Persiapan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019 dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati-Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan diikuti oleh perwakilan dari K/L terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM), Nusatic, Trubus dan Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI). Tujuan rakor adalah untuk membahas progress rencana pelaksanaan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019, terutama terkait detil agenda pelaksanaan (pembukaan, pameran, seminar, penutupan).	19-Nov-19	19-Nov-19	Ruang Rapat Lt 21 Menko Marves	

		RAPAT KOORDINASI FINALISASI PERSIAPAN NUSATIC DAN TRUBUS AGRO EXPO 2019 ? Persiapan kegiatan pembukaan dan penutupan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019 ; ? Persiapan Agenda Kegiatan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019. ? Rundown acara pada saat pembukaa siapa yang akan membuka pertemuan tersebut	25-Nov-19	25-Nov-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman	
86	Koordinasi Kebijakan Komisi Nasional Terumbu Karang Indonesia	Laporan Rakor Komnas CTI-CFF Indonesia. a. Sosialisasi Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut Pre-Senior Official Meeting (SOM) ke-14, Senior Official Meeting (SOM) ke-14 dan Ministerial Meeting (MM) ke-7 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Senior Official Meeting (SOM)-14 dan Ministerial Meeting (MM) â€ 7 CTI-CFF b. Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 106/2018 Tentang Sekretariat, Pokja, dan Mitra Komnas CTI-CFF Indonesia c. Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan CTI-CFF Indonesia Tahun 2018 2018	23-Jan-19	23-Jan-19	Ruang Rapat Lt.4 Kemenko Bidang Kemaritiman	- Mengingat perkembangan usaha budidaya ini yang cukup pesat, pun perlu dilakukan dukungan riset dan pengembangan untuk memperoleh dan mengetahui kondisi lingkungan yang cocok, laju pertumbuhan, dan penempatan jenis karang yang sesuai. - Melakukan terobosan perlu dilakukan untuk mencari warna karang eksotik yang disukai oleh pasar. Kerjasama antara instansi peneliti dan pengusaha budidaya karang hias dan ikan hias laut lainnya perlu ditingkatkan lagi.
	LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA a) Evaluasi Program Kerja Sekretariat dan Pokja Komnas CTI-CFF Indonesia Tahun 2018; b) Rencana Kerja Sekretariat dan Pokja Komnas CTI-CFF Indonesia Tahun 2019; c) Penyusunan Laporan Tahunan Komnas CTI-CFF Indonesia 2018.	07-Feb-19	07-Feb-19	Hotel Santika-Bogor		
	KONSINYERING FINALISASI LAPORAN TAHUNAN KOMNAS CTI-CFF INDONESIA untuk laporan adalah Peran Indonesia dalam Diplomasi dan Kerjasama Regional, untuk membedakan dengan laporan K/L, maka dipilih kegiatan yang mencakup/bersifat regional serta menonjolkan kepemimpinan atau peran strategis Indonesia di kancah regional	01-Mar-19	01-Mar-19	Hotel Royal Pajajaran, Bogor		
	Rapat Koordinasi Persiapan Sidang IPBES-7 Agenda yang akan dibahas adalah. Isu utama yang akan dibahas pada Sidang IPBES-7 adalah: a) Review kegiatan IPBES Phase I (2014-2018): sustainable wildlife management, Invasive alien species, desertification, pollinator for pollination and food production; b) Global assessment of biodiversity and ecosystem services; c) Program Kerja IPBES Phase 2 (2019-2023): Marine and Freshwater Biodiversity, Agriculture Biodiversity and Food Production,	11-Apr-19	11-Apr-19	Hotel Grand Savero, Bogor		

Biodiversity and Climate Change, Post 2020 Global Biodiversity Assessment, Biodiversity and Health;			
Rapat Koordinasi Persiapan Sidang IPBES-7 Finalisasi Posisi Delegasi RI a) Review kegiatan IPBES Phase I (2014-2018): sustainable wildlife management, Invasive alien species, desertification, pollinator for pollination and food production; b) Global assessment of biodiversity and ecosystem services; c) Program Kerja IPBES Phase 2 (2020-2030): Marine and Freshwater Biodiversity, Agriculture Biodiversity and Food Production, Biodiversity and Climate Change, Post 2020 Global Biodiversity Assessment, Biodiversity and Health;	24-Apr-19	24-Apr-19	Hotel Salak The Heritage Bogor
RAPAT KOORDINASI PEMULIHAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan status terumbu karang Indonesia dan merumuskan upaya pemulihan kerusakan terumbu karang yang terintegrasi	21-May-19	21-May-19	Ruang Rapat Lt.2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman
“Building National and Local Capacity on Measuring SETI (Science, Engineering, Technology, and Innovation) for SDGs (Sustainable Development Goals) in Asia and Pacific Region” mendukung dan mendorong integrasi SDGs dalam program pembangunan nasional dan daerah, serta mengukur pencapaian SDGs di tingkat lokal (pemerintah daerah) di wilayah CTI-CFF. Sebagaimana kita ketahui SDGs yang diadopsi oleh PBB pada September 2015 merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian. Sebelas tahun waktu yang tersisa untuk memenuhi target capaian tahun SDGs tahun 2030 bukanlah waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kapasitas dan kerjasama natar berbagai pihak untuk mendorong percepatan pencapaian target tersebut.	17-Jun-19	17-Jun-19	Hotel Sultan-Jakarta
PERTEMUAN PERSIAPAN LOKAKARYA NASIONAL KONSERVASI DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG 1. Badan Informasi Geospasial tentang Pemetaan Terumbu Karang di Indonesia; 2.	21-Jun-19	21-Jun-19	Ruang Rapat Menko Maritim Lantai 2 Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Program dan Rencana Aksi Terumbu Karang Indonesia; 3. LIPI tentang Usulan Lokasi Prioritas untuk Rehabilitasi Karang; 4. IPB tentang Metode dan Aplikasi Teknik Rehabilitasi Terumbu Karang.			
FINALISASI RENCANA AKSI NASIONAL PEMBANGUNAN IKAN HIAS 2020-2024 1. RAN Ikan Hias akan diintegrasikan ke dalam matriks Kebijakan Kelautan Indonesia. Untuk itu diharapkan rencana aksi yang akan dimasukkan mempunyai target yang realistis mengingat akan dievaluasi progress pelaksanaannya; 2. Pertimbangan utama mengapa matriks Ikan Hias diintegrasikan dalam matriks KKI adalah karena payung hukum yang kuat serta kepastian implementasinya.	24-Jun-19	24-Jun-19	Hotel Royal Padjajaran
KOORDINASI DAN KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK PERSIAPAN LOKAKARYA NASIONAL KONSERVASI DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG SERTA SURVEY LOKASI PRIORITAS UNTUK REHABILITASI TERUMBU KARANG Dalam rangka persiapan lokakarya nasional, maka dilakukan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disampaikan bahwa dari total 7200 hektar area terumbu karang di Bali, 12 persennya sudah masuk kategori rusak total.	03-Jul-19	03-Jul-19	Bali
PERTEMUAN SOSIALISASI HASIL IPBES-7 Para pakar di Indonesia harus berkontribusi dalam kajian ilmiah. Agar dibuatkan Kerangka Acuan yang baku sehingga Delri mempunyai kerangka kerja, PIC harus jelas (PIC utama), timeline nya, buat kertas posisi untuk sidang. Sudah ditetapkan pihak yang akan datang (Delri). Dirumuskan tujuan nasional (macro design Indonesia), tidak kepentingan masing-masing K/L. Koordinator antar K/L sangat diperlukan. Indonesia harus mampu menjadi leader di tingkat internasional (pakar Indonesia sangat banyak di bidang keanekaragaman hayati). IPBES-8 akan dilaksanakan di Marakesh-Maroko. Perlu ada agenda sidang (side event) pada sidang internasional.	15-Jul-19	15-Jul-19	Hotel Grand Savero, Bogor
KOORDINASI PERSIAPAN OFWG-13 APEC MEETING Pertemuan bertujuan untuk membahas persiapan delegasi RI, baik anggota delegasi maupun kertas posisi	16-Jul-19	16-Jul-19	RR Lantai 21 Kemenko Bidang Kemaritiman

	delegasi RI pada pertemuan Pokja Kelautan dan Perikanan (Ocean and Fisheries Working Group) ke-13 forum APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2019 di Vinna Del Mar-Chili. Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati-Kemenko Bidang Kemaritiman dan diikuti oleh K/L terkait (KKP, Setkab, Kemlu, Bappenas, Kemenko Maritim).			
	MITIGASI KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI AKIBAT PARIWISATA TIDAK RAMAH LINGKUNGAN â€¢ Kebijakan Wisata Bahari di TN dan KPPN. â€¢ Pengaturan kapal wisata di kawasan konservasi. â€¢ Mitigasi Kerusakan Terumbu Karang dan Keanekaragaman Hayati. â€¢ Progres R.Perpres Pengelolaan Terpadu TN dan KPPN.	27-Aug-19	27-Aug-19	Ruang Rapat Menko Maritim Lantai 2 Utara
	Menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) 7 K/L Penyampaian Draft masukkan PKS dari tiap-tiap K/L untuk Finalisasi Dokumen Perjanjian Kerja Sama 7 K/L dan membawa dokumen draft PKS.	19-Sep-19	19-Sep-19	Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor Nirwana Residence, Jawa Barat.
	Sinergi Kawasan Konservasi Perairan dan Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Wilayah CTI CFF Kawasan Konservasi Laut/Perairan (KKL) adalah â€œruang geografis yang terdefinisi dengan jelas, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan jasa ekosistem yang salahsatunya adalah kegiatan ekowisata (pariwisata) berkelanjutan diperlukan kerjasama yang komprehensif antara para pihak terutama antara pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, ilmuwan, private sector, masyarakat dan NGOs.	30-Sep-19	30-Sep-19	hotel bandara tangerang
	PERTEMUAN PERSIAPAN SIDANG SBSTTA-23 KONVENSİ KEANEKARAGAMAN HAYATI (a) Progres pencapaian negara pihak dalam implementasi Aichi Biodiversity Targets 2020; (b) Kerangka acuan keanekaragaman hayati global pasca 2020 (Post 2020 Global Biodiversity Framework); (c) Target Global Konservasi dan Restorasi Karang Pasca 2020; (d) Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan; (e) Pengarusutamaan keanekaragaman hayati pada berbagai sektor dan strategi implementasinya; (f)	11-Nov-19	11-Nov-19	Hotel Salak padjajaran

	Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati;				
	KEGIATAN NUSATIC DAN TRUBUS AGRO EXPO 2019 1. Pembukaan Nusatic dan Trubus Agro Expo 2019 dilakukan pada tanggal 29 November 2019 dan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Pertanian, Bupati Tangerang, Sekjen KKP, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Direktur Sinarmas; dan Kedutaan Duta Besar sejumlah negara mitra seperti Tunisia, Mozambik, Yaman, Korea Utara, dan Suriname, Iran, Kazakhstan, Sudan, Somalia, Lybia, Panama dan Guenea Bissue. 2. Menteri KKP akan melakukan penyederhanaan regulasi-regulasi terkait pasar ikan hias untuk permintaan domestik maupun ekspor. Untuk selanjutnya akan ada terobosan-terobosan untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu mahalnya biaya angkut dan kendala regulasi. 3. Bupati Tangerang juga telah melakukan pembinaan terkait budidaya ikan hias, seperti di Lapas Jambe akan dijadikan pusat pembibitan ikan Koi dan dilakukan pengembangan Agrobisnis. 4. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ketertarikan orang-orang untuk memelihara ikan hias secara umum semakin meningkat yang ditandai dengan permintaan ikan hias dunia yang meningkat. Nilai perdagangan ikan hias dunia pada tahun 2017 sebesar US\$ 314,15 Juta. Nilai impor tersebut meningkat sebesar 7,58% dari tahun 2016 (trademap.org, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar ikan hias luar negeri masih terbuka lebar untuk industri ikan hias Indonesia.	29-Nov-19	29-Nov-19	ICE BSD Tangsel	
	Monitoring Kegiatan Survey Stock Opnam Karang Hias Tujuan dari survey stock opname karang adalah untuk melihat dan mengkaji jenis dan jumlah karang hias yang dibudidaya/ditransplantasi oleh Perusahaan, baik indukan maupun anakan (F1 dan F2) yang siap diekspor dan mengecek permasalahan yang ada, terutama terkait dengan adanya kebijakan penghentian layanan health certificate untuk komoditas karang hias .	06-Dec-19	06-Dec-19	Bali	
	PENDAMPNGAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KE PELAKU USAHA KORAL/KARANG HIAS DI BINANGEN KABUPATEN PANDEGLANG Rapat	06-Dec-19	06-Dec-19	Pandeglang Banten	

		Koordinasi dalam melakukan Penentuan dalam penentuan lokasi prioritas untk kegiatan Verifikasi dan stock opname karang hias hasil traslantasi oleh dalam kunjungan lapangan ke Pantai Binuangen di Pandeglang yang dimiliki oleh beberapa pelaku usaha. Pada karang, terdapat dua cara perkembangbiakan yang diikuti. Pertama dilakukan secara seksual yang membutuhkan gamet jantan dan gamet betina, ini biasanya terjadi secara alamiah di alam atau modifikasi di ruang terkontrol disaat penelitian. Pada prinsipnya, seperti halnya budidaya ikan atau satwa lainnya, budidaya karang hias bertujuan untuk memperbanyak jumlah individu dan mereproduksinya. Pada karang, terdapat dua cara perkembangbiakan yang diikuti. Pertama dilakukan secara seksual yang membutuhkan gamet jantan dan gamet betina, ini biasanya terjadi secara alamiah di alam atau modifikasi di ruang terkontrol disaat penelitian. Kedua lewat cara aseksual yaitu dengan melakukan pematangan bagian induk sehingga menjadi individu baru. Satu induk dapat menghasilkan 4-5 individu baru tergantung ukuran induknya. Cara kedua ini lebih dipilih untuk pengembangan budidaya karang hias.					
87	Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Minerba	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan) bekerjasama dengan tim Konsorsium Roket Nasional dalam pengembangan roket R-Han 122B, yang memiliki tujuan utama menghentikan ketergantungan terhadap produk asing dengan menjadikan roket R-Han 122B sebagai alutsista yang digunakan prajurit TNI sebagai senjata utama untuk mensubstitusi persenjataan yang selama ini diperoleh dari luar negeri	1. Mendorong penataan IUP dibagian hulu oleh Pemda Sultra, penguatan sistem supply chain oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, perbaikan dan konsistenan kualitas dengan mendorong sertifikasi SNI oleh BSN, mendorong industri pengolahan dalam penggunaan komponen dalam negeri oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. 2. Gubernur Sulawesi Tenggara telah merespon surat Deputi Nomor B.332/Deputi II/ Maritim/XI/2019 (copy surat terlampir). Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan melaksanakan rakor dengan BSN bersama Komtek Perumusan SNI, dan BPPT terkait audit teknologi, serta progres sertifikasi P3DN di Kementerian Perindustrian
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta			
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta			
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta			
	Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batu Bara	25-Feb-19	25-Feb-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta			
	Rapat Koordinasi Fasilitasi Percepatan Pengembangan Aspal Buton Bagi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	05-Mar-19	05-Mar-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta			

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Regional II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	11-Mar-19	11-Mar-19	Hotel Grands Nyiur, Kota Balikpapan
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Regional II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	11-Mar-19	11-Mar-19	Hotel Grands Nyiur, Kota Balikpapan
Hasil Focus Group Discussion "Fortifikasi Garam Pangan" dan Peninjauan Lapangan di Jawa Timur	04-Apr-19	04-Apr-19	Surabaya, Jawa Timur
Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Alokasi Anggaran Pasang Baru Listrik 450 VA Bagi Rumah Tangga Miskin oleh Pemerintah Daerah	22-Apr-19	22-Apr-19	Ruang rapat Lt 8 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Alokasi Anggaran Pasang Baru Listrik 450 VA Bagi Rumah Tangga Miskin oleh Pemerintah Daerah	22-Apr-19	22-Apr-19	Ruang rapat Lt 8 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Hasil Verifikasi Data Lapangan Terkait Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton di Sulawesi Tenggara	08-May-19	08-May-19	Kantor Dinas ESDM dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wil XXI Kendari, dan Industri pengolahan PT Butonas di Kendari, serta mini plant PT Wijaya Kaya Bitumen di Kabungka Buton
Rapat koordinasi dan peninjauan lapangan kesiapan infrastruktur pengelolaan dan distribusi aspal buton	14-May-19	14-May-19	Hotel Santika Premiere Surabaya
Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Penindakan Penambangan Tanpa Ijin di Kantor Kemenko Polhukam	21-May-19	21-May-19	Kantor Kemenko Polhukam
Rapat Koordinasi Fasilitasi Percepatan Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton	27-May-19	27-May-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta
Rapat Koordinasi rencana dan aksi sertifikasi aspal buton olahan	27-Jun-19	27-Jun-19	Singgasana Hotel, Kota Surabaya
Rapat koordinasi dan benchmarking pengembangan produksi pergaraman serta garam pangan halal dan nilai tambah fortifikasi dan unjungan lapangan ke Kabupaten Aceh Besar dan Pidie (perebusan garam dan tunnel percontohan)	02-Jul-19	02-Jul-19	Hotel Hermes Banda Aceh
Laporan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	02-Jul-19	02-Jul-19	Ruang Rapat Lt. 4 Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta

		Hasil Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12-Aug-19	12-Aug-19	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
		Hasil Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan dan Pengembangan Aspal Buton pada Pusat P3DN Kementerian Perindustrian	13-Aug-19	13-Aug-19	Salak Padjadjaran Hotel Bogor		
		Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana dan Aksi Sertifikasi Asbuton Olahan	14-Aug-19	14-Aug-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dan Penanganan Pertambangan Tanpa Izin	05-Sep-19	05-Sep-19	Ruang Rapat Kemenko Bidang PMK		
		Menghadiri Undangan Pertemuan Pembahasan Solusi dalam Rangka Peningkatan Harga dan Serapan Pasar terhadap Garam Rakyat	07-Sep-19	07-Sep-19	Aula Kantor Bupati Bima NTB		
		Rapat Koordinasi Peningkatan Jenis Hasil Olahan Aspal Buton(Asbuton) Berupa Asbuton Murni (Full Extraction) dan Produk Turunan Lainnya	13-Sep-19	13-Sep-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri Seafer	16-Sep-19	16-Sep-19	Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Lt. 16 Gd. Kemenko Bidang Kemaritiman		
		Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Tugas dan Fungsi Dewan SDA Nasional Pasca Pengesahan Undang-Undang SDA Tahun 2019	24-Sep-19	24-Sep-19	Ruang Rapat Serayu Lt. 3 Gd Ali Wardana Kemenko Bidang Perekonomian		
		Hasil Pelaksanaan Rakor Kesiapan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Mendukung Rencana Investasi dan Pengembangan Aspal Buton (Asbuton)	27-Sep-19	27-Sep-19	Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara		
		Hasil Pelaksanaan Rakor Progres Pengembangan Industri Pengolahan Aspal Buton (Asbuton) di Kabungka dan Lawele, Buton Sulawesi Tenggara	28-Oct-19	28-Oct-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Rapat Koordinasi terkait "Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelarangan Ekspor Bijih Nikel"	31-Oct-19	31-Oct-19	Ruang rapat It 8, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa		
		Rakor Pengembangan Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Aspal Buton untuk Pertahanan Negara	19-Nov-19	19-Nov-19	Ruang rapat It 8, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa		
88	Kebijakan Tata kelola	verifikasi stok garam pada beberapa perusahaan	16-Jan-	16-Jan-	Kabupaten Sumenep dan	Kementerian Perdagangan telah	1. Mendukung hasil kajian BPPP

Garam	pengolah garam di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur	19	19	Pamekasan	menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memasukkan garam sebagai barang penting melalui revisi Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan mengirimkan Surat Permohonan Izin Prakarsa melalui surat Nomor 800/M-DAG/SD/8/2019 kepada Presiden beserta dengan kajiannya yang disusun oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP). Hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum mendapatkan progress dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan arahan lebih lanjut mengenai revisi Perpres Nomor 71 tahun 2015	Kementerian Perdagangan dalam memasukkan garam sebagai barang penting, kami akan terus mengawal progress dari tindak lanjut revisi Perpres 71 tahun 2015 di Kementerian Sekretariat Negara. 2. Mendorong BPOM dan BSN untuk melakukan fasilitasi izin edar dan standarisasi berupa affirmative action terhadap UMKM yang bergerak di sektor industri inovatif produksi garam. Dengan pengalaman kita mengurai permasalahan CV Rama Shinta di Cirebon, seyogyanya dapat diterapkan juga pada kedua UMKM tersebut
	hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 455 hektar di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT	13-Feb-19	13-Feb-19	Ruang rapat Lt 8, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa		
	Rapat Koordinasi Progres Ekstensifikasi Lahan Garam serta Rencana Pembangunan Pilot Project Garam Industri di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT	20-Feb-19	20-Feb-19	Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur		
	FGD Optimalisasi pemanfaatan garam lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri	05-Mar-19	05-Mar-19	Hotel Botani Square Bogor		
	Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Lahan Pergaraman PT Inti Daya Kencana di Kabupaten Malaka	13-Mar-19	13-Mar-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Rapat Koordinasi Fasilitasi Percepatan Perjanjian Kerja Sama Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 443 hektar di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur	29-Mar-19	29-Mar-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Hasil mengikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri semester 1 tahun 2019	20-Jun-19	20-Jun-19	Ruang Rapat Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat		
	Rapat koordinasi kklasifikasi garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagai strategi rasionalisasi harga	09-Jul-19	09-Jul-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Rapat koordinasi pembahasan penetapan tanah terlantar yang berasal dari HGU di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT	11-Jul-19	11-Jul-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Hasil Bincang Maritim Dilanjutkan Konferensi Pers tentang Progress dan Permasalahan Pergaraman Nasional	12-Jul-19	12-Jul-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Rapat koordinasi Penyelesaian permasalahan HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta di Kabupaten Kupang	18-Jul-19	18-Jul-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional	25-Jul-19	25-Jul-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Hasil Menghadiri Undangan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produsen dan Advokasi ke Pemda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (30-31 Juli 2019) dan Bali (7-8 Agustus 2019)	30-Jul-19	30-Jul-19	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Klungkung dan Karangasem		
	Diskusi Tata Kelola Garam dengan KPK	02-Aug-	02-Aug-	Ruang rapat Deputi Bidang		

			19	19	Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Hasil Peninjauan Lapangan dan Advokasi kepada Pemda terkait Pengawasan Garam Beryodium di Provinsi Nusa Tenggara Barat	13-Aug-19	13-Aug-19	Industri kecil menengah (IKM) produsen garam yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB		
		FGD Kebijakan Persaingan Industri garam Nasional	14-Aug-19	14-Aug-19	Ruang Rapat KPPU Jakarta		
		Hasil Menghadiri Undangan Penanda tangan PKS antara PT Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa Tuafanu dan Desa Toineke di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur	25-Aug-19	25-Aug-19	Balai Desa Tuafanu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT		
		Hasil rapat koordinasi pemaparan program kerja, teknologi pengembangan dan peningkatan kualitas produksi garam oleh PT Selim Properti Megatama	11-Sep-19	11-Sep-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Mutu Garam Rakyat tahun 2019	29-Oct-19	29-Oct-19	Ruang Rapat Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta		
		Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Diversifikasi Produk Pergaraman di Cirebon	30-Oct-19	30-Oct-19	Rapat di Aula Kantor Rama Shinta, Cirebon		
		Rapat Koordinasi dan Benchmarking Inovasi dan Teknologi Peningkatan Kualitas dan Penyerapan Produksi, serta Dukungan Pembangunan Industri Pengolahan Garam Rakyat	19-Nov-19	19-Nov-19	Hotel Nikko Nusa Dua, Bali		
89	Pengendalian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri	13-Mar-19	13-Mar-19	Hotel Mercure, Bandung	1. Memperpanjang kontrak kemitraan bisnis pertamina di kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika 2. Penguatan dan pengembangan bisnis baru di kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika	Pada bulan April Pertamina akan melaksanakan rapat koordinasi dengan intansi terkait tentang update potensial proyek, kendala dan rencana ke depan
		Rapat Koordinasi Update Perkembangan Kerjasama PT Pertamina (Persero) dengan Mitra Luar Negeri	14-Mar-19	14-Mar-19	Gedung Pusat Survei Geologi Bandung, Jawa Barat		
90	Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi	Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program BBM Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019	06-May-18	06-May-18	Hotel Bandara Internasional, Kota Tangerang	Masih adanya kelangkaan BBM solar di SPBU di Provinsi Kalimantan Barat	Rekomendasi pengusulan BBM khususnya solar ke Pertamina, mempunyai masa berlaku selama 1 bulan
		Rapat koordinasi monitoring progres pembangunan PLTMG 10 MW dan/atau 25 MW i Kabupaten Kepulauan Morotai	06-Feb-19	06-Feb-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Rapat koordinasi pemanfaatan gas terkompresi untuk industri dalam rangka peningkatan aksesibilitas energi	14-Feb-19	14-Feb-19	Ruang rapat Lt. 4 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH.		

			Thamrin No. 8 Jakarta
Kunjungan ke rumah kontainer dual power kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok	19-Feb-19	19-Feb-19	Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok
Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi di Kota Bontang TA 2017 Serta Evaluasi Pembangunan TA 2018	26-Feb-19	26-Feb-19	Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
Rapat koordinasi tindak lanjut pembahasan usulan penambahan alokasi BBM Solar bersubsidi untuk kapal ikan < 30 GT	08-Mar-19	08-Mar-19	Hotel Oria, Jakarta Pusat
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kemaritiman Daerah-Daerah Terdepan dan Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	14-Mar-19	14-Mar-19	Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi Kepri
Peresmian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga Kota Cirebon dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Kabupaten Cirebon oleh Menteri ESDM	21-Mar-19	21-Mar-19	Kantor Camat Harjamukti, Kota Cirebon
Rapat kordinasi pembahasan usulan penambahan alokasi BBM solar bersubsidi untuk kapal nelayan < 30 GT	27-Mar-19	27-Mar-19	Hotel Oria, Jakarta Pusat
Rapat Koordinasi Progress Pembangunan PLTMG 10 MW dan Potensi Pembangunan PLTM di Kabupaten Morotai, Maluku Utara	02-Apr-19	02-Apr-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta
Rapat Koordinasi Finalisasi Penetapan Hari Nelayan Indonesia	04-Apr-19	04-Apr-19	Hotel Royal Padjajaran, Bogor
Rapat Koordinasi pembahasan langkah-langkah percepatan pemenuhan BBM dan pemulihan lingkungan dan masyarakat pasca bencana alam Kabupaten Manggarai Barat	09-Apr-19	09-Apr-19	Hotel Aryaduta Jakarta
Verifikasi Lapangan Kuota BBM Nelayan dan Petani : Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	10-Apr-19	10-Apr-19	Kabupaten Pamekasan, Lampung Selatan, Pamekasan, Pandeglang, Banyuasin dan Kota Samarinda,
Menghadiri Verifikasi Lapangan terhadap usulan Kuota BBM sesuai amanat Perpres nomor 191 Tahun 2014	14-Apr-19	14-Apr-19	SPBN Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
Menghadiri Pemantauan Terpadu Pelaksanaan Uji Coba Penyaluran LPG 3 kg Tahun 2019	24-Apr-19	24-Apr-19	Pangkalan Elpigi 3 kg di Kabupaten Gunung Kidul dan Kediri
Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Penggunaan aspal Buton bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan	02-May-19	02-May-19	Ruang rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program BBM	06-May-19	06-May-19	Hotel Bandara Internasional,

		Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019	19	19	Kota Tangerang		
		Pengelolaan perikanan tangkap terpadu	21-May-19	21-May-19	Millenium Hotel, Jakarta		
		Kunjungan Supervisi Pusat Unggulan Iptek Tahun 2019 di Telimek LIPI	24-May-19	24-May-19	Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (Telimek) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kota Bandung		
		Rapat Implementasi Pelaksanaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA Tahun 2019 melalui CSR PT Cikarang Listrindo	14-Jun-19	14-Jun-19	Gedung Soemantri Brodjonegoro I, Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan		
		Rapat koordinasi tindak lanjut pelaksanaan penanganan konprehensif percepatan pemulihan kondisi sosial, ekonomi khususnya BBM, kelistrikan dan pembangunan jaringan telekomunikasi untuk mendukung investasi pergaraman, pariwisata dan pemulihan lingkungan pasca bencana di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT	18-Jun-19	18-Jun-19	Aula Ruang kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, NTT		
		Rapat Koordinasi Implementasi Keputusan BPH Migas tentang Alokasi Kuota JBT Jenis Solar untuk Konsumen Pengguna Tahun 2019	09-Jul-19	09-Jul-19	Hotel Santika BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan		
		Rapat koordinasi tindak lanjut pembangunan aksesibilitas energi bagi daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar di provinsi Kepulauan Riau	16-Jul-19	16-Jul-19	Ruang rapat Lt. 19 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Peninjauan Lapangan dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemenuhan BBM Satu Harga dan Energi Lainnya Serta Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kepulauan Mentawai	26-Aug-19	26-Aug-19	Ruang rapat Lt. 4 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Optimisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Energi dan Air, Serta Pelaksanaan Program KPPN	02-Sep-19	02-Sep-19	Hotel Sentul Bogor		
		Rapat koordinasi dan peninjauan lapangan debottlenecking kelangkaan pasokan BBM (terutama jenis minyak solar) pada SPBU di Provinsi Kalimantan Barat	06-Nov-19	06-Nov-19	Hotel Aston Pontianak		
91	Pengendalian Kebijakan Peningkatan	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) : Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta	Kondisi di lapangan masih ditemukan adanya kegagalan otentifikasi wajah dan sidik jari	Diharapkan pada tahun 2020 kebijakan Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non

Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta	karena proses rekam yang kurang baik. Penyelesaiannya dilakukan registrasi ulang untuk RTS tersebut. Adanya kegagalan tersebut, maka tingkat akurasi biometrik di aplikasi dikurangi. Akibatnya salah login (muncul foto orang lain) dan sidik jari orang lain	Tunai) layak dilanjutkan dan perlu didukung oleh pemerintah pusat (K/L terkait) dan daerah, Swasta dan masyarakat, sehingga bantuan non tunai yang diberikan tepat sasaran dan tepat waktu
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta		
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta		
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta		
	Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-18	25-Nov-18	Hotel Royal Kuningan, Jakarta		
	Hasil Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Road Test Penggunaan B30 Khusus Otomotif > 3,5 Ton	20-Feb-19	20-Feb-19	Ruang Rapat Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Jakarta Pusat		
	Diskusi Panel "Menjelajahi Potensi Riiil Pasar Energi Terbarukan (ET) Menuju Ekonomi Rendah Karbon Indonesia	28-Feb-19	28-Feb-19	Hotel Le Meridien Jakarta		
	Rapat Penyusunan TOR Flores Geothermal Island	04-Mar-19	04-Mar-19	Royal Hotel, Bogor, Jawa Barat		
	Diskusi " masukan terhadap RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) terkait tata kelola kelembagaan yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia"	05-Apr-19	05-Apr-19	Hotel four points by seraton, Jakarta		
	Hasil Workshop Sosialisasi Dokumen Pendahuluan Technology Needs Assesment (TNA) Sektor Non-Lahan	15-Apr-19	15-Apr-19	Hotel Ayana Midplaza Jakarta		
	Hasil Pelaksanaan Workshop Pengembangan Biogas Ditjen EBTKE di Bogor	30-Apr-19	30-Apr-19	The Mirah Hotel Bogor		
	Hasil Rapat Pembahasan Kesiapan Proyek Panas Bumi dalam Mendukung Kebutuhan Energi Sektor Industri Indonesia	07-May-19	07-May-19	Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Jakarta		
	Bincang Energi: Efisiensi Energi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan	28-May-19	28-May-19	Ruang rapat Lt. 4 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
	Menghadiri Peresmian Kegiatan Uji Jalan (Road Test) Penggunaan Bahan Bakar B30 Pada Kendaraan Bermesin Diesel.	13-Jun-19	13-Jun-19	Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jakarta		
	Hasil Audiensi Dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air selaku Ketua Harian Dewan Sumber	19-Jun-19	19-Jun-19	Ruang Rapat Menteri PUPR Lt 2 Gedung Utama Kementerian		

		Daya Air Nasional			PUPR, Jakarta Selatan		
		Laporan Hasil Menghadiri Diskusi Publik Background Study RPJMN 2020-2024; Topik Investasi Energi Terbarukan	18-Jul-19	18-Jul-19	Hotel Novotel Bandung		
		Rapat Penyelesaian Kendala Serah Terima PLT Aneka EBT	23-Sep-19	23-Sep-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Kunjungan Lapangan dan Audiensi Dewan SDA Nasional Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Keberlanjutan Proyek-Proyek Strategis SDA di Lombok, Nusa Tenggara Barat	18-Nov-19	18-Nov-19	Lombok Barat dan Lombok Timur		
		Hasil Focus Group Discussin Integrasi Subsidi Energi ke dalam BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) ; Topik Investasi Energi Terbarukan	25-Nov-19	25-Nov-19	Hotel Royal Kuningan, Jakarta		
92	Koordinasi Kebijakan Efisiensi dan Konservasi Energi untuk Bangunan Pemerintah	Rapat Koordinasi Kebijakan efisiensi dan Konservasi energi untuk bangunan pemerintah	28-Mar-19	28-Mar-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta	1. Pemenuhan energi untuk mendukung industri perikanan dan pengembangan produk perikanan perlu mendapat perhatian. Rasio elektrifikasi Kabupaten Mentawai masih rendah, demikian pula dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal potensi perikanan lestari Mentawai cukup tinggi. Kemenko Kemaritiman mendorong dengan menghubungkan innovator ice slurry generator untuk penyediaan kebutuhan mesin es, innovator converter kit untuk nelayan kecil, dan innovator protein ikan rucah agar tetap bernilai ekonomi tinggi. Semua inovasi ini merupakan inovasi yang mendukung efisiensi energi dan dapat diimplementasikan di daerah-daerah tanpa investasi sangat besar 2. Berdasarkan pemantauan terhadap nelayan penerima bantuan konverter kit yang telah diserahkan pemerintah, terdapat keluhan terkait ketidakcocokan dari nelayan penerima bantuan dengan	1. Penjajakan rencana kerja sama pengembangan industri perikanan antara pelaku industri perikanan dalam hal ini CV. Pacific Harvest dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dibicarakan lebih lanjut pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemenuhan Energi untuk Pengembangan Daerah Kepulauan yang akan dijadwalkan pada minggu pertama bulan September 2019 di Kabupaten Mentawai. 2. Rapat Koordinasi Pemenuhan Energi untuk Pengembangan Daerah Kepulauan akan meliputi pemenuhan energi sektor pariwisata, perhubungan, KEK Mentawai, industri lokal, BBM satu harga, SPBU, dan Energi Baru Terbarukan dengan melibatkan K/L terkait dan lingkungan Kemenko Kemaritiman khususnya berkolaborasi dalam lingkungan Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa. 3. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan mengadopsi praktek pengelolaan pariwisata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk
		Menghadiri FGD Kesiapan Pelayanan CIQP di 21 Pelabuhan Masuk dan Keluar Kapal Yacht: Pengembangan destinasi yacht dan persiapan Yacht Rally "Wonderful Sail to Indonesia 2019"	17-May-19	17-May-19	Bandara International Hotel, Kota Tangerang, Provinsi Banten		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Susunan Keanggotaan dan Program Tim Kerja Percepatan Pengembangan Konservasi dan Efisiensi Energi di Indonesia Tahun 2019	13-Jun-19	13-Jun-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritiman Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Rapat Subpokja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sebagai Model Gedung Pemerintah Hemat Energi,	05-Jul-19	05-Jul-19	Ruang rapat Deputi Bidang Koordinasi SDA Lt. 8 Kemenko Bidang Kemaritima Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta		
		Hasil Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan terkait Konservasi dan Efisiensi Energi serta Pemenuhan Energi untuk Menunjang Pembangunan Sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	07-Aug-19	07-Aug-19	Ruang Rapat Hotel Aston Banyuwangi		

						produk bantuan tersebut. Sehingga dapat dikatakan, produk bantuan ini kurang tepat sasaran	dikembangkan di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu dari 5 daerah Super Prioritas Pariwisata Nasional.
93	Pengendalian Kebijakan Pemenuhan Energi Bagi Pembangunan Kemaritiman	Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Marina di Indonesia Bagian Timur	23-Apr-19	23-Apr-19	Hotel Santika Premiere Ambon	Pengembangan marina perlu mendapat perhatian karena merupakan pengembangan ekonomi lokal dan selanjutnya berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi maritim	1. Untuk izin pembangunan marina, harus mengurus izin terminal khusus (tersus) di Kementerian Perhubungan, khususnya ke Ditjen. Perhubungan Laut dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan; 2. Penentuan suatu lokasi menjadi rute rally layar ataupun untuk rencana pembangunan marina tidak serta merta ditetapkan oleh pemerintah atau pihak tertentu. Namun membutuhkan survei yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk penetapannya; 3. Adanya pengaturan seperti peraturan presiden untuk percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang berciri kepulauan
94	Pengendalian Kebijakan Penurunan Angka Dwelling Time	FGD sehubungan dengan Kegiatan Survey Lokasi Kegiatan Alih Muat Kapal (Ship to Ship/STS) di perairan Tanjung Balai Karimun dan Perairan Nipah, serta Lay-up di Perairan Galang	15-Mar-19	15-Mar-19	Ruang Meranti, Hotel Travelodge, Batam	membahas posisi angka Dwelling Time saat ini sebagaimana sesuai dengan data yang ada pada LNSW di angka rata-rata 3.2, pengembangan SSm pengangkut, dan pembahasan implementasi Delivery Order (DO) Online dan SP2 ke sistem INSW	Disepakati bahwa untuk pengembangan dashboard dwelling time, Terminal Operator bersedia untuk mengirimkan data-data setiap hari pada pukul 08.00 kepada LNSW dalam format JSON dan dibutuhkan dasar hukum (legal) terkait pertukaran data dalam hal pembangunan system pengajuan SP2 melalui system INSW dan penyampaian release SP2 dari Terminal Operator serta TPS Lini 2 ke sistem INSW
		Workshop Penerapan DO Online di Pelabuhan	21-May-19	21-May-19	Hotel Bandara Soekarno-Hatta		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017	27-Sep-19	27-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		FGD Rencana Penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di Indonesia	01-Nov-19	01-Nov-19	Ballroom Bogor Valley Hotel		
		workshop cruise tourism mengenai "the development of Indonesia as Cruise Destination"	08-Nov-19	08-Nov-19	Pelabuhan Benoa, Bali		
		Rapat Pembahasan showcase CEISA dalam platform logistik 4.0	27-Nov-19	27-Nov-19	RR Biro Perencanaan lantai 7 Kementerian Perindustrian		
		Laporan Menghadiri Workshop Kepelabuhanan	28-Nov-19	28-Nov-19	Aston Sentul Lake Resort and Conference Center, Bogor		
95	Koordinasi Kebijakan Penerapan Indonesia Nasional Single Window (INSW)	Rakor Awal Tim Pokja Delivery Order (DO) Online	08-Aug-19	08-Aug-19	RR Lt. 2 Selatan	Proses untuk sampai SP2 masih mengalami kendala, mengingat terminal operator mempunyai sistem yang berbeda	- Kemenko Marves akan melaksanakan rakor khusus bersama Tim Business Process (INSW dan pihak terkait) untuk membahas
		FGD Persiapan Materi Blended Finance dalam Sidang ke-75 Marine Environmental Protection Committee	23-Aug-19	23-Aug-19	Hotel Novotel, Bogor		

		(MEPC) IMO					
		Pembahasan Terkait Proses Bisnis Layanan DO Online Pada Sistem INSW	28-Aug-19	28-Aug-19	RR Transparency LT. 6, Gd. Sarana Jaya 3, Jakarta		
		Rapat Koordinasi Penerapan Pelaksanaan Automatic Identification System (AIS)	30-Oct-19	30-Oct-19	Ruang Jatayu, Bandara International Hotel, Tangerang, Banten		
		Rakor Pleno IV Tim Pokja Delivery Order (DO) Online	14-Nov-19	14-Nov-19	RR Lt. 2 Selatan		
96	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Rakor dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan statutory dan mandatory yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada PT BKI	21-Jun-19	21-Jun-19	RR Deputi SDAJ It 8		mekanisme SOP sampai dengan SP2 - Kemenkeu melalui Dirjen BC akan segera menyiapkan peraturan yang akan mengatur sanksi dan mekanisme pelaksanaan untuk DO ini
		Rakor dalam rangka mendukung upaya PT BKI untuk dapat masuk dan diakui dalam anggota IACS (International Association of Classification Societies)	26-Jun-19	26-Jun-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Upaya PT. BKI untuk Menjadi Anggota IACS	05-Jul-19	05-Jul-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor Lanjutan untuk Membahas Perkembangan Penyusunan Proposal Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi dan Pelayaran Indonesia	23-Jul-19	23-Jul-19	RR Lt. 2 Utara		
		Kunjungan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Statutoria PT BKI di Kantor BKI Cabang Samarinda, Kalimantan Timur	28-Jul-19	28-Jul-19	Kantor Cabang BKI Samarinda, Kalimantan Timur		
		Workshop Penyusunan Bahan Sidang IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container ke-6	07-Aug-19	07-Aug-19	Hotel Rancamaya Bogor		
		Rapat Koordinasi I Tim Pokja BKI	30-Aug-19	30-Aug-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Sidang Sub Committee Carriage of Cargoes and Container (CCC) 6, International Maritime Organization (IMO), di Sekretariat IMO, London	07-Sep-19	07-Sep-19	London		
		Rapat Koordinasi Pleno Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia	17-Sep-19	17-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor PLeno Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia	11-Nov-19	11-Nov-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Konsultasi Publik Terkait Rencana Amandemen Pengaturan Non-Convention Vessel Standard (NCVS)	21-Nov-19	21-Nov-19	Inna Parapat Hotel, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020	04-Dec-19	04-Dec-19	Hotel Bandara Soekarno-Hatta		
97	Koordinasi Kebijakan Revitalisasi	Rapat Koordinasi tindak lanjut surat Ombudsman	07-Jan-19	07-Jan-19	RR Deputi SDAJ It 8	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi membutuhkan dokumen	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung penuh akan

Pelabuhan	Kegiatan Ekspos Program Penertiban Nasional Kawasan Bebas batam dan Pesisir Timur Sumatera dan Hasil Penindakan Impor/Ekspor	14-Jan-19	14-Jan-19	Pelabuhan Batu Ampar, Batam	resmi secara tertulis yang berisi potensi-potensi dan kapasitas pelabuhan di pelabuhan Merak Mas yang disampaikan kepada pihak Port Klang Malaysia sebagai acuan jika ada pihak-pihak lain yang ingin berinvestasi di Pelabuhan Merak Mas.	kerjasama ini
	Menghadiri Kegiatan Musyawarah Nasional dan Gathering Anggota APJP Indonesia di Sentul, Bogor	17-Jan-19	17-Jan-19	Darmawan Park Sentul-Bogor		
	Laporan Terkait Permasalahan Lamanya Antrean Kapal untuk Bongkar Muat di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar	24-Jan-19	24-Jan-19	Makassar New Port		
	Rapat Koordinasi Terkait Lego Jangkar	27-Feb-19	27-Feb-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Terkait Revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (supply chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara	04-Mar-19	04-Mar-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Pembahasan Rencana Pembangunan Pelabuhan di Perairan Natuna dan Jasa Konsultan yang Akan Dilibatkan	18-Mar-19	18-Mar-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Akses Ekspor Impor di Pelabuhan Banten	25-Mar-19	25-Mar-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Persiapan FGD Penerapan Aplikasi Delivery Order (DO) Online	09-Apr-19	09-Apr-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor pelaksanaan delivery order online (DO Online) di pelabuhan dan rencana pengembangan national logistic ecosystem	03-Jul-19	03-Jul-19	RR Lt. 21 Gd. Kemenko Bidang Kemaritiman		
	Rakor Update Penetapan Lokasi Lego Jangkar di Perairan Batam dan Sekitarnya	15-Jul-19	15-Jul-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Terkait Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 tahun 2017 dan PM 80 Tahun 2017	23-Jul-19	23-Jul-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rakor Audiensi dan Fasilitasi Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp Paper Tbk	15-Aug-19	15-Aug-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rapat Koordinasi Audiensi Pihak Port Klang Malaysia (Westports dan Northports)	19-Aug-19	19-Aug-19	RR Lt. 2 Selatan		
	Rapat Koordinasi Pleno II Tim Pokja Delivery Order (DO) Online	06-Sep-19	06-Sep-19	RR Lt. 2 Selatan		
	Rapat Koordinasi Tim Kecil Pokja Delivery Order (DO) Online	26-Sep-19	26-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Mengoptimalkan Non-Convention Vessel Standard (NCVS) Dalam Pelaksanaan Klasifikasi Kapal-Kapal Tradisional dan Wisata	26-Sep-19	26-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
	Rapat Koordinasi Pleno III Tim Pokja Delivery Order (DO) Online	01-Oct-19	01-Oct-19	RR Lt. 2 Selatan		
Kegiatan Meeting and Visit the Port Klang, Malaysia	27-Nov-	27-Nov-	Port Klang, Malaysia			

		comprising of Northport, Westports, and also Port Klang Authority	19	19	(Westports dan Northport)		
98	Koordinasi Kebijakan Kemudahan Kunjungan Wisatawan ke Indonesia	Rakor RPerpres tentang BOP Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi	09-Jan-19	09-Jan-19	RR Deputi SDAJ It 8		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat ikut berpartisipasi kembali pada Pasar Raya Indonesia 2020
		Rakor Rencana Penenggelaman Kapal-kapal Perang Ex TNI-AL menjadi Destinasi Wisata Selam	17-Jan-19	17-Jan-19	RR Lt. 2 Selatan		
		Rakor lanjutan Rencana Penenggelaman Kapal-kapal Perang Ex TNI-AL menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum	29-Jan-19	29-Jan-19	RR Lt. 2 Selatan		
		Rapar Koordinasi Seatrade Criuse Global 2019	14-Feb-19	14-Feb-19	Kementerian Pariwisata		
		Menghadiri kegiatan Seatrade Cruise Global (SCG) 2019	08-Apr-19	08-Apr-19	Miami, FLorid, USA		
		Rakor Tindak Lanjut Permohonan Mr. Michael Leppert (Dokter Gigi Jerman) Perihal Dukungan Lisensi Praktek Dokter Gigi Dalam Kegiatan Wonderful Sail 2 Indonesia	15-Apr-19	15-Apr-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		FGD Kesiapan Pelayanan CIQP di 21 Pelabuhan Merak dan Keluar Kapal Yacht	17-May-19	17-May-19	Hotel Bandara Soekarno-Hatta		
		Rapat Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi RPP PPN BM Kendaraan Bermotor	08-Jul-19	08-Jul-19	Sekjen Kementerian Hukum dan HAM		
		Rakor Percepatan Pengembangan Pariwisata Danau Toba	11-Jul-19	11-Jul-19	Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara		
		Pertemuan dengan Vishnu Investment Group dengan Desa Adat Intaran, Bali	12-Aug-19	12-Aug-19	Gedung Rapat madu Sedana		
		perjalanan dinas partisipasi pada "Cruise 360 CLIA 2019" di Sydney, Australia	28-Aug-19	28-Aug-19	Sydney, Australia		
Partisipasi pada Pasar Indonesia Raya (Pandora 2019), Rijswijk, Belanda	13-Sep-19	13-Sep-19	Rijswijk, Belanda				
99	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata	Rapat Koordinasi Persiapan Launching Buku Si Juki Jalan-jalan Nusantara Edisi Belitung	19-Feb-19	19-Feb-19	RR Deputi SDAJ It 8	Pemanfaatan eks KRI TNI AL menjadi destinasi wisata selam dan museum tidak dapat dilanjutkan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar segera menyiapkan surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut perihal hasil rapat ini
		Rakor Lanjutan Persiapan Launching Buku Si Juki Jalan-jalan Nusantara Edisi Belitung	21-Feb-19	21-Feb-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor Percepatan Pembangunan Kemaritiman (Rencana Pembangunan Marina) di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Kabupaten karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas	14-Mar-19	14-Mar-19	Aston Batam Hotel & Residence		
		Rakor Persiapan Survei Si Juki Jalan-jalan Nusantara Edisi Bromo-Tengger-Semeru	20-Mar-19	20-Mar-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor Pengembangan Marina di Indonesia Bagian Timur	23-Apr-19	23-Apr-19	Hotel Santika Premier Ambon		
		Rakor Tindak Lanjut Rencana Penenggelaman Kapal	03-May-19	03-May-19	RR Deputi SDAJ It 8		

		Perang Ex TNI-AL menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum	19	19			
		Dalam rangka menghadiri undangan presentasi pariwisata bahari (presentation on cruising into Indonesia) di Middle Harbour Yacht Club (MHYC), Sydney, Australia	18-Jun-19	18-Jun-19	Sydney, Australia		
		Rakor Pembahasan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Kawasan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	31-Jul-19	31-Jul-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rapat Perencanaan Ruang Memorabilia Akademi Militer Yogya di SMA BOPKRI-Yogyakarta	08-Aug-19	08-Aug-19	Akademi Militer Yogya di SMA BOPKRI-Yogyakarta		
		Kegiatan Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tumpang dan sekitarnya)	14-Aug-19	14-Aug-19	Malang		
		Rapat Koordinasi Persiapan Survey Si Juki Petualangan di Mandalika	19-Sep-19	19-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Kegiatan Survei Si Juki Petualangan di Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat	26-Sep-19	26-Sep-19	Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat		
		Rapat Rencana Pemanfaatan eks KRI untuk Destinasi Wisata Selam dan Museum Maritim	30-Oct-19	30-Oct-19	Markas Besar TNI AL		
		Rakor Pembahasan Lahan Otoritatif BOP Labuan Bajo Flores	14-Nov-19	14-Nov-19	RR Lt. 2 Utara		
		Rapat Koordinasi Permasalahan Investasi PT Joben Evergreen di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	19-Nov-19	19-Nov-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemanfaatan Eks KRI TNI AL Menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum	25-Nov-19	25-Nov-19	RR Lt. 2 Selatan		
100	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Marina	Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Kawasan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	25-Sep-19	25-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8	Pemerintah Provinsi kiranya dapat segera menginisiasi rapat internal di daerah antara investor, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Denpasar serta Desa Adat terkait membahas rencana investasi dimaksud	Apabila diperlukan rapat koordinasi lanjutan setelah pertemuan para pihak di Provinsi Bali maka akan diadakan rapat koordinasi lanjutan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
		Rapat Koordinasi Rencana Investasi dan Pembangunan Marina Diamond Sanur	10-Oct-19	10-Oct-19	Prime Plaza Hotel, Denpasar, Provinsi Bali		
101	Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional	Rakor Tindak Lanjut BSSE sebagai Salah Satu Priority Seascape dalam SOM-14 dan MM-7 CTI-CFF di Manila	17-Jan-19	17-Jan-19	RR Deputi SDAJ It 8	integrasi RZ dan RTR dan menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai pilot project	progres integrasi RTR dan RZ KSN Komodo telah memasuki drafting pasal per pasal dan akan dilanjutkan pada rapat lanjutan di Kementerian Hukum dan HAM
		Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Nasional Gerbang Kertasusila	07-Feb-19	07-Feb-19	RR A, Lt.4, Gd. Ditjen PP, Kementerian Hukum dan HAM		
		Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden RI tentang RZ Kawasan Strategis Nasional Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan	14-Feb-19	14-Feb-19	RR Dharmawanita, Lt.1, Gd. Ditjen PP, Kementerian Hukum dan HAM		

Rapat koordinasi Rencana Zonasi	18-Feb-19	18-Feb-19	RR Baronang Lt.1 GMB III, KKP
Rakor Ketentuan Terkait Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asung Yang Melakukan Kerja Sama Kemitraan dengan K/L di Indonesia Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing	20-Feb-19	20-Feb-19	RR Deputi SDAJ It 8
Kunjungan Terkait Kerja Sama dengan PT Elex Media Komputindo	08-Mar-19	08-Mar-19	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Rakor Tindak Lanjut tentang Pengaturan Sektor Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna	11-Mar-19	11-Mar-19	RR Lt. 2 Utara
Rakor Tindak Lanjut Surat Bupati Belitung Terkait Pendelegasian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	11-Mar-19	11-Mar-19	RR Lt. 2 Utara
Workshop Pengembangan Coral Reef Garden Nusa Dua	21-Mar-19	21-Mar-19	Command Center Lt.1 ITDC Nusa Dua Bali
Rakor Lanjutan Pembahasan Usulan Draf Proposal atau Projec Identification Form (PIF) yang akan disampaikan kepada GEF 7 untuk BSSE	27-Mar-19	27-Mar-19	RR Deputi SDAJ It 8
Rakor Tim Efektif dan Rencana Proyek Perubahan	01-Apr-19	01-Apr-19	RR Deputi SDAJ It 8
Menghadiri kegiatan Konsultasi Publik I - Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan antarwilayah (RZ KAW) Laut Maluku	04-Apr-19	04-Apr-19	Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara
Undangan Konsultasi Publik I - Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores	08-Apr-19	08-Apr-19	Hotel Aston Kupang
Rakor Lanjutan Tentang Pengaturan Sektor Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna	09-Apr-19	09-Apr-19	RR Deputi SDAJ It 8
Rakor Integrasi Peraturan Presiden untuk RTR dan RZKSN kawasan Taman Nasional Komodo	10-Apr-19	10-Apr-19	RR Lt. 21 Gd. Kemenko Bidang Kemaritiman
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden	11-Apr-19	11-Apr-19	RR Legiprudensi, Kemnkm dan HAM
Rapat Persiapan Penyusunan Konsep Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Karakteristik Kewilayahan	07-May-19	07-May-19	RR Deputi SDAJ It 8
Rakor Penyelesaian, Penyerasian, dan Penyeimbangan Substansi Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN)	13-May-19	13-May-19	RR Deputi SDAJ It 8
Rakor Pengembangan Perizinan dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pasca Terbitnya Perda RZWP3K	20-May-19	20-May-19	Hotel Bandara Soekarno-Hatta
FGD Draft Zero CTI-CFF RPOA 2.0	21-May-19	21-May-19	Hotel Grand Savero Bogor

	19	19	
Rakor Percepatan Penyelesaian Aturan Turunan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Khususnya yang terkait dengan Perencanaan Ruang Laut dan Upaya Harmonisasi dengan Perencanaan Ruang Darat	28-May-19	28-May-19	RR Lt. 2 Selatan
Rakor Pembahasan Lanjutan Evaluasi Kebijakan Satu Peta Untuk Peta Tematik Bidang Kemaritiman	12-Jun-19	12-Jun-19	Hotel Sari Pasific Jakarta
FGD Kesepakatan Peta Dasar untuk Wilayah Laut	13-Jun-19	13-Jun-19	RR Deputi SDAJ It 8
Kegiatan Launching Buku Fiksi dan Non Fiksi	21-Jun-19	21-Jun-19	RR Lt. 19, Kemenko Bidang Kemaritiman
Rapat Kesepakatan Walodata IGT Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	24-Jun-19	24-Jun-19	RR Deputi SDAJ It 8
kegiatan Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Selat Sunda	11-Jul-19	11-Jul-19	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Serang, Banten
Rakor untuk Mendapatkan Masukan Terkait Permasalahan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	12-Jul-19	12-Jul-19	Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
Rakor tentang pengaturan sektor tata ruang dan perikanan di perairan Natuna	16-Jul-19	16-Jul-19	RR Deputi SDAJ It 8
FGD Persiapan Konsultasi Publik I Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Pariwisata Wakatobi	16-Jul-19	16-Jul-19	RR Mandalika, gd Kementerian ATR/BPN
Rakor Finalisasi SOP Penyelesaian Illegal Oil Spill dan Dampak Tumpahan Minyak terhadap Kegiatan Pariwisata di Kepulauan Riau	22-Jul-19	22-Jul-19	Gd. Graha Kepri Lt.5, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Rapat Final Persiapan APEC Oceans and Fisheries Working Group (OFWG)-13 2019, Chile	15-Aug-19	15-Aug-19	RR Deputi SDAJ It 8
Rapat Koordinasi Progres Penetapan Peraturan Perundang-undangan di Kawasan Strategis	15-Aug-19	15-Aug-19	Royal Padjajaran Hotel Bogor
Rapat Koordinasi Pokja Bentang Laut	16-Aug-19	16-Aug-19	RR Deputi SDAJ It 8
Kegiatan Menghadiri Pertemuan OFWG APEC	20-Aug-19	20-Aug-19	Hotel Bellavista, Puerto Varas, Chile
FGD Persiapan Konsultasi Publik 2 Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Sekitar Kawasan Pariwisata Wakatobi	06-Sep-19	06-Sep-19	Ambhara Hotel, Jakarta Selatan
Festival Tabut Bengkulu 2019	08-Sep-19	08-Sep-19	Bengkulu
Rapat Pembahasan Dokumen Final RZ KAW Selat Malaka	10-Sep-19	10-Sep-19	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Rapat Koordinasi Penyelesaian Peta Tematik Bidang Kemaritiman	18-Sep-19	18-Sep-19	Millenium Hotel Sirih Jakarta

		Rapat Koordinasi Lanjutan Project identification Form (PIF) BSSE	19-Sep-19	19-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Koordinasi Penjajakan Awal Dengan Pihak Kampus IPB untuk Rencana Penyelenggaraan FGD RZKSNT dan RZKSN	20-Sep-19	20-Sep-19	Ruang Diskusi MSP, Kampus IPB, Bogor, Jawa Barat		
		Rapat Koordinasi Lanjutan Project identification Form (PIF) BSSE	25-Sep-19	25-Sep-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Konsultasi Publik RZ KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita	01-Oct-19	01-Oct-19	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali		
		FGD RZ Kawasan Antarwilayah Laut Flores dan Diseminasi Rancangan Peraturan Presiden RZ KSN Taman Nasional Komodo	03-Oct-19	03-Oct-19	Hotel Bintang Flores, NTT		
		Rapat Kelompok Kerja Bentang Laut CTI-CFF Indonesia	11-Oct-19	11-Oct-19	Whiz Prime Hotel, Bogor		
		Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZKAW Laut Natuna dan Natuna Utara	15-Oct-19	15-Oct-19	Pranaya Boutique Hotel, BSD		
		Rapat Koordinasi Tim Kecil	15-Oct-19	15-Oct-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Rakor dan Konsultasi Tematik Dokumen RZ KSN Tahun 2019	28-Oct-19	28-Oct-19	Gd. GMB I, KKP		
		Laporan Deliri mengenai hasil the 15th Pre-Senior Officials Meeting (Pre-SOM 15) dan the 15th CTI-CFF Senior Officials Meeting (SOM 15), di Honiara, Kepulauan Solomon	04-Nov-19	04-Nov-19	Heritage Park Hotel, Honiara, Kepulauan Solomon		
		Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN)	18-Nov-19	18-Nov-19	RR Lt. 2 Utara		
		Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rencana Zonasi Teluk Tomini	19-Nov-19	19-Nov-19	Ashley Hotel Jakarta		
		Site Visit dan Deseminasi Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	28-Nov-19	28-Nov-19	Kabupaten Raja Ampat dan Swiss-Belhotel International Hotels & Resort Sorong		
		Rakor Pembahasan Izin Lokasi Tailing dan Migas serta Hasil Keruk Pelabuhan	02-Dec-19	02-Dec-19	RR Deputi SDAJ It 8		
		Konsinyering Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan Substansi Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN)	09-Dec-19	09-Dec-19	Hotel Akmani Jakarta		
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Terakit Pemanfaatan Ruang Laut	FGD Pokja Bentang Laut CTI-CFF	30-Jan-19	30-Jan-19	RR Lt. 2 Utara	Rapat persiapan membahas tentang peluang untuk ekspansi keanggotaan serta mitra dan donor untuk CTI-CFF dan ICRI karena	Perlu diadakannya rapat tim kecil untuk membahas tentang persiapan side event dan strategi komunikasi AIS Forum 2019.
		Rapat Koordinasi Kadaster Kelautan	15-Feb-19	15-Feb-19	RR Cakalang, Lt.1 GMB III, KKP		

		Rapat Pendelegasian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Terkait Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Belitung	25-Mar-19	25-Mar-19	RR Dit SUPD II, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri	Sidang Kedua Tingkat Menteri dan Startup and Business Summit AIS Forum 2019 akan dihadiri oleh perwakilan dari 47 negara pulau/kepulauan dan para investor.	
		Rapat Persiapan Side Event dan Pameran yang Diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Penyelenggaraan AIS Forum 2019 di Manado pada 30 Oktober-1 November 2019	10-Sep-19	10-Sep-19	RR Ditjen PRL Lantai 11, Gedung Mina Bahari III, KKP		
103	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan World Mangrove Centre di Indonesia	21-Jan-19	21-Jan-19	Kyriad Airport Hotel Jakarta	Permasalahan adalah: a. Diperlukan keinginan yang serius dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan penyusunan ranpermen baku mutu sedimen; b. Diperlukan koordinasi lintas stakeholders dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam rencana penyusunan rapermen baku mutu sedimen.	Rekomendasi rapat adalah: a. Kemenko Bidang Kemaritiman akan membantu memfasilitasi tahapan-tahapan dalam rencana penyusunan ranpermen baku mutu sedimen; b. Kemenko Bidang Kemaritiman bersama stakeholders terkait akan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyusunan ranpermen baku mutu sedimen nantinya.
		rapat koordinasi rencana penempatan BMKT di Museum Maritim Pelindo II Jakarta Utara	23-Jan-19	23-Jan-19	Museum Maritim, Pelindo II		
		Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Kebijakan Teknologi yang Efektif dan Efisien dalam Pengelolaan Limbah Di Kawasan Pesisir	04-Mar-19	04-Mar-19	Hotel Savero Depok		
		Rapat Koordinasi Implementasi Program Green Port di Indonesia	09-Apr-19	09-Apr-19	Ruang Rapat Lantai 2 Utara, Kemenko Maritim		
		Workshop pengelolaan radio aktif dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir	20-Jun-19	20-Jun-19	Hotel Salak Pajajaran, Bogor		
		Peluncuran Peta Jalan (Road Map) Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir dan 2019 Annual Meeting of the International Gescience Programme on Impact, Mechanism, Monitoring of Land subsidence in Coastal Cities (IM2LSC)	19-Sep-19	19-Sep-19	Hotel Aston Pluit, Jakarta Utara		
		Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Kebijakan Teknologi yang Efektif dan Efisien dalam Pengelolaan Limbah di Kawasan Pesisir	03-Oct-19	03-Oct-19	RR Lantai 5		
		Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tim Indonesia Mangrove Society (IMS)	21-Oct-19	21-Oct-19	Hotel Savero Bogor		
		FGD Urgensi Penyusunan Pedoman Kualitas Sedimen Laut di kawasan pesisir Indonesia	12-Nov-19	12-Nov-19	Hotel Grand Savero Bogor		
104	Koordinasi Kebijakan BMKT dan Pengembangan Museum/Wisata Shipwerck	kunjungan ke Museum Maritim Pelindo II Jakarta Utara	14-Jan-19	14-Jan-19	Museum Maritim, Pelindo II	Permasalahan adalah: a. Indonesia selalu berupaya mengelola kapal karam (shipwreck) dan BMKT nya namun keterbatasan Kementerian terkait dan Pemda, sehingga dilakukan secara bertahap; b. Promosi terus dilakukan agar dapat meningkatkan daya Tarik wisatawan daari luar negeri namun fasilitas brosur, peralatan diving dan guide tour masih sangat sedikit dan terbatas.	Rekomendasi adalah: a. Kemenko Bidang Kemaritiman dan perwakilan Pelindo 2 telah mengunjungi rencana pengembangan gallery dan museum BMKT di Kabupaten Belitung sehingga akan ditindaklanjuti berupa kerjasama dan bantuan dari Pelindo 2 Jakarta; b. Kemenko Bidang Kemaritiman dan investasi akan terus berkolaborasi dengan negara lain dalam pengembangan dan promosi museum/gallery BMKT di Indonesia.
		Rapat Rencana Penyelamatan/pengangkatan BMKT dan Pengembangan Museum Maritim	17-Jan-19	17-Jan-19	Kantor Bupati Belitung		
		Kunjungan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	01-Feb-19	01-Feb-19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Wisata BMKT Terpadu dan Kawasan Konservasi Perairan	18-Sep-19	18-Sep-19	Kantor Bupati Kabupaten Karawang		
		Forum UNESCO on Safeguarding and Reviving the Shared Maritime Cultural Heritage of Southeast Asia dan kunjungan lapangan di Kabupaten Belitung	07-Nov-19	07-Nov-19	Hotel Fairfield Marriot Kabupaten Belitung		

105	Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu	Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Dokumen dan Ranperda RZWP3K Prov. Kepri	05-Apr-19	05-Apr-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Adanya permohonan rekomendasi bebas tambang di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rekomendasi rapat adalah: a. Kemenko Bidang Kemaritiman akan membantu memfasilitasi koordinasi pengembangan pemanfaatan kawasan pesisir yang ramah lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung; b. Kemenko Bidang Kemaritiman akan mendorong penyelesaian permasalahan pemanfaatan pariwisata di kawasan rencana KEK Sungailiat.
		Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Lapangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta	25-Apr-19	25-Apr-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Kesepakatan Dokumen RZWP3K Provinsi berbatasan	25-Apr-19	25-Apr-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Tindak Lanjut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi DKI Jakarta	16-May-19	16-May-19	Kawasan Pesisir DKI Jakarta		
		Rakor Pengembangan Perizinan dan Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pasca Terbitnya Peraturan Daerah RZWP3K	20-May-19	20-May-19	Bandara International Hotel		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan RZWP3K Provinsi DKI Jakarta	21-Jun-19	21-Jun-19	RR Lantai 8		
		Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok	08-Jul-19	08-Jul-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Kesesuaian Tata Ruang Laut	13-Aug-19	13-Aug-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut terkait Rencana Pembangunan Darmaga di Ancol	14-Aug-19	14-Aug-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		International Conference on Mangroves and Its Related Ecosystem (ICOMIRE) 2019	20-Aug-19	20-Aug-19	Hotel Java Heritage Purwokerto		
		Rapat Koordinasi Tindaklanjuti Rakor Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Industri Pulau Rempang, Kepulauan Riau	29-Aug-19	29-Aug-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Hak Keperdataan Status Tanah HPL PT. Krakatau Steel di Lahan Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia	04-Sep-19	04-Sep-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
Rapat Koordinasi Permohonan Rekomendasi Bebas Tambang Di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat Dalam RZWP3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-Nov-19	11-Nov-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman				
106	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim	Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami	11-Jan-19	11-Jan-19	Ruang Rapat Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Untuk menertibkan bahan-bahan baku yang tercampur dengan sampah plastik	Tindak lanjut dari rapat ini adalah menyiapkan naskah press release yang selanjutnya disampaikan ke menteri-menteri terkait.
		Rapat Koordinasi Finalisasi Usulan Anggaran Penguatan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami	28-Jan-19	28-Jan-19	Ruang Rapat Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		

		Diskusi Draft Peta Jalan (Road Map) Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir	18-Mar-19	18-Mar-19	Wetlands International Indonesia,		
		Kunjungan Lapangan ke Lokasi Subsiden Tanah di Kawasan Pesisir di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Pekalongan	01-Apr-19	01-Apr-19	Demak, Semarang, dan Pekalongan		
		Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Menggunakan Struktur Hybrid Engineering dan Alat Penahan Ombak Lainnya	01-Apr-19	01-Apr-19	Universitas Diponegoro, Semarang		
		Rapat Koordinasi terkait Penanganan Importasi Sampah	15-May-19	15-May-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Peninjauan Lapangan Terkait Importasi Sampah Plastik	13-Jun-19	13-Jun-19	Pelabuhan Kontainer Kota Batam		
		Rapat Koordinasi Persiapan Press Release dan Status Revisi Permendag No. 31 Tahun 2016	11-Jul-19	11-Jul-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
107	Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim	Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Abrasi di Daerah Perbatasan	11-Apr-19	11-Apr-19	Aula Pertemuan Kantor Bupati Kepulauan Meranti	Memeriksa sisa pertanggungjawaban kegiatan, pelaporan keuangan, dan laporan indikator kinerja unit serta indikator kinerja individu setiap staf pada triwulan yang terakhir di tiap-tiap bidang	Menyelesaikan masalah keuangan dan laporan kinerja keasdepan Lingkungan dan Kebencanaan Maritim segera mungkin
		Upaya Tindaklanjuti Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Pemulihan Kawasan Pesisir dan Laut di Pulau-Pulau Perbatasan di Wilayah Provinsi Riau	29-Apr-19	29-Apr-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera	02-May-19	02-May-19	Ruang Rapat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat		
		Persiapan Rakor Tingkat Menteri dalam Upaya Percepatan Pemulihan Kawasan Pesisir dan Laut di Pulau-Pulau Perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau	28-May-19	28-May-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Persiapan Rakor Tingkat Menteri dalam Upaya Percepatan Pemulihan Kawasan Pesisir dan Laut di Pulau-pulau Perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau	11-Jun-19	11-Jun-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Persiapan Peninjauan Lapangan	01-Jul-19	01-Jul-19	RR Lantai 21, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan	04-Jul-19	04-Jul-19	Kab. Bengkalis, Prov. Riau		
		Focus Group Discussion Rencana Penanganan Abrasi di Kab. Bengkalis dan Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau	12-Jul-19	12-Jul-19	RR Kenangan Lantai II, Setda Pekanbaru		
		Rapat Koordinasi dalam rangka upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di Pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau	16-Jul-19	16-Jul-19	RR Lantai 2 Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		

		Rapat tindaklanjut penanganan abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis	19-Jul-19	19-Jul-19	RR Setda Pemprov Riau		
		Rapat Koordinasi dalam rangka upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di Pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau	25-Jul-19	25-Jul-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Persiapan Santiago Climate Change Conference (COP25/ CMP15/ CMA2, SBSTA51, SBI51)	30-Aug-19	30-Aug-19	RR Lantai 21, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi dalam Upaya Percepatan Pemulihan Kawasan Pesisir dan Laut di Pulau-Pulau Perbatasan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau	04-Oct-19	04-Oct-19	RR Lantai 2 Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Mangrove	09-Oct-19	09-Oct-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Persiapan Partisipasi pada Kegiatan Side Event dan Pavilion Indonesia di Santiago Climate Change Conference (COP25/ CMP15/ CMA2, SBSTA51, SBI51)	14-Oct-19	14-Oct-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Persiapan Partisipasi pada Kegiatan Side Event dan Pavillion Indonesia di Santiago Climate Change Coference (COP25/CMP15/CMA2, SBSTA51, SBI51)	28-Oct-19	28-Oct-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Persiapan Partisipasi pada Kegiatan Paviliun Indonesia di COP25 Madrid	06-Nov-19	06-Nov-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi Sumatera Utara	13-Nov-19	13-Nov-19	Provinsi Sumatera Utara		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Target Aksi Mitigasi dan Sistem Pelaporan Mangrove Kesehatan Laut Indonesia	03-Dec-19	03-Dec-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Internal Lingkup Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	06-Dec-19	06-Dec-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
108	Koordinasi Upaya Pengendalian Kebijakan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia	Rapat Koordinasi Persiapan Workshop Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia	16-Sep-19	16-Sep-19	Arch Hotel Bogor	Untuk mendapatkan 1 indeks yang terintegrasi agar tidak terdapat double calculating	Tindak lanjut dari kegiatan ini, antara lain: a. Koordinasi dan verifikasi dengan kementerian dan lembaga yang berperan sebagai wali data. b. Sosialisasi parameter Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) per regional di Indonesia.
		Rapat Koordinasi Internal Tim Kerja Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia	04-Oct-19	04-Oct-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Workshop Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia	16-Oct-19	16-Oct-19	Hotel Royal Juada Bogor		
109	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif dan Mensejahterakan	02-May-19	02-May-19	The Pade Dive Hotel, Sabang, Aceh	Permasalahan pengelolaan kawasan konservasi di Region Timur	diharapkan agar Kementerian/Lembaga terkait, DKP Provinsi, Kabupaten/Kota

	yang Mensejahterakan Rakyat	Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan kunjungan lapangan terkait pengelolaan kawasan konservasi efektif dan pengembangan BMKT sebagai koleksi negaradalam upaya memajukan museum dan industri wisata bahari di Indonesia	25-Jul-19	25-Jul-19	Hotel Maqna Gorontalo		menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Fasilitasi Kawasan Konservasi di Region Timur
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kerusakan Lingkungan di Kampung Parbulu, Sumatera Utara	26-Sep-19	26-Sep-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pertambangan Liar oleh Masyarakat di Pulau Buru	26-Sep-19	26-Sep-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2019	06-Nov-19	06-Nov-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Fasilitasi Kawasan Konservasi di Region Timur	13-Nov-19	13-Nov-19	Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara		
110	Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Tim Nasional dan Membangun Tim Daerah	Rapat Koordinasi Finalisasi Masukan Laporan KNKT tentang Kecelakaan Kapal Ever Judger	31-Jan-19	31-Jan-19	Ruang Rapat Lantai 8, kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Penanggulangan Tumpahan Minyak di Batam dan Kesiapan Menghadapi Musim Utara	- Tumpahan minyak di Kec. Belakang Padang sudah berhasil dibersihkan menggunakan Oil Spill Dispersant sebanyak 125 L yang merupakan bantuan dari Pertamina Sambu, kondisi di Kec. Belakang Padang secara umum sudah bersih namun masih ada sisa tumpahan minyak yang menempel di tiang-tiang rumah panggung warga, dan di daerah yang sulit dijangkau. - Data yang diperoleh tim kecil dalam persiapan menghadapi angin musim utara akan diolah dan segera diberikan laporan kepada Guskamla untuk ditindaklanjuti.
		Rapat Evaluasi Pengendalian Pencemaran Tumpahan Minyak di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	28-Mar-19	28-Mar-19	Hotel CK Tanjungpinang		
		Rapat Koordinasi Penyusunan SOP Penyelesaian Illegal Oil Spill di Kepulauan Riau	25-Apr-19	25-Apr-19	Hotel Golden Tulip Essential, Tangerang		
		Rapat Koordinasi Finalisasi SOP Penyelesaian Illegal Oil Spill di Kepulauan Riau	03-Jul-19	03-Jul-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Finalisasi SOP Penyelesaian Illegal Oil Spill dan dampak tumpahan minyak terhadap kegiatan pariwisata di Kepulauan Riau	22-Jul-19	22-Jul-19	Gedung Graha Kepri, Kota Batam		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak dan Gas Bumi Ajungan Lepas Pantai di Wilayah Kerja Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di Karawang	12-Aug-19	12-Aug-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Tindak lanjut pasca penutupan sumur pada anjungan lepas pantai yang bocor di wilayah kerja Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di Karawang	14-Oct-19	14-Oct-19	RR Lantai 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Tindakanlanjut Rekomendasi Segera Investigasi Kecelakaan Hilang Kontak MV. Nur Allya (IMO 9245237)	15-Oct-19	15-Oct-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Kunjungan dalam rangka peninjauan Terhadap Puskodal Penanganan Tumpahan Minyak Pertamina dan Peninjauan Lapangan	29-Oct-19	29-Oct-19	Kabupaten Karawang		

		Rapat Koordinasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Batam dan Kesiapan Menghadapi Musim Utara	25-Nov-19	25-Nov-19	RR Lantai 2 Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
111	Pengendalian Implementasi Kebijakan Pencemaran Limbah di Laut	Rapat Koordinasi Implementasi Konsep Green Port dan Kunjungan Lapangan	27-Feb-19	27-Feb-19	Kantor Pusat Produksi Pupuk Kaltim	Melaksanakan Finalisasi Penilaian Capaian Green Port oleh Dewan Pertimbangan Green Port dalam memberikan tanggapan terhadap hasil assessment Green Port dari setiap pelabuhan yang telah dinilai	Menyerahkan Sertifikat Green Port pada Pelabuhan yang telah dinilai sesuai dengan masukan dewan pertimbangan pada saat Rapat
		Rapat Koordinasi Pengelolaan Pasca Tambang di Indonesia	09-Apr-19	09-Apr-19	Ruang Rapat Lantai 2 Utara, Kemenko Maritim		
		Rapat Koordinasi Program Green Port di Indonesia	30-Apr-19	30-Apr-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Kesiapan Penerapan Kebijakan Batasan Kandungan Sulfur 0,5% pada Bahan Bakar sebagai Tindak Lanjut Sidang MEPC-74 di IMO London	29-May-19	29-May-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Program Green Port di Indonesia	29-May-19	29-May-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Finalisasi Kriteria Program Greenport	04-Jul-19	04-Jul-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi Persiapan MoU dan Rencana Pelaksanaan Penilaian Program Green Port	29-Jul-19	29-Jul-19	RR Lantai 8, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
		Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Tim Teknis Green Port Guna Membahas Tata Cara Penilaian dan Rencana Pelaksanaan Penilaian di Pelindo I, II, III, dan IV serta Pelabuhan Khusus	08-Aug-19	08-Aug-19	Hotel Salak Heritage, Bogor		
		Kunjungan dalam rangka penilaian atas pelabuhan Belawan dalam pelaksanaan Program Green Port dan acara Penanaman Mangrove	20-Aug-19	20-Aug-19	BICT, PPS Belawan, Sumatera Utara		
		Pelaksanaan Program Green Port di Pelabuhan Tanjung Priok	03-Sep-19	03-Sep-19	Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok		
		Kunjungan dalam Rangka Penilaian Atas Pelabuhan di Pelindo III dalam pelaksanaan Program Green Port dan acara penanaman Mangrove	16-Sep-19	16-Sep-19	Terminal Peti Kemas, Semarang		
		Kunjungan dalam Rangka Penilaian Atas Pelabuhan di Pelindo III dalam pelaksanaan Program Green Port dan acara penanaman Mangrove	17-Sep-19	17-Sep-19	Terminal Jamrud Tanjung Perak, Surabaya		
		Kunjungan dalam Rangka Penilaian Atas Pelabuhan di Pelindo III dalam pelaksanaan Program Green Port dan acara penanaman Mangrove	24-Sep-19	24-Sep-19	Terminal Teluk Lamong, Surabaya		
Kunjungan dalam Rangka Penilaian Atas Pelabuhan di Pelindo IV dalam pelaksanaan Program Green Port	08-Oct-19	08-Oct-19	Terminal Peti Kemas Makassar dan Terminal Cabang Makassar				

	Rapat Koordinasi Kesiapan Penerapan Kebijakan Batasan Kandungan Sulfur 0,5% pada Bahan Bakar sebagai Tindak Lanjut Sidang MEPC-74 di IMO London	15-Oct-19	15-Oct-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	
	Kunjungan dalam rangka penilaian atas Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera dalam Pelaksanaan Program Green Port dan Acara Penanaman Mangrove	30-Oct-19	30-Oct-19	Terminal Umum PT Krakatau Bandar Samudera	
	Rapat Koordinasi Persiapan Finalisasi Penilaian Capaian Green Port	26-Nov-19	26-Nov-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	
	Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Capaian Green Port	28-Nov-19	28-Nov-19	RR Lantai 2 Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	

Sumber: Laporan Kegiatan di Sistem Monitoring Kebijakan Strategis (SIMONIKS).

**Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.1 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan
Potensi Sumberdaya Hayati**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN**

**PERUMUSAN KEBIJAKAN
HARI NELAYAN NASIONAL**

**ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2019**

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.2 : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)
IMPLEMENTASI *LOW BUDGET NATURAL FARMING* (LBNF)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.3 : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

KERTAS KERJA KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional

ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.4 : Kebijakan Tata Kelola Garam



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)
*Swasembada Garam Nasional Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Lahan
Pergaraman*

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No DIPA :
No Keg. :
Nomor : NRK-xx/DII/2019
Tanggal : Juni 2019

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.5: Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)
Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No. DIPA : /2019
No. Keg. :
Nomor : NRK- /DII/2019
Tanggal : Oktober 2019

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.6: Pengendalian Kebijakan Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN**

RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

Pengendalian Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO DIPA : /2019
NO KEG. :
NOMOR : NRK- /DII/2019
TANGGAL : Oktober 2019

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.7: Koordinasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)
Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No DIPA :
No Keg. :
Nomor : NRK-xx/DII/2019
Tanggal : 2019



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RINGKASAN KEBIJAKAN

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Marina

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

No. DIPA :
No. Keg. :
Nomor : NRK /DII/2019
Tanggal :

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.9: Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)
Tata Ruang Laut Nasional
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No DIPA :
No Keg. :
Nomor : NRK-xx/DII/2019
Tanggal : Oktober 2019

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.10 : Kebijakan Terkait Koordinasi Dan Monitoring Implementasi Kebijakan Dokumen RZWP3K Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN

***[KOORDINASI DAN MONITORING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DOKUMEN
RZWP3K DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
SECARA TERPADU]***

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No. DIPA : 120.01.1.350494/2019

No. Keg. : 5755.001.003.051.C

Nomor : NRK /DII/2019

Tanggal :

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.11 : Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)
Strategi Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

No DIPA : 120.01.1.350494/2019
No Keg. : 5755.001.002.051.B
Nomor : NRK- /DII.4/2019
Tanggal : Desember 2019

Data dukung SS 1 Cascading ke SS 2 untuk Sub IKU 4.12: Pengendalian Implementasi kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

RINGKASAN KEBIJAKAN

[PENGENDALIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEMARAN LIMBAH DI LAUT]

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

No. DIPA : 120.01.1.350494/2019
No. Keg. : 5755.001.003.051.C
Nomor : NRK /DII/2019
Tanggal :

Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW I)



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND.100/Ak/Roren/Maritim/IV/2019

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Para Sekretaris Deputi
Dari : Kepala Biro Perencanaan
Perihal : Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan Data Kinerja
Lampiran : -
Tanggal : 16 April 2019

Sehubungan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja pada aspek ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan dan data kinerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dengan hormat kami sampaikan :

1. Sesuai dengan ketentuan :
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - c. Pasal 227 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 - d. Pasal 18, 20 dan 21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 - e. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Aparatur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

maka setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan level Eselon I wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah penyampaian laporan bulanan dan kinerja, serta pengelolaan data kinerja secara elektronik.

2. Adapun batas akhir masa penyampaian realisasi kinerja dan kegiatan melalui SIK-M adalah tanggal 05 April 2019 pukul 23.59 WIB.
3. Selanjutnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, untuk IKU: Persentase ketaatan unit kerja dalam pengisian data kinerja, kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Level/Unit Kerja	Input Realisasi Kinerja TW I 2019	Tingkat Ketaatan per Kegiatan s.d TW I 2019	Nilai Ketaatan Per-unit Eselon I
Sekretariat Kementerian Koordinator	√	-	98,23%
Inspektorat	√	100,00%	
Biro Umum	√	98,00%	

Level/Unit Kerja	Input Realisasi Kinerja TW I 2019	Tingkat Ketaatan per Kegiatan s.d TW I 2019	Nilai Ketaatan Per-unit Eselon I
Biro Perencanaan	√	100,00%	
Biro Informasi dan Hukum	√	96,69%	
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	-	74,20%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	87,50%	
Asisten Deputi Hukum & Perjanjian Maritim	√	72,92%	
Asisten Deputi Keamanan & Ketahanan Maritim	√	77,78%	
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim	√	61,67%	
Asisten Deputi Navigasi & Keselamatan Maritim	√	71,11%	
Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	√	-	
Sekretariat Deputi SDA dan Jasa	√	100,00%	
Asisten Deputi Sumberdaya Hayati	√	100,00%	
Asisten Deputi Sumberdaya Energi, Mineral & Nonkonvensional	√	100,00%	
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman	√	100,00%	
Asisten Deputi Lingkungan & Kebencanaan Maritim	√	100,00%	
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	√	-	65,00%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	√	100,00%	
Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas & Sistem Logistik	√	58,33%	
Asisten Deputi Infrastruktur, Pertambangan & Energi	√	50,00%	
Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran Perikanan Pariwisata	√	58,33%	
Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur	√	58,33%	
Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK Budaya Maritim	√	-	100,00%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK Budaya Maritim	√	100,00%	
Asisten Deputi Pendidikan & Pelatihan Maritim	√	100,00%	
Asisten Deputi Pdayagunaan IPTEK Maritim	√	100,00%	
Asisten Deputi Budaya, Seni & Olahraga Bahari	√	100,00%	
Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim	√	100,00%	

Note:

(√): telah lapor

(x): tidak lapor

Berdasarkan data rata-rata ketaatan unit kerja pada tabel di atas, maka nilai rata-rata ketaatan pengisian data kinerja, kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman melalui aplikasi SIK-M adalah **87,49%**.

4. Adapun hasil penilaian ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan bulanan dan kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Laporan Bulanan TW I	Laporan Kegiatan Tahun 2018	Laporan Kinerja Tahun 2018	Nilai Ketaatan Per Unit
1	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	100%	100%	100%	100%
3	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	100%	100%	100%	100%
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	100%	100%	100%	100%
5	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK Budaya Maritim	100%	100%	100%	100%

Note:

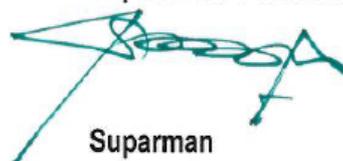
(√): telah lapor

(x): tidak lapor

Adapun tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam penyampaian laporan kinerja dan laporan bulanan (kegiatan) sebagaimana data tabel diatas, nilai rata-rata ketaatannya adalah **100%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan



Suparman

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Para Deputi lingkup kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Inspektur

Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW II)



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 21/AK/ROREIN/MARITIM/Jul/2019

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Para Sekretaris Deputi
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
Perihal : Ketaatan Penyampaian Pelaporan dan Data Kinerja
Lampiran : -
Tanggal : 8 Juli 2019

Sehubungan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja pada aspek ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan dan data kinerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dengan hormat kami sampaikan :

- Sesuai dengan ketentuan :
 - Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - Pasal 227 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - Pasal 18, 20 dan 21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Aparatur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maka setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan level Eselon I wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah penyampaian laporan bulanan dan kinerja, serta pengelolaan data kinerja secara elektronik.
- Adapun batas akhir masa penyampaian realisasi kinerja dan kegiatan melalui SIK-M adalah tanggal 05 Juli 2019 pukul 24.00 WIB;
- Data dihimpun per 06 Juli 2019 berdasarkan kelengkapan pada komponen kegiatan (*fishbone*) yang meliputi pengisian laporan anggaran (*pagu*, realisasi) dan data dukung kegiatan (*evidence*);
- Selanjutnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, untuk IKU: Persentase ketaatan unit kerja dalam pengisian data kinerja, kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Level/Unit Kerja	Input Realisasi Kinerja TW II 2018	Tingkat Ketaatan per Kegiatan s.d TW II 2018	Nilai Ketaatan Per-unit Eselon I
Sekretariat Kementerian Koordinator	√	-	97,54%
Inspektorat	√	100%	
Biro Umum	√	100%	

Level/Unit Kerja	Input Realisasi Kinerja TW II 2018	Tingkat Ketaatan per Kegiatan s.d TW II 2018	Nilai Ketaatan Per-unit Eselon I
Biro Perencanaan	√	100%	
Biro Informasi & Hukum	√	90,15 %	
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	-	99,00%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Hukum & Perjanjian Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Keamanan & Ketahanan Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim	√	96,67%	
Asisten Deputi Navigasi & Keselamatan Maritim	√	98,33%	
Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	√	-	
Sekretariat Deputi SDA dan Jasa	√	91,67%	
Asisten Deputi Sumberdaya Hayati	√	58,33%	
Asisten Deputi Sumberdaya Energi, Mineral & Nonkonvensional	√	50,00%	
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman	√	100%	
Asisten Deputi Lingkungan & Kebencanaan Maritim	√	100%	
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	√	-	100,00%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	√	100%	
Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas & Sistem Logistik	√	100%	
Asisten Deputi Infrastruktur, Pertambangan & Energi	√	100%	
Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran Perikanan Pariwisata	√	100%	
Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur	√	100%	
Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK Budaya Maritim	√	-	100,00%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK Budaya Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Pendidikan & Pelatihan Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Budaya, Seni & Olahraga Bahari	√	100%	
Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim	√	100%	

Note:

(√): telah lapor

(x): tidak lapor

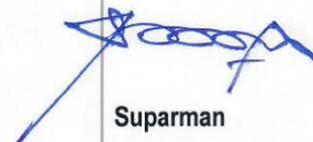
Berdasarkan data rata-rata ketaatan unit kerja pada tabel di atas, maka nilai rata-rata ketaatan pengisian data kinerja, kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman melalui aplikasi SIK-M adalah **95,31%**.

5. Adapun hasil penilaian ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan bulanan dan kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Laporan Bulanan TW II	Laporan Kinerja TW I	Nilai Ketaatan Per Unit
1	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	100%	100%	100%
3	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	100%	100%	100%
4	Deputi Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%
5	Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim	100%	100%	100%

6. Adapun tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam penyampaian laporan kinerja dan laporan bulanan (kegiatan) sebagaimana data tabel diatas tabel di atas, nilai rata-rata ketaatan nya adalah **100%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Suparman

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Para Deputi lingkup kemenko Bidang Kemaritiman
3. Inspektur

Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW III)

NILAI KETAATAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDA & JASA TW III

a) Persentase Ketaatan Unit Kerja dalam Pengisian Data Kinerja, Kegiatan dan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Nilai Kelengkapan Pelaporan			
PIBh Tahun	PIBh Periode		
2019	Trwulan III	Download Laporan	
Ketaatan Pelaporan			
Nama Unit	Indikator Kelengkapan		
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa		Resume Kegiatan	Detail
- Asisten Deputi Sumberdaya Hayati	100.00	Resume Kegiatan	Detail
- Asisten Deputi Sumberdaya Energi, Mineral dan Non Konvensional	100.00	Resume Kegiatan	Detail
- Asisten Deputi Jasa Kemaritiman	100.00	Resume Kegiatan	Detail
- Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	100.00	Resume Kegiatan	Detail
- Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	100.00	Resume Kegiatan	Detail

b) Nilai Penilaian ketaatan Unit Kerja dalam Penyampaian Laporan Bulanan dan Kinerja sebagai Berikut :

NO	UNIT ORGANISASI	LAPORAN BULANAN TW III	LAPORAN KINERJA TW II	NILAI KETAATAN PER UNIT
1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	100%	100%	100%
2	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM	100%	100%	100%
3	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA	100%	100%	100%
4	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR	100%	100%	100%
5	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK dan BUDAYA MARITIM	100%	100%	100%

Data Dukung Persentase Nilai Ketaatan Penyampaian Pelaporan (TW IV)



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND.003/AK/ROREIN/MARVES/II/2020

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Para Sekretaris Deputi
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
Perihal : Ketaatan Penyampaian Pelaporan Realisasi Kinerja TW IV 2019 secara Elektronik
Lampiran : -
Tanggal : 9 Januari 2020

Sehubungan dengan penerapan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja pada aspek ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan dan data kinerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan hormat kami sampaikan :

1. Sesuai dengan ketentuan :
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. Pasal 227 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - d. Pasal 18, 20 dan 21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - e. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Aparatur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimanmaka setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan level Eselon I wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah penyampaian laporan bulanan dan kinerja, serta pengelolaan data kinerja secara elektronik.
2. Data dihimpun per 7 Januari 2020 berdasarkan laporan yang diterima oleh Biro Perencanaan dan Informasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Berdasarkan data yang dihimpun, hasil penilaian ketaatan unit kerja dalam pengisian data kinerja, kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Level/Unit Kerja	Input realisasi kinerja TW IV	Tingkat ketaatan per kegiatan TW IV	Nilai ketaatan per unit Eselon I
Sekretariat Kementerian Koordinator	√	-	100%
Biro Umum	√	100%	
Biro Hukum	√	100%	
Biro Perencanaan & Informasi	√	100%	
Inspektorat	√	100%	
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	-	100%
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Hukum & Perjanjian Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Keamanan & Ketahanan Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim	√	100%	
Asisten Deputi Navigasi & Keselamatan Maritim	√	100%	
Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	√	-	100%
Sekretariat Deputi SDA dan Jasa	√	100%	
Asisten Deputi Sumberdaya Hayati	√	100%	
Asisten Deputi Sumberdaya Energi, Mineral & Nonkonvensional	√	100%	
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman	√	100%	
Asisten Deputi Lingkungan & Kebencanaan Maritim	√	100%	
Deputi Bidang Koordinasi	√	-	

Level/Unit Kerja	Input realisasi kinerja TW IV	Tingkat ketaatan per kegiatan TW IV	Nilai ketaatan per unit Eselon I
Infrastruktur			100%
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	√	100%	
Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas & Sistem Logistik	√	100%	
Asisten Deputy Infrastruktur, Pertambangan & Energi	√	100%	
Asisten Deputy Infrastruktur Pelayaran Perikanan Pariwisata	√	100%	
Asisten Deputy Industri Penunjang Infrastruktur	√	100%	
Deputy Bidang Koordinasi SDM IPTEK Budaya Maritim	√	-	100%
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK Budaya Maritim	√	100%	
Asisten Deputy Pendidikan & Pelatihan Maritim	√	100%	
Asisten Deputy Pendayagunaan IPTEK Maritim	√	100%	
Asisten Deputy Budaya, Seni & Olahraga Bahari	√	100%	
Asisten Deputy Jejaring Inovasi Maritim	Tidak ada target	100%	

Keterangan : (√) telah lapor

Berdasarkan data rata-rata ketaatan unit kerja pada tabel diatas, maka nilai rata-rata ketaatan pengisian data kinerja, kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui aplikasi SIK-M adalah **100%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan & Informasi



Arif Rahman

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Para Deputi lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Inspektur



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS
Nomor :ND.002/AK/ROREIN/MARVES/II/2020

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Para Sekretaris Deputi
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
Perihal : Ketaatan Penyampaian Pelaporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Triwulan IV 2019
Lampiran : -
Tanggal : 8 Januari 2020

Sehubungan dengan penerapan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja pada aspek ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan dan data kinerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan hormat kami sampaikan :

1. Sesuai dengan ketentuan :
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. Pasal 18, 20 dan 21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - d. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaporan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan level Eselon I wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah penyampaian laporan bulanan dan kinerja.
2. Data dihimpun per 7 Januari 2020 berdasarkan laporan yang diterima oleh Biro Perencanaan dan Informasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Laporan yang dihitung untuk untuk penilaian ketaatan penyampaian laporan Triwulan IV adalah laporan kinerja triwulan III serta laporan bulan September, Oktober, dan November.

4. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun, hasil penilaian ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan bulanan dan kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Laporan Bulanan TW IV	Laporan Kinerja TW III	Nilai Ketaatan Per Unit
1	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	100%	100%	100%
3	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa	66,67%	100%	83.33%
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	100%	100%	100%
5	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK Budaya Maritim	100%	100%	100%
Nilai rata-rata ketaatan				96.67%

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam penyampaian laporan kinerja dan laporan bulanan (kegiatan), nilai rata-rata ketaatan adalah **96.67%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Arif Rahman

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Para Deputi lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Inspektur

IKU 1 Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH.Thamrin No.8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Tlp. +62 2123951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND.01/Deputi II/ Maritim/I/2020

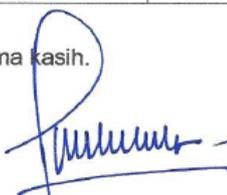
Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Dari : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Perihal : Penyampaian Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman
Tanggal : 6 Januari 2020

Sehubungan dengan tugas kami untuk melaksanakan koordinasi di bidang sumber daya alam dan jasa bersama ini kami laporkan hal – hal sebagai berikut :

1. Target – target produksi sumber daya alam dan jasa bidang kemaritiman yang ditetapkan dalam RKP dan RPJMN tahun 2015 – 2019 antara lain produksi perikanan, produksi mineral dan batu bara, produksi minyak dan gas serta nilai devisa pariwisata menjadi *outcome* yang terus kami dorong melalui berbagai kebijakan.
2. Pada tahun 2019, presentase produksi sumber daya alam dan jasa kemaritiman mencapai 94,84 % dari target yang ditetapkan pada RKP dengan rincian sebagai berikut

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Sumber
1	Produksi batubara	juta ton	406	558	100.00%	Kementerian ESDM
2	Produksi minyak bumi	ribu BM/hari	800	772	96.52%	Kementerian ESDM
3	Produksi gas bumi	ribu SBM/hari	1200	1261	100.00%	Kementerian ESDM
4	Produksi ikan	juta ton	17.4	14.13	81.21%	Bappenas, KKP
5	Nilai Devisa Pariwisata	Milliar USD	20	19.3	96.50%	Kementerian Pariwisata dan Ekraf
Persentase Produksi SDA dan Jasa Bidang Kemaritiman					94.84%	

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.


Agung Kuswandono

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi

PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA BIDANG KEMARITIMAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM & JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
2019



PENDAHULUAN

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, diperjanjikan Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Kemaritiman oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Persentase produksi sumber daya alam bidang kemaritiman sesuai target adalah persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumber daya alam kemaritiman sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMN dan/atau RKP, antara lain: produksi perikanan, produksi mineral dan batu bara, produksi minyak dan gas bumi, serta nilai devisa pariwisata.

TUJUAN

Untuk mengukur tingkat produksi sumber daya alam bidang kemaritiman dan persentase kontribusinya dalam ekonomi maritim.



METODE PERHITUNGAN

Formulasi untuk menghitung persentase produksi sumber daya alam dan jasa bidang kemaritiman adalah dengan membandingkan realisasi produksi sumber daya alam dan jasa dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN dan/atau RKP, selanjutnya dikalikan 100%.

Adapun komponen yang dihitung adalah:

- a. Produksi Batu Bara
- b. Produksi Minyak Bumi (*Crude Oil*)
- c. Produksi Gas Bumi (*Natural Gas*)
- d. Produksi Ikan
- e. Nilai Devisa Pariwisata



Setiap komponen tersebut akan dibandingkan dengan realisasi produksinya sesuai dengan data terbaru yang terpublikasi. Persamaan untuk perhitungan Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim adalah sebagai berikut:

Persentase Produksi SDA dan Jasa Bidang Maritim =

$$\frac{\text{Prod. ikan} + \text{Prod. Batubara} + \text{Prod. Minyak Bumi} + \text{Prod. Gas Bumi} + \text{Nilai Devisa Pariwisata}}{5} \times 100\%$$

Dimana:

$$\text{Prod. Ikan} = \frac{\text{Realisasi produksi ikan}}{\text{Target produksi ikan}} \quad (1)$$

$$\text{Prod. Batubara} = \frac{\text{Realisasi produksi batubara}}{\text{Target produksi batubara}} \quad (2)$$

$$\text{Prod. Minyak Bumi} = \frac{\text{Realisasi produksi minyak bumi}}{\text{Target produksi minyak bumi}} \quad (3)$$

$$\text{Prod. Gas Bumi} = \frac{\text{Realisasi produksi gas bumi}}{\text{Target produksi gas bumi}} \quad (4)$$

$$\text{Nilai Devisa Pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Nilai Devisa Pariwisata}}{\text{Target Nilai Devisa Pariwisata}} \quad (5)$$



TARGET PRODUKSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, didapatkan bahwa target produksi batubara, minyak bumi dan gas bumi seperti pada tabel 1, produksi ikan (tidak termasuk rumput laut) disajikan pada tabel 2 dan nilai devisa pariwisata pada table 3.

Tabel 1 Target Produksi Sumber Daya Energi

No.	Indikator	Satuan	2018 (target)	2019 (target)
1	Minyak Bumi	Ribu BM/hari	800	725
2	Gas Bumi	SBM/hari	1200	1.225
3	Batubara	Juta ton	406	400

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Tabel 2 Target Produksi Ikan

No.	Indikator	Satuan	2018 (target)	2019 (target)
1	Produksi ikan (tidak termasuk rumput laut)	Juta ton	17,4	18,8

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Tabel 3 Target Nilai Devisa Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	2018 (target)	2019 (target)
1	Nilai Devisa Pariwisata	Milliar Dollar As	20	20

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

REALISASI PRODUKSI

A. Produksi Batubara

Berdasarkan data dari Handbook of Indonesia's Energy Economy Statistics 2018 (Januari, 2019) dari Kementerian ESDM seperti pada tabel 4, didapatkan bahwa total produksi batubara pada tahun 2018 adalah sebesar **557.772.940 ton**

Tabel 4 Produksi Batubara

Tahun	Produksi (Ton)	Ekspor (Ton)	Impor (Ton)
2008	240.249.968	191.430.218	106.931
2009	256.181.000	198.366.000	68.804
2010	275.164.196	208.000.000	55.230
2011	353.270.937	272.671.351	42.449
2012	386.077.357	304.051.216	77.786
2013	474.371.369	356.357.973	609.875
2014	458.096.707	381.972.830	2.442.319
2015	461.566.080	365.849.610	3.007.934
2016	459.197.775	331.128.438	3.898.932
2017	461.248.184	297.741.135	4.532.308
2018	557.772.940	356.394.687	5.468.706

Sumber :

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM
- 2) Kementerian Perdagangan dan BPS untuk data Impor

Catatan : Batubara yang diproduksi Indonesia hanya *steam coal*

B. Produksi Minyak Bumi

Berdasarkan data dari Handbook of Indonesia's Energy Economy Statistics 2018 (Januari, 2019) dari Kementerian ESDM seperti pada tabel 5, didapatkan bahwa total minyak bumi (*crude oil*) pada tahun 2018 adalah sebesar **281.826 ribu barel**.

Tabel 5 Produksi Minyak Bumi

Tahun	Produksi (ribu BM)	Ekspor (ribu BM)	Impor (ribu BM)
2008	357.501	134.872	97.006
2009	346.313	132.223	120.119
2010	344.888	134.473	101.093
2011	329.265	135.572	96.862
2012	314.666	106.485	95.968
2013	300.830	104.791	118.334
2014	287.902	93.080	121.993
2015	286.814	115.017	136.666
2016	304.167	125.516	148.361
2017	292.374	102.678	141.616
2018	281.826	74.449	113.055

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian ESDM

C. Produksi Gas Bumi

Berdasarkan data dari Handbook of Indonesia's Energy Economy Statistics 2018 (Januari, 2019) dari Kementerian ESDM seperti pada tabel 6, didapatkan bahwa total produksi gas bumi (*natural gas*) pada tahun 2018 adalah sebesar **2.996.802 MMSCF**.

Tabel 6 Produksi Gas Bumi

Tahun	Produksi (MMSCF)
2008	2.885.328
2009	3.060.897
2010	3.407.592
2011	3.256.379
2012	3.174.639
2013	3.120.838
2014	3.175.791
2015	3.116.142
2016	3.070.239
2017	2.963.184
2018	2.996.802

Sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian ESDM

D. Produksi Ikan

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan (2019), seperti pada table 7, didapatkan produksi ikan (tidak termasuk rumput laut) tahun 2018 adalah **14,13 juta ton**.

Tabel 7 Produksi Ikan

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018
1	Produksi ikan	Juta ton	11,9	13,6	14,13

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019

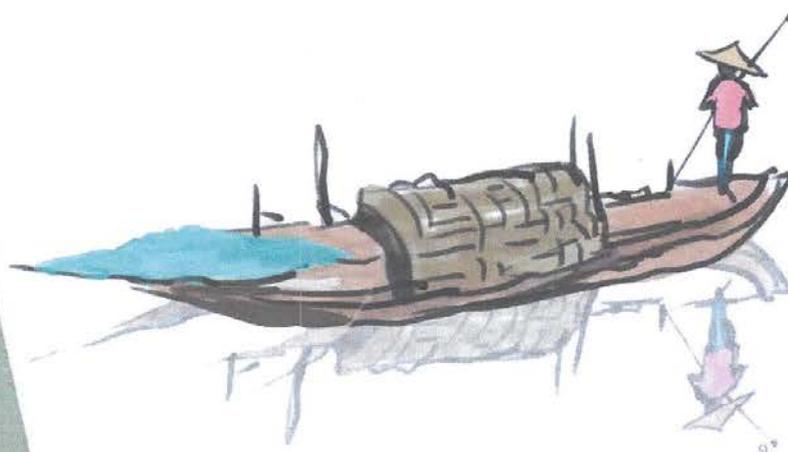
E. Nilai Devisa Pariwisata

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) seperti pada table 8, didapatkan nilai devisa pariwisata tahun 2018 adalah **19,3 miliar dolar AS**.

Tabel 8 Nilai Devisa Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Nilai Devisa Pariwisata	Milliar USD	15,2	19,3

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019



KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dijabarkan sebelumnya dirangkum pada table 9, sehingga didapatkan bahwa persentase produksi sumber daya alam dan jasa bidang kemaritiman sebesar 94,84%

Tabel 9 Persentase Produksi Sumber Daya Alam dan Jasa Bidang Maritim

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Sumber
1	Produksi batubara	juta ton	406	558	100.00%	Kementerian ESDM
2	Produksi minyak bumi	ribu BM/hari	800	772	96.52%	Kementerian ESDM
3	Produksi gas bumi	ribu SBM/hari	1200	1261	100.00%	Kementerian ESDM
4	Produksi ikan (tidak termasuk rumput laut)	juta ton	17.4	14.13	81.21%	Bappenas, KKP
5	Nilai Devisa Pariwisata	Milliar USD	20	19.3	96.50%	Kementerian Pariwisata dan Ekraf
Persentase Produksi SDA dan Jasa Bidang Maritim					94.84%	

Demikian laporan produksi sda dan jasa bidang kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2019 disampaikan.

Jakarta, Desember 2019
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa


Agung Kuswandono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.H. Thamrin No. 8 , Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ND. 181 /Deputi II/Maritim/XII/2019

Kepada Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
Dari : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Hal : Pengajuan Rancangan Parameter Indeks Kesehatan Laut Indonesia
Tanggal : 27 Desember 2019

Sehubungan dengan tugas kami untuk melakukan koordinasi terkait kebijakan *Ocean Health Index* bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Ocean Health Index* (OHI) adalah sebuah kerangka kerja kompleks dan terintegrasi untuk mengukur tingkat kesehatan lautan yang dikembangkan oleh para ilmuwan, pakar kelautan, dan lembaga dari berbagai negara.
2. Penilaian OHI dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2012 oleh tim independen gabungan dengan meninjau 10 indikator atau *goals* yang meliputi: penyimpanan karbon, biodiversitas, perairan yang bersih, perlindungan pesisir, keunikan wilayah, penyediaan pangan dari laut, kesempatan bagi perikanan tradisional, mata pencaharian dan ekonomi pesisir, produk-produk alam, serta pariwisata dan rekreasi.
3. Pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan nilai 65 dari skala 100; sekaligus menempati urutan 137 dari 221 wilayah yang dinilai.
4. Kerangka kerja OHI tersebut selanjutnya akan diadaptasi menjadi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang akan digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, dengan cara menyesuaikan setiap *goals* dengan karakteristik wilayah Indonesia.
5. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi bersama dengan KLHK, KKP, LIPI, Bappenas, dan Conservation International Indonesia serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi telah berhasil menyusun rancangan parameter Indeks Kesehatan Laut Indonesia 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih



Agung Kuswandono

Tembusan

1. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
2. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi

Lampiran 1.
Nilai OHI Indonesia

GOAL	SCORE	RANK ^(?)	ANNUAL SCORE TRACK ^(?)	% CHANGE ^(?)
 OVERALL SCORE	65	137	0%	0%
FOOD PROVISION	34	161	0%	-7%
 WILD CAUGHT FISHERIES	44	133	0%	-1%
 MARICULTURE	2	40	16%	45%
ARTISANAL FISHING OPPORTUNITIES	58	158	1%	4%
NATURAL PRODUCTS	92	10	0%	-2%
CARBON STORAGE	67	111	0%	1%
COASTAL PROTECTION	88	90	0%	1%
COASTAL LIVELIHOODS & ECONOMIES	71	166	0%	0%
 LIVELIHOODS	44	190	0%	0%
 ECONOMIES	99	95	0%	0%
TOURISM & RECREATION	36	125	-3%	-3%
SENSE OF PLACE	64	103	-1%	2%
 ICONIC SPECIES	65	117	-2%	-5%
 LASTING SPECIAL PLACES	64	103	0%	10%
CLEAN WATERS	58	126	1%	2%
BIODIVERSITY	85	152	0%	0%
 SPECIES	87	65	0%	-1%
 HABITATS	82	173	0%	0%



**INSPEKTORAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340 – Indonesia
Telepon +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM
DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: LHE- 4/INS/MARITIM/WAS/VI/2019
Tanggal: 28 Juni 2019



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Lt. 8, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Tlp. 021 351 9162 | Fax. 021 2239 2589